

2019, jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 26,39% (7.123,97 ton/tahun). Pagu anggaran program pengelolaan perikanan budidaya sebesar Rp.2.983.760.700.00 dan terealisasi Rp.2.925.737.369,85 atau 98,06% dengan realisasi fisik 100%. Pada tahun 2018 persentase peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 12 % (5.636,50 ton/tahun) dengan

target 9% (6.380 ton/tahun) dari sisi capaian produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dari tahun 2018, dari sisi anggaran dan capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2018 sebesar Rp.3.938.582.100,00 dan terealisasi Rp.3.884.998.549,00 atau 98,64% dengan realisasi fisik 100%, adanya penurunan secara pagu anggaran tetapi secara capaian produksi meningkat di karenakan pada tahun 2018 ada kegiatan rehabilitasi sedang/berat kolam ikan di BBI Pinang Merah kegiatan ini dianggarkan melalui proses Dana Alokasi khusus (DAK) yang berdampak pada meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi perbenihan di BBI pinang merah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan ada kegiatan penambahan pengadaan keramba jaring apung (KJA) di Danau Masorayan dan Danau Gatal Kecamatan Kotawaringin Lama.

b) Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan konsumsi ikan perkapita dengan indikator persentase peningkatan konsumsi ikan perkapita per tahun mencapai 100% (angka konsumsi ikan 50,5 kg/tahun/perkapita. Sampai dengan akhir tahun 2019, persentase peningkatan angka konsumsi ikan tercapai 50,5 kg/tahun/kapita. Plafon anggaran program pengembangan usaha hasil perikanan sebesar Rp.1.284.437.600,00 dan terealisasi Rp.1.264.644.563.00 atau 98,46% dengan realisasi fisik 99,99%. Realisasi fisik tidak 100% dikarenakan ada satu belanja yang tidak di laksanakan yaitu belanja penggandaan kegiatan penguatan sistem perizinan usaha perikanan penyebab kelalaian dari pptk sehingga tidak dilaksanakan dan di spjkan dengan nilai Rp.168.000,00. Pada tahun 2018 persentase peningkatan angka konsumsi ikan 100% (47kg/tahun/kapita) dari sisi capaian angka konsumsi ikan tahun 2018 sama dengan tahun 2019 yaitu 100%, dari sisi anggaran dan capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2018 sebesar Rp. Rp.1.848.394.020,00 dan terealisasi Rp.1.795.838.193,00 atau 97,16% dengan realisasi fisik 100%. secara pagu anggaran tahun 2018 lebih besar dikarenakan ada kegiatan fisik peningkatan fasilitas sentra pusat promosi dan pemasaran dengan kegiatan pembangunan pagar depan pusat promosi dan pemasaran, dan pembangunan pagar pusat promosi dan pemasaran samping, belakang dan pemisah yang berfungsi sebagai pembatas dan memudahkan pengamanan aset karena adanya pagar keliling sentra pusat promosi.

c) Program Pengembangan Perikanan

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap. Indikatornya adalah persentase produksi perikanan tangkap dengan target sasaran di tahun 2019 mencapai 5% atau senilai 15.801,59 ton/tahun. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 9,31% atau senilai 18.972,63 ton/tahun. Plafon anggaran program pengembangan perikanan sebesar Rp.2.368.920.000,00 dan terealisasi sebesar



Rp.2.321.587.700,00 atau 98,00% dengan realisasi fisik 100%. Pada tahun 2018 persentase peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 9% (17.356,46 ton/tahun) dengan target 5% (15.049,13 ton/tahun) dari sisi capaian produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari tahun 2018, dari sisi anggaran dan capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2018 sebesar Rp. Rp.2.991.117.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.732.497.090,00 atau 91,35% dengan realisasi fisik 98,63%. adanya penurunan secara pagu anggaran tetapi secara capaian produksi meningkat di karenakan pada tahun 2018 ada kegiatan pengadaan kapal 3 GT beserta alat tangkap kegiatan ini dianggarkan melalui proses Dana Alokasi khusus (DAK) dan adanya kegiatan bantuan hibah kepada kelompok perikanan berupa pengadaan alat tangkap ikan, pengadaan kapal 5 GT, 1 GT yang berdampak pada meningkatnya tangkapan ikan di laut.

2.5.2. Urusan Pertanian

DINAS TPHP

Alokasi anggaran Belanja Langsung (BL) urusan Pertanian khususnya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan untuk 4 (empat) program utama di atas adalah sebesar Rp. 8.768.559.850,00 dengan realisasi mencapai Rp. 7.951.078.796,00 atau 90,68% dan realisasi fisik sebesar 96,51 %. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah:

a. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Program ini menitikberatkan pada kebutuhan dasar ketersediaan pangan, pengembangan komoditas unggulan dan komoditas potensial. Perlindungan tanaman pangan dari hama dan penyakit serta gangguan lainnya yang akan mempengaruhi produksi dan produktivitas tanaman pangan. Untuk mendapatkan bibit/benih yang tangguh, tahan penyakit dan unggul dalam kualitas dan mutu diperlukan pengembangan bibit tanaman pangan agar sesuai dengan kondisi setempat. Aspek pemasaran dan pengolahan hasil pasca panen harus mendapat perhatian, agar produktivitas dan mutu tanaman pangan serta pengolahan pasca, dan pemasaran hasil ditingkat petani saling menguntungkan. Program ini mempunyai 4 (empat) kegiatan dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman pangan, dengan pagu program sebesar Rp. 1.289.825.600,00 dengan realisasi Rp. 1.248.966.718,00 atau 96,83% dengan fisik 98,72%

b. Program Peningkatan Produksi Hortikultura

Program ini menitikberatkan pada kebutuhan dasar ketersediaan sayur mayur, buah-buahan. Pengembangan komoditas unggulan dan komoditas potensial. Perlindungan tanaman hortikultura dari hama dan penyakit serta gangguan lainnya yang akan mempengaruhi produksi dan produktivitas hortikultura. Untuk mendapatkan bibit/benih yang tangguh, tahan penyakit dan unggul dalam kualitas dan mutu diperlukan pengembangan bibit hortikultura agar sesuai dengan kondisi setempat. Aspek pemasaran dan pengolahan hasil pasca panen harus mendapat perhatian agar produktivitas dan mutu hortikultura serta pengolahan pasca, dan pemasaran hasil ditingkat petani saling menguntungkan. Di



samping kebutuhan mendasar tersebut di atas, ketersediaan tanaman obat-obatan dan angrek juga menjadi perhatian dari ketersediaan dan pengembangannya. Program ini mempunyai 4 (empat) kegiatan dalam rangka meningkatkan produktivitas hortikultura dengan pagu sebesar Rp. 694.671.000,00 dan terealisasi Rp. 681.781.165,00 atau 98,14% dengan fisik 99,53%.

c. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Program ini menitikberatkan pada bagaimana meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan milik petani, juga ketersediaan informasi pasar harga buah terutama sawit dan karet pengembangan komoditas unggulan dan komoditas potensial, perlindungan tanaman perkebunan dari hama dan penyakit serta gangguan lainnya yang akan mempengaruhi produksi dan produktivitas perkebunan. Untuk mendapatkan bibit/benih yang tangguh, tahan penyakit dan unggul dalam kualitas dan mutu diperlukan pengembangan bibit tanaman perkebunan agar sesuai dengan kondisi setempat. Aspek pemasaran dan pengolahan hasil pasca panen harus mendapat perhatian, agar produktivitas dan mutu hortikultura serta pengolahan pasca, dan pemasaran hasil ditingkatkan petani saling menguntungkan. Program ini mempunyai 4 (empat) kegiatan dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan, dengan pagu program sebesar Rp. 764.660.000,00 dan terealisasi Rp. 743.163.771,00 atau 97,19 % dengan capaian fisik 98,28%.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian

Program ini adalah sebagai pendukung untuk meningkatkan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. Produksi dan produktivitas tidak mungkin dicapai tanpa adanya sarana dan prasarana termasuk di dalamnya keberadaan penyuluh pertanian. Program ini mempunyai 4 (empat) kegiatan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian dengan pagu sebesar Rp. 6.019.402.250,00 dan telah terealisasi Rp. 5.277.167.142,00 atau 87,67 % serta capaian fisik 89,50%

Bidang Peternakan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah:

a. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, penyiapan pemberian rekomendasi teknis usaha di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet), dan kesejahteraan hewan (kesrawan). Program ini memiliki 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 881.710.500,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 842.461.308,00 atau 95,55% dan realisasi fisik sebesar 99,40%.

b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini bertujuan untuk menyiapkan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi ternak. Program ini memiliki 4 (empat) kegiatan dengan pagu anggaran



keseluruhan Rp. 1.311.668.000,00 dan terealisasi Rp. 1.279.992.695,00 atau 97,59% dengan realisasi fisik sebesar 99,88%.

c. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

Program ini bertujuan untuk melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan SDM, kelembagaan, pembiayaan dan investasi serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 497.767.000,00 dan terealisasi Rp. 492.003.449,00 atau 98,84% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

d. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan

Program ini bertujuan agar melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan. Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan dengan pagu Rp. 627.411.000,00 dan terealisasi Rp. 586.692.099,00 atau 93,51% dengan realisasi fisik 99,80%.

2.5.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Alokasi anggaran pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebesar Rp.1.889.735.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.1.812.251.782,00 atau 98,60% dari rencana anggaran

a. Program Peningkatan Infrastruktur, Pengendalian Energi dan Sumber Daya Alam

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah melalui pembinaan, koordinasi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Energi dan Sumber Daya Alam, serta meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan SDA dengan pagu Rp.1.889.735.000,00. Adapun besaran realisasi fisik yang dicapai pada tahun 2019 adalah 99,89% dan realisasi keuangan Rp.1.863.117.558,00 atau 98,59%.

Tabel 2.92
Realisasi Program Energi sumber daya dan Mineral

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat	10%	9.72 %	40%	40,5 %
Program Pembinaan dan Pengawasan bidang	Persentase Jumlah Pengelolaan Air Permukaan	100%	100%	100 %	90 %



Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Sesuai Dengan Aturan				
Pertambangan	Perundang-Undangan				
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Persentase ketersediaan data inventarisasi wilayah penambangan rakyat tanpa izin	100%	100%	100 %	100 %

Sumber : LKPJ 2019

b. Program Peningkatan Infrastruktur, Pengendalian Energi dan Sumber Daya Alam

Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah jumlah pagu anggaran pada DPA dapat dialokasikan untuk memaksimalkan volume output. Sehingga pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU yang semula ditargetkan sebesar 21% dapat tercapai 26,21% dari seluruh jumlah PJU yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.5.4 Urusan Pariwisata

lokasi anggaran urusan pariwisata tahun 2019 Rp.10.497.320.000,00 (bidang) dengan realisasi mencapai Rp.10.048.476.667,00 atau 95,72%.

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 1) Gathering Genpi Untuk Strategi Pemasaran
 - Maksud dan tujuan adalah memberikan dukungan dan mempromosikan berbagai destinasi wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui media digital.
 - Target peserta sebanyak 16 orang.
 - Pagu kegiatan Rp.12.915.000,00
 - Realisasi keuangan Rp.12.635.000,00 atau 97,83%
 - Realisasi fisik 100%
- 2) Survei Kesiapan Sail Kumai Tahun 2020
 - Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memberikan informasi mengenai persiapan lokasi, atraksi dan aktivitas pendukung untuk kegiatan Sail Kumai yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2020
 - Target peserta 1 orang tenaga ahli surveyor dan 1 orang asisten.
 - Pagu kegiatan Rp.48.815.000,00
 - Realisasi Keuangan Rp.48.395.000,00 atau 99%
 - Realisasi fisik 100%.
- 3) Pendataan Analisa Pasar
 - Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mengumpulkan informasi seputar data statistic kepariwisataan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2019.
 - Target kegiatan sebanyak 5 (lima) kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.



- Pagu kegiatan Rp.51.670.000,00
 - Realisasi keuangan Rp.50.727.000,00 atau 98,17%
 - Realisasi fisik 100%
- 4) Penelitian / Kajian Pengembangan Pariwisata Kotawaringin Barat
- Maksud dan tujuan kegiatan adalah melaksanakan kajian mengenai identifikasi potensi dan masalah pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Target kegiatan sebanyak laporan .
 - Pagu kegiatan Rp.51.670.000,00
 - Realisasi keuangan Rp.50.727.000,00 atau 98,17%
 - Realisasi fisik 100%
- 5) Pembuatan Bahan/Barang Promosi dan Informasi
- Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memberikan informasi destinasi pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dengan target pengunjung pameran, wisatawan, tamu daerah, pengunjung event, organisasi pariwisata, dan komunitas pariwisata.
 - Pagu kegiatan sebesar Rp.50.000.000,00
 - Realisasi Keuangan Rp.50.000.000,00 atau 100%
 - Realisasi fisik 100%
- 6) Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Objek Wisata
- Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memberikan informasi objek wisata di pintu masuk TNTP/Sungai Sekonyer.
 - Pagu kegiatan sebesar Rp.45.000.000,00
 - Realisasi Rp.44.275.000,00 atau 98,39%
 - Realisasi fisik 100%
- 7) Pemilihan Aba Ambo
- Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk menciptakan generasi muda yang kreatif, menjunjung tinggi nilai- nilai seni budaya dan kearifan local secara berkelanjutan.
 - Target peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang finalis Pagu kegiatan Rp.145.480.000,00
 - Realisasi keuangan sebesar Rp.138.139.000,00 atau 99,28%
 - Realisasi fisik 100%
- 8) Pemilihan Jagau Bawi Nyai Kalteng
- Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk menciptakan generasi muda yang kreatif serta menjunjung tinggi nilai seni budaya, dan kearifan local secara berkelanjutan serta memperkenalkan dan mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan diwujudkan dalam bentuk mengirimkan aba ambo untuk berkompetensi menjadi Jagau Bawi (duta wisata Provinsi Kalteng).
 - Target sebanyak 2 (dua) orang peserta

- Pagu kegiatan Rp.85.539.000,00
 - Realisasi Keuangan Rp.81.532.600,00 atau 95,31%
 - Realisasi fisik 100%
- 9) Kegiatan Penyambutan Yacht Rally Sail Indonesia 2019
- Maksud dan tujuan kegiatan adalah memperkenalkan dan mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Target peserta sebanyak 250 orang
 - Pagu kegiatan Rp.98.990.000,00
 - Realisasi keuangan Rp.287.920.491,00 atau 96,29%
 - Realisasi fisik 100%
- 10) Kegiatan Expo Kotawaringin Barat
- Maksud dan tujuan kegiatan adalah memperkenalkan dan mempromosikan objek –objek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan menyediakan ruang bagi pemangku kepentingan pariwisata untuk menampilkan materi promosinya.
 - Target kegiatan sebanyak 1 (satu) stand
 - Pagu kegiatan Rp.26.519.000,00
 - Realisasi keuangan sebesar Rp.26.509.000,00 atau 99,96%,
 - Realisasi fisik 100%
- 11) Kegiatan Kalteng Expo
- Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan objek – objek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan menyediakan ruang bagi stakeholder pariwisata untuk menampilkan materi promosinya.
 - Target sebanyak 1 (satu) stand
 - Pagu kegiatan Rp.148.131.000,00
 - Realisasi keuangan Rp.146.633.246,00 atau 98,99%
 - Realisasi fisik 100%.
- 12) Kegiatan Pangkalan Bun Famtrip dan Table Top 2019
- Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat ke dalam paket wisata ke tour operator di luar Kotawaringin Barat.
 - Target kegiatan adalah 20 buyer dari luar Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Pagu kegiatan Rp.128.534.000,00
 - Realisasi Rp.123.234.000,00 atau 95,87%
 - Realisasi fisik 100%.
- 13) Kegiatan Penyusunan Kalender Wisata Kotawaringin Barat Tahun 2020
- Maksud dan tujuan kegiatan adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang event-event pariwisata Tahun 2020.
 - Target kegiatan sebanyak 1 (satu) buah kalender wisata.

- Pagu kegiatan Rp.12.044.000,00
- Realisasi Rp.11.219.000,00 atau 93,15%
- Realisasi fisik 100%

14) Kegiatan Pemilihan Miss Earth Indonesia

- Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mempromosikan Kalimantan Tengah secara umum dan Kabupaten Kotawaringin Barat secara khusus di tingkat nasional.
- Target kegiatan yakni pemenang Miss Earth tahun 2019.
- Pagu kegiatan sebesar Rp.4.100.000,00
- Realisasi Rp.3.961.000,00 atau 96,61%
- Realisasi fisik 100%

15) Kegiatan Pemilihan Duta Wisata Indonesia

- Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mengikuti pemilihan Duta Wisata Nasional sebagai wakil dari Kalimantan Tengah.
- Target kegiatan yakni pemenang Duta Wisata Indonesia tahun 2019.
- Pagu kegiatan sebesar Rp.4.100.000,00
- Realisasi Rp.3.961.000,00 atau 96,61%
- Realisasi fisik 100%

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 1) Pembayaran Honorarium dan Upah Kerja di Objek Wisata Maksud dan tujuan kegiatan adalah mewujudkan kebersihan, keamanan dan kenyamanan objek wisata. Target kegiatan adalah pegawai honorer di lokasi objek wisata. Pagu kegiatan Rp.266.409.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.261.825.200,00, atau 94,73% serta realisasi fisik 100%
- 2) Pembelian Alat Kebersihan di Objek Wisata, Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mewujudkan kebersihan di lokasi objek wisata. Targetnya adalah kebersihan di objek wisata dengan pagu Rp.19.291.050,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.289.200,00 atau 100% serta realisasi fisik 100%
- 3) Pembelian Bahan Bakar Minyak Peralatan Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mewujudkan kebersihan di lokasi objek wisata. Target adalah kebutuhan BBM mesin potong rumput dengan pagu Rp.21.000.000,00 dan terealisasi Rp.21.000.000,00 atau 100% serta realisasi fisik 100%.
- 4) Pembelian Bahan Pembersih, Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mewujudkan kebersihan di lokasi objek wisata. Target adalah kebutuhan bahan pembersih di objek wisata dengan pagu kegiatan Rp. 3.692.200,00 dan terealisasi Rp.3.600.000,00 atau 97,50% serta realisasi fisik 100%
- 5) Pembelian alat listrik dan elektronik, Maksud dan Tujuan adalah terwujudnya kebutuhan penjaga malam di Pangkalan Bun Park. Target kegiatan yaitu terpenuhinya keamanan lingkungan di Pangkalan Bun Park. Pagu kegiatan Rp.1.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.600.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100% .



- 6) Perjalanan Dinas Monitoring Objek Wisata Maksud dan tujuan kegiatan adalah termonitornya pengelolaan sarana dan prasarana di objek wisata. Targetnya yaitu perjalanan dinas monitoring objek wisata dalam kabupaten. Pagu kegiatan Rp.14.605.000,00 dan terealisasi Rp.13.830.000,00 atau 94,69% dengan realisasi fisik 100%
- 7) Pengadaan Mebel di Tempat Wisata, Maksud dan tujuan kegiatan adalah terwujudnya sarana dan prasarana di objek wisata. Target adalah kebutuhan mebel di objek wisata. Pagu kegiatan sebesar Rp.18.100.000,00 dan terealisasi Rp.18.100.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%
- 8) Pengadaan Alat-Alat Studio Maksud dan tujuan kegiatan adalah terwujudnya sarana dan prasarana di objek wisata. Target yaitu kebutuhan TOA di objek wisata. Pagu kegiatan sebesar Rp.6.000.000,00 dan terealisasi Rp.6.000.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%
- 9) Pengadaan Instalasi Listrik, Maksud dan tujuan kegiatan adalah terwujudnya sarana dan prasarana di objek wisata. Target yaitu kebutuhan aliran listrik di objek wisata. Pagu kegiatan Rp.14.100.000,00 dan terealisasi Rp.14.100.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%
- 10) Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan SDM anggota kelompok sadar wisata (pokdarwis). Targetnya yakni pelatihan kelompok sadar wisata. Pagu kegiatan sebesar Rp.50.150.000,00 dan terealisasi Rp.42.350.000,00 atau 84,45% dengan realisasi fisik 100%
- 11) Pelatihan Kerajinan Pokdarwis Maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan SDM di bidang kerajinan anggota kelompok sadar wisata. Pagu kegiatan Rp.147.124.700,00 dan terealisasi Rp. 145.749.700,00 atau 99,07% dengan realisasi fisik 100%
- 12) Pelatihan Pemangku Kepentingan Meeting Pengembangan Destinasi Maksud dan tujuan kegiatan adalah tercapainya kesepakatan dengan pemangku kepentingan mengenai pengembangan pariwisata. Target yaitu gagasan dan ide dari pemangku kepentingan pariwisata. Pagu kegiatan sebesar Rp.12.500.000,00 dan terealisasi Rp.12.500.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%
- 13) Perjalanan Dinas Pembinaan/Pendampingan Sadar Wisata di Desa Wisata Maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata. Target yaitu pembinaan sadar wisata. Pagu kegiatan Rp. 12.500.000,00 dan terealisasi Rp. 11.340.000,00 atau 90,72% dengan realisasi fisik 100%
- 14) Perjalanan Dinas Identifikasi Potensi Wisata Kabupaten Maksud dan tujuan kegiatan adalah identifikasi objek wisata yang perlu dikembangkan. Target yaitu identifikasi objek wisata. Pagu kegiatan Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi Rp. 8.510.000,00 atau 85,1% dengan realisasi fisik 100%



- 15) Studi Banding Desa Wisata di Kotawaringin Barat, Maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan desa wisata daerah lain. Target yaitu pengelolaan desa wisata daerah lain. Pagu kegiatan Rp. 73.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 71.119.800,00 atau 96,93% dengan realisasi fisik 100%
- 16) SPPD Monitoring dan Cek Lokasi Objek Wisata Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mengidentifikasi/ verifikasi pada objek wisata dan usulan kegiatan. Target yaitu 6 (enam) kecamatan dengan pagu kegiatan Rp.12.600.000,00 dan terealisasi Rp.12.600.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%
- 16) SPPD Koordinasi dan Konsultasi DAK , Maksud dan tujuan kegiatan adalah mempermudah koordinasi dalam rangka pengajuan usulan sumber dana DAK Fisik Pusat Target 3 (tiga) jenis usulan pada kegiatan pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan amenities pariwisata. Pagu kegiatan Rp.43.000.000,00 dan terealisasi Rp.43.000.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100% Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (APBD) Kegiatan Belanja Barang/ Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk pengembangan Destinasi Wisata Desa. Target sebanyak 5 (lima) paket kegiatan. Pagu kegiatan Rp.501.853.015,00 dan terealisasi Rp.479.721.600,00 atau 95,59 % dengan realisasi fisik 100%
- 17) Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Kawasan Wisata Pantai Maksud dan tujuan kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk menarik daya tarik pada tempat wisata. Target 4 (empat) sarana prasarana di 2 (dua) lokasi objek wisata. Pagu kegiatan Rp.650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.645.852.000,00 atau 99,36% dengan realisasi fisik 100%
- 18) Belanja Modal Pengadaan konstruksi/ pembelian gedung kantor Maksud dan tujuan kegiatan adalah tersedianya pendopo kesenian untuk aktifitas dan kegiatan masyarakat. Target sebanyak 1 (satu) unit pendopo kesenian/ pertunjukan. Pagu kegiatan Rp.313.000.000,00 dan terealisasi Rp.307.800.500,00 atau 98,34% dengan realisasi fisik 100%
- 19) Belanja Bahan Baku Bangunan Maksud dan tujuan kegiatan adalah terlaksananya pengecatan rumah kampung warna warni untuk menarik minat wisata/ pengunjung wisata. Target terlaksana 2 (dua) RT pada tempat tujuan wisata. Pagu kegiatan Rp.10.000.000,00 dan terealisasi Rp.9.950.000,00 atau 99,5 % dengan realisasi fisik 100%.
- 20) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)
- 21) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Kawasan Wisata Pantai Maksud dan tujuan kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk menarik daya tarik pada tempat wisata. Target 10 (sepuluh) sarana prasarana di 3 (tiga) lokasi objek wisata. Pagu kegiatan Rp.1.905.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.889.713.930,00 atau 99,20% dengan realisasi fisik 100%



- 22) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Dermaga Maksud dan tujuan kegiatan adalah terbangunnya dermaga wisata untuk memfasilitasi para pengunjung wisata yang menggunakan kapal wisata/kelotok wisata. Target terbangun 1 (satu) unit dermaga wisata. Pagu kegiatan Rp.946.545.000,00 dan terealisasi Rp.844.200.000,00 atau 89,19% dengan realisasi fisik 100%.

c. Program Pengembangan Kemitraan

- 1) Bimtek Kompetensi Pelaku Wisata (Barista) Maksud dan tujuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan Kompetensi Barista yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, bagi pengelola/ pengusaha usaha pariwisata sektor penyaji kopi (barista) di Kabupaten Kotawaringin Barat dan mendukung peningkatan harga pasar produksi dan kualitas kopi lokal (jenis kopi liberica pada Desa Kumpai Batu Atas) untuk kesejahteraan petani kopi. Target sebanyak 30 (Tiga puluh) orang dan terealisasi sebanyak 30 orang. Pagu kegiatan Rp.50.365.000,00 dan terealisasi Rp.50.015.000,00 atau 99,31%. Persentase realisasi fisik 100%, dengan Sisa anggaran sebesar Rp.350.000,00 karena adanya efisiensi dari belanja sewa mobil dan transport moderator. Kegiatan berlokasi di Hotel Kecubung pada tanggal 24-25 September 2019.
- 2) Pelatihan Tourist Cook Association (TCA) Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan juru masak kelotok wisata Kumai- Tanjung Puting yang menyajikan makanan pada wisatawan Nusantara dan Mancanegara. Sajian ini harus memenuhi standar mutu dan kualitas makanan dan memiliki SOP. Target sebanyak 20 orang yang terealisasi 20 orang. Pagu kegiatan Rp.33.957.000,00 dan terealisasi Rp.33.607.000,00 atau 98,97%, dengan realisasi fisik 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 350.000,00. Kegiatan berlokasi di Hotel Kecubung pada tanggal 26-27 Februari 2019
- 3) Pelatihan Housekeeping Tost (PHRI Kobar) Maksud dan tujuan kegiatan adalah tersedianya sektor pelayanan jasa yang kuat untuk pengembangan pariwisata, untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi pekerja sesuai bidang (sesuai SKKNI), meningkatkan pengetahuan tentang dunia industri pariwisata, meningkatkan pengetahuan terhadap kebutuhan tamu dan karyawan, menciptakan kepuasan pelanggan sehingga diharapkan akan meningkatkan tingkat hunian dan keuntungan. Target peserta sebanyak 15 orang yang terealisasi 15 orang. Pagu kegiatan Rp. 14.348.000; dan terealisasi Rp. 14.348.000; realisasi fisik 100%. Kegiatan berlokasi di Hotel Kecubung pada tanggal 29 Juni 2019.
- 4) Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengembangan SDM Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan standarisasi kepariwisataan. Target yaitu ke Kementerian Pariwisata pada Asdep Bidang Kelembagaan dan Regulasi Pariwisata, Asdep Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga di Jakarta. Pagu kegiatan



Rp.17.844.000,00 dan terealisasi Rp.17.466.255,00 atau 97,88% dengan sisa Rp. 377.745; atau 2,12%.

- 5) Sosialisasi Standar Usaha Pariwisata Maksud dan tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dunia usaha yang bergerak dibidang kepariwisataan. Target sebanyak 240 orang di 6 Kecamatan, yang terealisasi 240 orang Pagu kegiatan Rp.99.575.300,00 dan terealisasi Rp.82.182.740,00 atau 82,53 % sisa dana Rp. 17.392.560; dengan realisasi fisik 100%
- 6) Sosialisasi Dasar-Dasar Kepariwisata Maksud dan tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada generasi muda untuk yang terjun ke masyarakat ataupun yang bergerak dibidang kepariwisataan ataupun yang melanjutkan ke perguruan tinggi sebagai dasar dalam dunia usaha Pariwisata. Target peserta 90 orang, Pagu kegiatan Rp.20.649.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.649.700,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%.
- 7) Perjalanan Peningkatan Kapabilitas Asosiasi dalam Rangka Festival Pesona Borneo Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melihat tingkat kemajuan terhadap usaha-usaha Pariwisata, memberikan informasi sesuai dengan ketentuan pemerintah sebagai dasar untuk mengambil kebijakan/langkah untuk tahun berikutnya. Target yaitu pelaksanaan sesuai dengan standar usaha pariwisata. Pagu kegiatan Rp.1.800.000,00 dan terealisasi Rp.1.800.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%
- 8) Rapat-Rapat Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk Diskusi pelaksanaan Permenpar Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, Diskusi hasil monitoring kemitraan pariwisata pada pelaku/pengusaha pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, Diskusi Izn Usaha Pramuwisata dan Uji Kompetensi/ Sertifikat Profesi, Diskusi Izin Usaha Jasa Juru Masak Kelotok (TCA) dan Uji Kompetensi/Sertifikasi Profesi. Rapat kedua. Diskusi pelaksanaan Permenpar Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Pagu kegiatan Rp.3.640.000,00 dan terealisasi Rp.3.640.000,00 atau 99,88% dengan realisasi fisik 100%.
- 9) Monitoring Kemitraan Pariwisata Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui system penerapan, pembinaan dan pengawasan TDUP yang ada di Provinsi Yogyakarta. Target yaitu dan Ekosistem. Berlokasi di 6 Kecamatan Pagu dana Rp.33.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.33.250.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Perjalanan Penerapan TDUP ke Provinsi Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memadukan pelaksanaan pelayanan perijinan secara elektronik di sektor pariwisata se Kalimantan Tengah melalui lembaga OSS dan penyampaian laporan TDUP, tahap 2 Pencabutan Peraturan daerah No. 1 tahun 2015 tentang TDUP terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri No. 10 tahun 2018 tentang pelayanan perijinan berusaha terintegrasi



secara elektronik sektor pariwisata, terkait penerapan uji kompetensi pemandu wisata, tenaga kerja pariwisata dan juru masak kelotok wisata, permohonan untuk sosialisasi pelaksanaan TDUP secara online oleh kemenpar melalui Usulan Disbudpar Provinsi, terkait dengan kesiapan narasumber pelatihan. Pagu kegiatan Rp.13.110.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.307.800,00 atau 86,25% , sisa dana Rp. 1.802.200; dengan realisasi fisik 100%.

d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

- 1) Kegiatan Festival Religi, Maksud dan tujuan kegiatan adalah mengakomodir dan memfasilitasi event yang diselenggarakan oleh komunitas dalam hal ini event keagamaan yang didukung dengan bazar untuk sub sektor kuliner, dan kerajinan di Kecamatan Kotawaringin lama. Serta terfasilitasinya pelaksanaan Haul Kyai Gede sebagai wisata religi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pagu kegiatan Rp. 99.649.000,00 dan terealisasi Rp. 99.649.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%
- 2) Kegiatan Pagelaran Seni Nusantara, Maksud dan tujuan kegiatan adalah memfasilitasi sub sektor Seni Pertunjukan dari sanggar, komunitas seni dan paguyuban yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menjalin persatuan di masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Pagu kegiatan Rp. 99.693.000,00 dan terealisasi Rp. 99.693.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%.
- 3) Kegiatan Festival Kobar Kreatif, Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memfasilitasi kreativitas dan karya sub sektor – sub sektor potensial di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 8 (delapan) jenis lomba yaitu kuliner, seni rupa, seni pertunjukan, musik, fotografi, film, fashion dan kerajinan. Pagu kegiatan Rp. 197.445.000,00 dan terealisasi Rp. 197.445.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%
- 4) Kegiatan Pameran Kuliner Nasional (Food District Yogya Expo Center) Maksud dan tujuan kegiatan adalah memfasilitasi pemenang juara kuliner pada event – event yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat. Pagu kegiatan Rp. 39.468.835,00 dan terealisasi Rp. 38.635.907,00 atau 97,89% dengan realisasi fisik 100%.
- 5) Penyelenggaraan Parade Merah Putih, Maksud dan tujuan kegiatan adalah memeriahkan HUT Kemerdekaan RI dengan kegiatan dan lomba-lomba bernuansa kearifan lokal. Target yaitu adanya kostum karya lokal yang dapat dibawa ke level nasional dan internasional, meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Kotawaringin Barat, dan terfasilitasinya pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tokoh veteran, tokoh pemuda, dan tokoh agama pada acara malam keakaraban. Pagu kegiatan Rp. 194.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 193.820.000,00 atau 99,65% dan realisasi fisik 100%.
- 6) Penyelenggaraan Festival Batang Arut Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melestarikan budaya kearifan lokal di aliran Sungai Arut yang pernah menjadi urat



nadi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat, melaksanakan Lomba Kelotok Hias, Getek Belampu, Lomba Dayung Perahu Panjang & Pendek, Lomba Kuliner Khas Batang Arut, Lomba Mancing Tradisional, Lomba Bekesah, dan Tarik Perahu Lakian & Bebinian serta menjadikan Festival Batang sebagai agenda rutin tahunan. Targetnya yaitu jumlah peserta yang mengikuti Lomba pada Event Festival Batang Arut 2019 dan menjadikan sebagai destinasi wisata. Pagu kegiatan Rp.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 199.386.000,00 atau 99,69% dengan realisasi fisik 100%

- 7) Penyelenggaraan Kegiatan Pentas Hiburan Rakyat Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kunjungan wisata domestik ke kota Pangkalan Bun. Pagu kegiatan Rp. 405.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 396.020.600,00 atau 99,36% dengan realisasi fisik 100%
- 8) Penyelenggaraan Festival Mehampar Wadai Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melestarikan berbagai jenis kue tradisional di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sekaligus memfasilitasi kegiatan yang digagas oleh komunitas Juriat Perempuan Adat. Pagu kegiatan Rp.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.418.000,00 atau 97,42% dari realisasi fisik 100%.
- 9) Penyelenggaraan Marunting Fashion Carnival Maksud dan tujuan kegiatan adalah mewadahi talenta-talenta fashion di Kabupaten Kotawaringin Barat, menjadikan Marunting Fashion Carnival sebagai atraksi rutin tahunan dan mengakomodir kreativitas pelajar dan masyarakat khususnya dengan memberi ruang mengikuti carnival fashion. Target sebesar 100% (jumlah peserta 50 kostum) dengan pagu dana Rp. 184.593.150,00 dan terealisasi Rp. 183.656.000,00 atau 99,49% serta realisasi fisik 100%.
- 10) Kegiatan Workshop Kotawaringin Barat Fashion Carnival Lanjutan. Maksud dan tujuan kegiatan adalah memberikan pelatihan cara merancang, membuat, dan memperagakan sendiri kostum atau busana untuk diperagakan dalam sebuah karnaval, mewadahi talenta – talenta fashion di Kabupaten Kotawaringin Barat, memberi ruang berkreasi kepada talenta-talenta fashion di Kabupaten Kotawaringin Barat yang pada akhirnya diharapkan mampu merancang sendiri busana kreasi mereka, dan mempersiapkan peserta Workshop Fashion Carnival untuk ikut serta berpartisipasi. Target 100% dari target peserta sebanyak 50 orang. Pagu kegiatan sebesar Rp. 88.287.500,00 dan terealisasi Rp. 86.756.000,00 atau 98,27% dengan realisasi fisik 100%
- 11) Kegiatan Pelatihan Packaging Produk Kuliner Pendukung Pariwisata Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memberikan pelatihan mengenai kemasan produk kuliner yang menarik, kreatif dan inovatif sebagai oleh – oleh khas di Kabupaten Kotawaringin Barat guna mendukung pariwisata. Target 100% dari target peserta yaitu 40 orang. Pagu kegiatan Rp. 43.595.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.210.000,00 atau 99,12% dengan realisasi fisik 100%.



- 12) Pemetaan Potensi Ekonomi Kreatif Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk mendata sub sektor – sub sektor ekonomi kreatif, mengetahui sub sektor potensial yang dapat dikembangkan, dan database pelaku ekonomi kreatif, Target 3 (tiga) sub sektor yaitu kuliner, seni pertunjukan dan kriya (kerajinan). Pagu kegiatan Rp. 9.000.000,00 dan terealisasi Rp. 8.400.000,00 atau 93,33% dengan realisasi fisik 100%
- 13) Bahan Pembinaan Aktifitas Kreatif di Kampung Pelangi Maksud dan tujuan kegiatan adalah mendukung aktifitas kreatif di Kampung Pelangi dengan mendukung sub sektor kuliner, seni pertunjukan dan membuat Pagu kegiatan Rp. 7.717.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.717.500,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%.
- 14) Workshop Pagelaran Seni Modern di Kab. Kotawaringin Barat Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memberikan wawasan mengenai pelaksanaan pertunjukan seni tari yang modern untuk meningkatkan peserta remaja untuk mencintai seni tari dan ikut serta melestarikan seni tari tradisional yang dikemas secara modern. Target 100% dari 40 orang target peserta. Pagu kegiatan Rp. 66.832.500,00 dan terealisasi Rp. 66.832.500,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%.
- 15) Pengadaan belanja hardisk 1 tera dalam rangka fasilitasi kegiatan pelaku ekonomi kreatif Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memfasilitasi aktivitas pelaku ekonomi kreatif pada setiap event, festival sertakegiatan yang diselenggarakan pemerintah Daerah serta Dinas Pariwisata. Target 100% dari target 1 (satu) buah hardisk. Pagu kegiatan Rp.1.500.000,00 dan terealisasi Rp.1.500.000,00 atau 100% dengan realisasi fisik 100%
- 16) Studi Tiru pada Festival Cerita Rakyat Yogyakarta Internasional Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk meniru festival yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta guna melaksanakan event – event terkait kearifan lokal semisal Festival Batang Arut, dan Mehampar Wadai. Pagu kegiatan Rp. 22.347.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.129.440,00 atau 94,55% dengan realisasi fisik 100%
- 17) Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Wisata Kuliner dan Belanja di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan yang berasal dari Dana DAK Non Fisik Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Tahun 2019. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan ragam kuliner khas di 6 (enam) kecamatan serta pusat-pusat belanja jajanan khas atau oleh-oleh untuk khas pada 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pagu kegiatan Rp. 146.004.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 139.730.000,00 atau 95,70% dengan realisasi fisik 100%

Tabel 2.93
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata

Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Peningkatan Pariwisata Daerah	1. Meningkatnya Nilai Kearifan Lokal	Persentase destinasi wisata khas lokal	75%
	2. Meningkatnya Produk Lokal Destinasi Wisata	Persentase jenis produk kepariwisataan khas lokal	20%
	3. Meningkatnya Citra Pariwisata	Persentase kunjungan wisman dan wisnus	20%
	4. Meningkatnya Layanan Kepariwisataan	Persentase kelembagaan/industri dan SDM pariwisata	10%

Sumber : LKPJ 2019

2.5.5. Urusan Industri

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah:

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk mengembangkan Industri kecil Menengah. Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan di dalamnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.759.940.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.723.439.900,00 atau 95,20% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

b. Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan industri potensial. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran keseluruhan Rp.19.365.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.980.000,00 atau 98,01% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Program Perlindungan HKI dan Standarisasi Industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk IKM. Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan dengan pagu anggaran Rp.122.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.110.809.600,00 atau 90,26% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Tabel 2.94
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindagkop UKM Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target/ Capaian	Indikator Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja Utama/ Indikator Renstra	
			Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer Dan Sekunder Unggulan	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM
1.	2017	Target	5,50%		8%	6%
		Capaian	5,23%		8%	6%
		Status Capaian	Tidak Tercapai		Tercapai	Tercapai
2.	2018	Target	5,80%		10%	8%
		Capaian	9,01 %		7%	32,82%



No	Tahun	Target/ Capaian	Indikator Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja Utama/ Indikator Renstra	
			Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer Dan Sekunder Unggulan	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM
		Status Capaian	Tercapai		Tidak mencapai target	Tercapai
3.	2019	Target	5,90%		12%	10%
		Capaian	6,81%		5,49%	35,35%
		Status Capaian	Tercapai		Tidak mencapai target	Tercapai (melebihi target)

Sumber : Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019

2.5.6. Urusan Perdagangan DISPERINDAGKOP UKM

Alokasi anggaran Belanja Langsung (BL) urusan Perdagangan khususnya Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 sebesar Rp. 8.033.491.600,00 dengan realisasi mencapai Rp. 7.647.857.616,00 atau 95,20%, realisasi fisik sebesar 100 %. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin barat tahun 2019 adalah:

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan standardisasi, tertib ukur dan perlindungan konsumen. Program ini memiliki 6 (Enam) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 116.385.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 114.067.400,00 atau 98,01% dan realisasi fisik sebesar 100%.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan Pemasaran Produk Ekspor Daerah. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran keseluruhan Rp. 152.855.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 146.668.600,00 atau 95,95%, realisasi fisik sebesar 100%.

c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Perdagangan dalam Negeri. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 232.380.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 228.037.000,00 atau 98,13%, realisasi fisik sebesar 100%.

d. Program Stabilitas Harga Komoditas Perdagangan

Program ini bertujuan untuk memonitor Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu. Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 62.805.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 59.654.700,00 atau 94,98%, realisasi fisik sebesar 100%.



e. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Program ini bertujuan agar tercapainya program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran Rp.65.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.64.993.000,00 atau 99,98 %, realisasi fisik sebesar 100%

f. Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Pasar Rakyat. Program ini memiliki 5 kegiatan didalamnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.404.066.600,00 dan terealisasi Rp.7.034.449.216,00 atau 95,01%, realisasi fisik sebesar 100%.

2.5.7. Urusan Ketransmigrasian

DISNAKERTRANS

a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- 1) Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi ini bertujuan untuk calon lokasi transmigrasi baru. Penyediaan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi baru, Penyusunan Rencana satuan kawasan pengembangan transmigrasi. Pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 tidak ada kegiatan mendatangkan warga transmigran di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 hanya Kajian Studi Rencana Kawasan Transmigrasi untuk calon lokasi transmigrasi yang baru di Kabupaten Kotawaringin Barat. Alokasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 360.050.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 358.056.305,00 atau sebesar 99,44% dengan target realisasi mencapai 100%

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berikut ini akan dipaparkan mengenai tabel Prioritas Tingkat Nasional dan Provinsi serta Kabupaten pada tahun 2021. Dalam tabel tersebut akan dipaparkan mengenai keterkaitan antara prioritas sasaran yang dilakukan pemerintah ditingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 nasional dan provinsi yang menjadi acuan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menentukan prioritas pembangunan di tahun 2021.



Tabel 2.95
Prioritas Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2021

Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten
Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemerataan Infrastruktur wilayah	Peningkatan nilai investasi terhadap sektor Unggulan
Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan , pesisir dan pantai	
SDM berkualitas dan berdaya saing	Stabilitas ekonomi daerah	Membangun industrial matching antar pelaku industri terhadap pelaku ekonomi sektor unggulan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		
Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan pendapatan masyarakat	Inovasi intensifikasi pos-pos pendapatan asli daerah berbasis teknologi
Lingkungan hidup, ketahanan bencana , dan perubahan iklim		
Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	Peningkatan infrastruktur pendorong industri dan peningkatan pendapatan asli daerah
	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	
	Pengelolaan industri pariwisata	
	Pengelolaan SDA Secara bijaksana yang berkelanjutan	
	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	

2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 2.96
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

	KRITEA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN terbatas;
Urusan Wajib Dasar			
1	<ul style="list-style-type: none"> • APM (%) • APK (%) • APS (%) • Angka Kelulusan • Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru/murid per kelas rata-rata Angka Melek Huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Angka Melanjutkan 	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses dan mutu layanan setiap jenjang pendidikan belum menyeluruh kepada semua masyarakat secara maksimal 2. Masih terdapat siswa yang putus di sekolah karena terkendala faktor ekonomi 3. Jumlah Sertifikasi pendidik bagi guru masih rendah 4. Jumlah tenaga pendidik yang berstatus PNS di beberapa masih rendah
	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio posyandu per satuan balita • Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000penduduk • Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk • Rasio dokter per satuan penduduk • Rasio tenaga kefarmasian per 100.000penduduk • Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk • Jumlah Rumah Sakit • Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling • Jumlah Tenaga Medis • Rasio tenaga medis per 1000 penduduk • Rasio tenaga keperawatan per 100.000 Penduduk • Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk • Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani • Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan • Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) • Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan • Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD • Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin • Cakupan kunjungan bayi • Cakupan puskesmas 	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Jumlah Desa Siaga yang aktif masih kurang 6. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil masih belum optimal 7. Belum meratanya akses dan mutu pelayanan kesehatan 8. Belum terstandarisasinya pola rujukan ibu hamil resiko tinggi 9. Pelayanan kesehatan untuk balita belum optimal 10. Jumlah Tenaga kesehatan spesialis khusus untuk beberapa jenis penyakit belum tersedia 11. Prioritas peningkatan kesehatan bagi ibu dan anak masih rendah



	KRITEA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN terbatas;
	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pembantu puskesmas • Prevelensi HIV/AIDS dari total populasi (%) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik • Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk • Rasio Jaringan Irigasi • Rasio tempat ibadah per satuan penduduk • Persentase rumah tinggal bersanitasi • Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk • Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk • Rasio rumah layak huni • Rasio permukiman layak huni • Panjang jalan dilalui Roda 4 • Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) • Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) • Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat • Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik • Lingkungan Pemukiman • Pembangunan embung dan cek dam • Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai • Rumah tangga pengguna air bersih • Rumah tangga ber-Sanitasi • Penduduk berakses air minum • Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB • Luas RTH publik sebesar 20% dari luas kawasan kota/kawasan perkotaan • Ketaatan terhadap RTRW 	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 12. Terbatasnya dana pemerintah khususnya dana APBD Kabupaten terhadap pengalokasian pendanaan bagi peningkatan kualitas infrastruktur daerah 13. Pemanfaatan infrastruktur irigasi, 14. kelompok tani dan pengelolaan lahan pertanian sehingga belum optimal 15. Cakupan layanan akses air minum layak di beberapa kecamatan masih rendah 16. Masih terbatasnya informasi tata ruang 17. rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang.
	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Rumah layak huni • Rasio permukiman layak huni • Cakupan ketersediaan rumah layak huni • Lingkungan pemukiman kumuh (%) • Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 18. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terhadap lahan untuk perumahan 19. Rasio perumahan tidak layak huni di beberapa kecamatan masih tinggi 20. Terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah



	KRITIA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN terbatas;
	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) • Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk • Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk • Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan • Penegakan PERDA • Cakupan patroli petugas Satpol PP • Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten • Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten • Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) • Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP • Kegiatan pembinaan politik daerah 	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 21. Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai; 22. Kurang terkoordinir dalam hal penyamaan persepsi untuk meningkatkan kualitas kinerja Satpol PP dan Damkar; 23. Satpol PP dan Damkar kurang maksimal untuk dilibatkan dalam hal peningkatan PAD; Masyarakat masih belum semuanya sadar akan hukum dan perda; 24. masih ada oknum aparat yang membekingi para pelaku penjual minuman keras; 25. Minimnya kendaraan operasional Satpol PP dan Damkar dalam hal penertiban pelanggaran perda dan perkara; 26. Kekurangan SDM PPNS untuk memproses pelanggaran perda dan perkara
	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi • PMKS yg memperoleh bantuan sosial • Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 27. Belum dimilikinya panti-panti sosial oleh pemerintah daerah serta belum memadainya sarana dan prasarana Panti Sosial milik masyarakat; 28. Belum optimalnya pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial yaitu SDM kesejahteraan sosial dan Pilar Partisipasi Masyarakat dalam penanganan PMKS 29. Masih Kurangnya SDM tenaga ahli untuk penanganan PMKS 30. Penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam yang bersifat pra bencana, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana/rehabilitatif masih belum optimal diantaranya peralatan evakuasi dan distribusi saat tanggap darurat baik di darat maupun perairan; 31. Minimnya data jumlah PMKS



	KRITEA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN terbatas;
Urusan Wajib Non Dasar			
	<ul style="list-style-type: none"> • Angka partisipasi angkatan kerja • Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun • Tingkat partisipasi angkatan kerja • Pencari kerja yang ditempatkan • Tingkat pengangguran terbuka (%) • Keselamatan dan perlindungan • Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah 	Tenaga Kerja	32. Kurangnya perhatian maupun respon dari pengusaha terhadap masalah atau persoalan ketenagakerjaan 33. Masih ada pelanggaran dari perusahaan dalam pelaksanaan untuk menerapkan UMK/UMSK 34. Masih ada perusahaan yang belum wajib lapor tentang informasi lowongan kerja
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah • Partisipasi perempuan di lembaga swasta • Rasio KDRT • Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur • Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) • Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) • Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35. Masih terdapat laporan terkait KDRT 36. Angka partisipasi perempuan di lembaga masih belum sesuai target 37. Program pembangunan dan pemberdayaan bersifat gender belum optimal
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pangan utama 	Pangan	38. Tingkat ketergantungan pasokan pangan utama terhadap daerah lain masih tinggi 39. Pelaksanaan program cadangan pangan belum optimal
	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan bersertifikat • Penyelesaian kasus tanah Negara • Penyelesaian izin lokasi 	Pertanahan	40. belum tersusunnya data pertanahan terkait perumahan dan kawasan permukiman 41. Masih banyak sengketa pertanahan yang terjadi di kawasan perumahan dan permukiman. 42. Masih terdapat kendala yang bersifat kepentingan pihak tertentu dalam penanganan kasus penyelesaian tanah negara
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penanganan sampah • Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R • Cakupan area pelayanan sampah • Persentase Luas pemukiman yang tertata • Pencemaran status mutu air cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air • Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. • Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk • Penegakan hukum lingkungan 	Lingkungan Hidup	43. Rasio penduduk dengan sarana dan prasarana persampahan belum sesuai 44. Penegakan aturan bagi pelanggar dan pelaku pengrusakan lingkungan masih rendah 45. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait lingkungan



	KRITEA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN terbatas;
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran indeks kualitas air • Pengukuran indeks kualitas udara • Pengukuran indeks kualitas tutupan lahan 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk • Rasio bayi berakte kelahiran • Rasio pasangan berakte nikah • Kepemilikan KTP (%) • Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk • Ketersediaan database kependudukan • Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>46. Belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan</p> <p>47. kendala permintaan pencetakan blanko KTP-el</p> <p>48. sarana dan prasaran pelayanan belum sesuai dengan banyaknya permintaan layanan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) • Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK • Jumlah LSM • LPM Berprestasi • PKK aktif • Posyandu aktif • Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat • Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	<p>49. Masih kurangnya SDM untuk membantu kelancaran jalayannya program pemberdayaan</p> <p>50. Jarak antar desa yang jauh menjadi faktor hambatan program pemberdayaan</p> <p>51. pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa yang cepat berubah mengikuti perkembangan menyulitkan sosialisasi dalam waktu cepat.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan penduduk Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>52. Rasio akseptor KB masih rendah</p> <p>53. Rata-rata jumlah anak per keluarga belum sesuai dengan program pemerintah pusat (seharusnya 2)</p> <p>54. Cakupan peserta KB aktif masih belum optimal</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu 	Perhubungan	<p>55. Ketergantungan pendanaan urusan perhubungan dengan pendanaan pusat masih sangat tinggi</p> <p>56. Pengujian kendaraan khususnya bus masih belum menyeluruh</p>



	KRITEA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN terbatas;
	<ul style="list-style-type: none"> I Jumlah jaringan komunikasi I Jumlah surat kabar nasional/lokal I Jumlah penyiaran radio/TV lokal I Jumlah penyiaran TV lokal I Web site milik pemerintah daerah 	Komunikasi dan Informatika	57. data pemerintahan belum menggunakan data center
	<ul style="list-style-type: none"> I Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) I Jumlah UKM non BPR/LKM UKM I Jumlah BPR/LKM I Usaha Mikro dan Kecil 	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	58. Masih banyak koperasi yang belum melaksanakan RAT 59. Masih kurangnya Pemahaman pengurus koperasi terhadap perkoperasian masih 60. Peningkatan jumlah wirausaha baru untuk usaha mikro dan kecil masih rendah 61. Masih terdapat koperasi yang belum teregistrasi
	<ul style="list-style-type: none"> I Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) I Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) I Rasio daya serap tenaga kerja I Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 	Penanaman Modal	62. Belum optimalnya Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 63. Belum maksimalnya pelayanan izin usaha
	<ul style="list-style-type: none"> I Jumlah klub olahraga I Jumlah gedung olahraga I Prosentase peningkatan peraih prestasi pemuda I Prosentase organisasi pemuda yang aktif I Cakupan pembinaan olahraga I Jumlah atlet berprestasi 	Kepemudaan dan Olahraga	64. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan 65. Masih rendahnya pembinaan kepemudaan dan terbatasnya anggaran untuk kegiatan kepemudaan 66. Standard Sarana dan prasarana olahraga masih belum mendukung 67. Kegiatan / event kompetisi masih kurang
	<ul style="list-style-type: none"> I Buku Kabupaten Dalam Angka I Buku PDRB 	Statistik	68. data yang tersedia merupakan data kondisi tahun sebelumnya sehingga data-data yang diperlukan masih merupakan data proyeksi yang tingkat keakuratannya masih diragukan
	<ul style="list-style-type: none"> I Penyelenggaraan festival seni dan budaya I Sarana penyelenggaraan seni dan budaya I Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 	Kebudayaan	69. masih kurangnya pengembangan dan perlindungan kebudayaan lokal 70. belum adanya program promosi budaya pada jangkauan yang lebih luas 71. Masih terbatasnya SDM untuk dapat mengembangkan budaya lokal
	<ul style="list-style-type: none"> I Jumlah perpustakaan I Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun 	Perpustakaan	72. Sarana dan prasarana perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum memenuhi standar nasional.



	KRITEA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN terbatas;
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah		73. Pemahaman masyarakat terhadap fungsi perpustakaan masih rendah. 74. koleksi bahan pustaka masih terbatas 75. Kurangnya tenaga pengelola perpustakaan daerah, perpustakaan desa/kelurahan, sekolah dan TBM. 76. Perpustakaan belum tersedia hingga level kecamatan dan desa/kelurahan.
	Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tersimpannya arsip inaktif dan statis	Kearsipan	77. Masih Kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip. 78. Kurangnya komitmen dan dukungan pemangku kepentingan pengelola arsip SKPD, desa/kelurahan untuk menyerahkan arsip ke LKD. 79. Sebagian besar SKPD belum memiliki tenaga arsiparis atau tenaga teknis pengelola kearsipan.
80. Urusan Pilihan			
	Kunjungan wisata Domestik Kunjungan wisata Mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Lama kunjungan wisata	Pariwisata	81. Belum terciptanya sinergi program antar SKPD yang mendukung peningkatan kunjungan wisata 82. Masih terbatasnya infrastruktur dan daya dukung pariwisata 83. Masih minimnya pengembangan objek wisata baru 84. Masih minimnya SDM dibidang kepariwisataan dalam hal promosi kepariwisataan 85. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam memajukan pariwisata
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani	Pertanian	86. Petani tanaman pangan masih mengandalkan membakar lahan untuk membuka/membersihkan lahan untuk bertani/berladang 87. Program bantuan alat pertanian belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan persepsi harga penggunaan masih dirasakan mahal oleh petani 88. Masih terdapat rumah potong hewan diluar dari RPH yang disediakan 89. Pengelolaan secara kelembagaan kelompok tani belum berjalan secara optimal
	Rumah tangga pengguna listrik Rasio ketersediaan daya listrik	Energi dan Sumber Daya Mineral	90. Jangkauan pemenuhan kebutuhan aliran listrik bagi masyarakat belum menjangkau seluruh desa



	KRITEA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN terbatas;
	I Persentase pertambangan tanpa ijin		91. Masih banyak terdapat tambang yang belum memiliki ijin 92.
	1. Ekspor bersih perdagangan 2. Cakupan bina kelompok pedagang	Perdagangan	93. Masih terdapat pelanggaran dalam pengukuran alat ukur timbang pelaku usaha 94. Masih minimnya sarana dan prasarana kemetrolagian
	I Cakupan bina kelompok pengrajin	Perindustrian	95. Terbatasnya akses permodalan industri 96. Masih minimnya ppengusaha IKM yang berjualan secara online 97. Masih terbatasnya SDM dalam mengembangkan IKM khususnya terkait pemasaran produk
	I Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, & TU)	Kelautan dan Perikanan	98. Masih kurang optimalnya minat masyarakat untuk budidaya perikanan
99.			
	I Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA I Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA I Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA I Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Perencanaan Pembangunan	100. Ketersediaan data yang kurang lengkap dan kurang valid yang menghambat penyusunan dokumen perencanaan 101. Masih Kurang optimalnya proses perencanaan, pengendalian, monitoring serta evaluasi
	I Opini BPK terhadap laporan keuangan I Penetapan APBD I Perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung	Keuangan	102. Inventarisasi Aset daerah belum akurat 103. Masih kurangnya SDM untuk pengelolaan asset daerah
	I Jumlah jabatan tinggi pada instansi pemerintah I Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal I Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	104. Masih banyaknya kasus tindakan indisipliner para ASN
	I Presentase implementasi rencana kelitbangan I Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan I Penerapan SIDA	Penelitian dan Pengembangan	105. Masih rendahnya kemampuan SDM perencanaan dan penelitian dalam analisis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; 106. Masih rendahnya pemanfaatan hasil kajian dokumen perencanaan dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah
	I Persentase tindak lanjut temuan I Presentase pelanggaran pegawai	Pengawasan	107. Kemampuan dan ketrampilan aparatur pengawasan masih kurang dan dan belum merata. 108. Sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan



	KRITEA/ASPEK	URUSAN	PERMASALAHAN terbatas;
			belum memadai 109. Kurangnya komitmen entitas terperiksa melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan; Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada objek pemeriksaan dalam satu tahun belum bisa menjangkau secara keseluruhan objek pemeriksaan
	I Tersediannya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	Sekretariat Dewan	110. Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD yang kurang sigap dalam mengantisipasi perubahan-perubahan program dan kegiatan sehingga pada akhir tahun menjadi tergesa-gesa dan tidak mencapai target dan sasaran.





**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**



Bab 3

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2021

3.1 . Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam hal ini dapat dicermati dengan melihat respon dari perkembangan indikator-indikator perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat baik secara *existing* maupun melihat dari dinamika perubahan-perubahan indikator perekonomian dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara lebih detail, dinamika atau perkembangan indikator-indikator perekonomian yang selanjutnya akan menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dapat dijelaskan dalam beberapa informasi analisis indikator perekonomian seperti dijelaskan dalam beberapa Sub Bab di bawah ini.

3.1.1. Kinerja Perekonomian Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dinamika Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kotawaringin Barat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 cukup dinamis. Meski pada saat yang bersamaan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat Nasional maupun ditingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) serta di tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 mencapai 5,79% atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 6,46%.

Tabel 3.1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2013-2021 (Persen)

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Provinsi Kalimantan Tengah	7,37	6,21	7,01	6,35	6,72	5,64	6,16	2,95 (TW.1-2020)	-
Indonesia	5,78	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	2,97 (TW.1-2020)	-
Kabupaten Kotawaringin Barat	7,00	6,90	7,30	5,85	6,89	6,46	5,79	6,67 (RKPD 2020)	6,90

Sumber: BPS Kotawaringin Barat (2020)

Keterangan: *) Angka Proyeksi



Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam **Tabel 3.1** di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah mulai melambat sejak tahun 2016. Kondisi yang sama juga terlihat pada kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat. Artinya pada satu sisi ada kemiripan pola pertumbuhan ekonomi ditingkat Provinsi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Meski pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat melambat, namun pada saat yang bersamaan LPE Nasional meningkat lebih tinggi tahun 2016 (5,03%) dibandingkan tahun sebelumnya (2014-2015). Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik sektor-sektor ekonomi (lapangan usaha) yang menopang perekonomian nasional dengan sektor-sektor ekonomi yang menopang perekonomian regional Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat terjadi sejak tahun 2016, terutama sejak memasuki masa-masa penurunan harga komoditas global hasil perkebunan dan hasil pertambangan.

Memasuki tahun 2017 hingga 2018 tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat kembali ke *track* di atas 6%. Meski berfluktuasi, namun LPE di atas 6% dapat dipertahankan hingga tahun 2018. Tahun 2019 LPE Kabupaten Kotawaringin Barat kembali berada di bawah *level* 6% yakni sebesar 5,79%. Dalam RKPD 2020 perkiraan LPE Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 6,67%. Namun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional, regional serta lokal, maka pencapaian LPE 2020 sebesar 6,67% diperkirakan sulit untuk tercapai. Beberapa pertimbangan yang mendasari kemungkinan tidak tercapainya target LPE tahun 2020 sebesar 6,67% adalah:

- (1) Bahwa perlambatan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 hanya mencapai 5,79%. Sehingga untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan RKPD tahun 2020 sebesar 6,67% akan jauh lebih sulit.
- (2) Pada saat yang bersamaan, perekonomian global, nasional dan lokal juga terkoreksi tajam akibat dampak dari pandemik covid 19 yang melanda perekonomian Indonesia umumnya, maupun perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah bahwa LPE Provinsi Kalimantan Tengah di Triwulan I tahun 2020 hanya mencapai 2,95%. Pencapaian LPE Provinsi Kalteng di *level* 2, 95% bahkan berada dibawah LPE Nasional (2,97%) pada periode yang sama. Meski belum ada publikasi LPE Kabupaten Kotawaringin Barat di Triwulan I tahun 2020, namun jika melihat pencapaian LPE Nasional maupun LPE Provinsi Kalteng, maka diperkirakan kondisinya tidak akan jauh banyak berbeda, yakni mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pandemik Covid 19 dalam hal ini diperkirakan berdampak ke seluruh lapangan usaha (sektor) ekonomi dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun demikian skala dampak ekonomi dari pandemik covid 19 akan berbeda antara satu lapangan usaha dengan lapangan usaha lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk memutus mata rantai pandemik covid 19 diberlakukan berbagai kebijakan, yakni mulai dari *social*

distancing, Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB), *work from home* (WFH), *lockdown* terbatas yang pada akhirnya bertujuan untuk membatasi aktivitas maupun mobilitas sosial masyarakat. Sejalan dengan berkurangnya mobilitas dan aktivitas masyarakat, maka aktivitas produksi dan distribusi serta transaksi di pasar secara otomatis akan berkurang. Apalagi terkait unit usaha yang mengandalkan transaksi secara *offline* dalam aktivitas usahanya. Pada saat yang bersamaan, lalu lintas transportasi baik udara, laut dan darat juga diatur secara ketat dalam kerangka membatasi mobilitas masyarakat agar penyebaran pandemik covid 19 dapat diturunkan. Akibat respon berbagai kebijakan di atas terkait dengan upaya pemutusan mata rantai penyebaran covid 19, maka aktivitas-aktivitas ekonomi pada akhirnya juga akan terdampak.

- (3) Kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 diperkirakan akan kembali ke *track* normal seperti sebelum adanya dampak pandemik Covid 19 di sepanjang tahun 2020. Meski kembali ke *track* normal, namun LPE Kabupaten Kotawaringin Barat diperkirakan masih belum akan mencapai atau melampaui pencapaian LPE tahun 2019 (5,79%). Disisi lain diperkirakan target LPE tahun 2020 (sebagaimana termuat pada RPJMD 2017-2022 bahwa pada RKPD 2020 LPE ditargetkan sebesar 7,69%) sulit untuk tercapai. Meski belum ada publikasi nilai PDRB dan LPE Kabupaten Kotawaringin Barat Triwulan 1 Tahun 2020, namun data perlambatan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah di Triwulan I Tahun 2020 dapat dijadikan *benchmarking* atau parameter perbandingan dalam mencermati kondisi perekonomian sebagian besar kawasan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi **Tabel 3.2** menunjukkan pencapaian LPE Provinsi Kalimantan Tengah di Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret 2020). Dari informasi Tabel 3.2 terlihat bahwa LPE Provinsi Kalteng Triwulan I Tahun 2020 hanya mencapai 2,95% (*year on year*) atau membandingkan PDRB di Triwulan I Tahun 2019 dengan PDRB di Triwulan I Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 2,95% ada dibawah target dan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya pandemik Covid 19. Secara triwulan atau quarter to quarter dengan membandikan PDRB Triwulan IV tahun 2019 dengan PDRB Triwulan I Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalteng juga mengalami penurunan drastis atau mengalami kontraksi. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalteng di Triwulan I tahun 2020 secara *quarter to quarter* (Q to Q) bahkan mengalami pertumbuhan negatif (- 0,89%). Kondisi tersebut dalam hal ini secara implisit juga dapat menjadi pertimbangan dalam menganalisa kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat di awal tahun 2020 (meski belum ada publikasi BPS), mengingat karakteristik sektor-sektor ekonomi (distribusi lapangan usaha) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat tidak banyak jauh berbeda.

Tabel 3.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret 2020)

NO	LAPANGAN USAHA	Nilai PDRB Triwulan IV Tahun 2019	Nilai PDRB Triwulan I Tahun 2020	LPE Provinsi Kalteng (Q to Q)	LPE Provinsi Kalteng (Y on Y)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.402,6	5.170,4	-4.30	1.16
B	Pertambangan dan Penggalian	3.866,7	4.819,8	24.65	13.04
C	Industri Pengolahan	4.034,6	3.665,3	-9.15	0.75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22,6	24,4	7.96	17.5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,6	20,7	0.49	7.85
F	Konstruksi	2.217,2	1.882,3	-15.10	-10.39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.026,7	3.036,2	0.31	3.31
H	Transportasi dan Pergudangan	1.666,9	1.607,7	-3.55	1.36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	434,3	430,8	-0.81	3.41
J	Informasi dan Komunikasi	307,5	299,4	-2.63	0.03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	823,8	847,2	2.84	9.85
L	Real Estate	504,9	490,8	-2.79	2.58
M,N	Jasa Perusahaan	9,6	8,9	-7.29	-2.32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.558,0	1.359,0	-12.77	2.17
P	Jasa Pendidikan	1.101,3	1.110,8	0.86	3.3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	438,2	449,2	2.51	4.58
R,S,T,U	Jasa lainnya	247,4	230,4	-6.87	-2.46
PDRB		25.682,9	25.453,3	-0,89	2,95

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat (2020)

Memperhatikan beberapa kondisi dan kecenderungan di atas, dalam RKPD tahun 2021 diperkirakan kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat akan mengalami perlambatan dibandingkan dengan LPE tahun 2019, namun diperkirakan akan lebih baik dibandingkan kondisi LPE tahun 2020. Adapaun perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 dapat dilihat dari informasi berikut.

Tabel 3.3 Proyeksi Nilai PDRB (Milyar Rp) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Tahun 2020 ¹	PDRB Tahun 2021 ²	PDRB Tahun 2021 ³	LPE Tahun 2020 ⁴	LPE Tahun 2021 ⁵
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.834,24	3.805,89	4.062,55	-0.74	5.95
B	Pertambangan dan Penggalian	149,19	154,81	152,28	3.77	2.07
C	Industri Pengolahan	3.592,61	3.673,27	3.845,11	2.25	7.03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,83	8,13	8,57	3.83	9.45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,77	12,14	12,51	3.14	6.29
F	Konstruksi	1.201,27	124,147	1.286,02	3.35	7.06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.715,48	1.753,84	1.835,61	2.24	7.00
H	Transportasi dan Pergudangan	1.130,66	1.190,72	1.225,68	5.31	8.40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180,46	186,17	194,51	3.16	7.79
J	Informasi dan Komunikasi	142,54	150,32	152,57	5.46	7.04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	652,33	700,40	719,01	7.37	10.22
L	Real Estate	243,35	255,15	261,46	4.85	7.44
M,N	Jasa Perusahaan	5,81	6,15	6,20	5.85	6.71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	397,31	420,55	422,85	5.85	6.43
P	Jasa Pendidikan	331,69	341,66	350,88	3.01	5.79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,50	148,13	151,20	3.95	6.11
R,S,T,U	Jasa lainnya	127,40	129,40	135,97	1.57	6.73
PDRB		13.866.44	14.178,20	14.822,98	2.25	6.90



Sumber: RKPD 2020 (Data Diolah)

Keterangan:

- 1) Nilai Proyeksi PDRB Tahun 2020 Dalam RKPD 2020
- 2) Nilai Proyeksi PDRB Tahun 2021 Berdasarkan Tren PDRB 2010-2020
- 3) Nilai Proyeksi PDRB Tahun 2021 Berdasarkan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB 2010-2020
- 4) LPE Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Proyeksi Trend LPE PDRB 2010-2020
- 5) LPE Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Proyeksi Menggunakan Rata-Rata LPE PDRB 2010-2020

Dari informasi Tabel 3.3 terlihat bahwa proyeksi LPE Kabupaten Kotawaringin Barat 2021 dengan menggunakan dua skenario, yakni: (1) skenario tren PDRB tahun 2010-2020; dan (2) skenario rata-rata pertumbuhan PDRB tahun 2010-2020 menunjukkan adanya perbedaan hasil proyeksi LPE tahun 2021. Dengan memperkirakan adanya asumsi koreksi terhadap LPE tahun 2020 akibat adanya dampak pandemik Covid 19, maka diperkirakan LPE Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 berada di level 6,90%. Perkiraan LPE Kabupaten Kotawaringin Barat di level 6,90% atas dasar proyeksi yang melihat rata-rata pertumbuhan ekonomi 2010-2020 dianggap lebih merefleksikan kondisi natural PDRB dan LPE di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian diasumsikan bahwa dampak ekonomi dari pandemik Covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dapat dituntaskan pada Semester 2 Tahun 2020. Oleh karena itu, meski LPE tahun 2020 diperkirakan akan melambat dibandingkan tahun 2019, namun dampak pemulihan ekonomi akibat pandemik Covid 19 dapat efektif berlangsung di Semester 2 tahun 2020. Oleh karena pemulihan ekonomi berlangsung sejak semester 2 tahun 2020, maka dampak lanjutan pandemik Covid 19 terhadap ekonomi di tahun 2021 dapat diminimalkan.

b. Struktur Lapangan Usaha dalam PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat secara makro ekonomi tidak terlepas dari dinamika perubahan struktur ekonomi masing-masing lapangan usaha dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 (proyeksi RKPD 2020 sebelum memasukan faktor dampak pandemik covid 19 terlihat dari informasi **Tabel 3.4** dan **Tabel 3.5** (Lanjutan) di bawah ini.

Tabel 3.4 Nilai dan Distribusi PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha dan Distribusinya Periode 2010-2020 (Atas Dasar Harga Konstan 2010)

NO	LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB (MILYAR RUPIAH)						DISTRIBUSI PDRB (PERSEN)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.154,56	2.242,69	2.355,55	2.430,13	2.597,57	2.749,88	30.01	29.04	28.59	27.57	27.57	27.19
B	Pertambangan dan Pengalihan	123,99	133,36	140,99	151,11	134,44	135,37	1.73	1.73	1.71	1.71	1.43	1.34
C	Industri Pengolahan	1.822,54	1.940,56	2.061,32	2.217,99	2.393,77	2.556,71	25.39	25.13	25.02	25.16	25.40	25.28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,22	3,55	3,89	4,24	4,70	5,69	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,39	6,59	7,15	7,51	8,22	8,90	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
F	Konstruksi	608,02	646,32	697,80	763,67	815,10	885,90	8.47	8.37	8.47	8.66	8.65	8.76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	872,26	929,53	1.007,96	1.080,90	1.133,84	1.232,14	12.15	12.04	12.23	12.26	12.03	12.18
H	Transportasi dan Pergudangan	507,80	596,91	646,98	737,66	775,72	836,75	7.07	7.73	7.85	8.37	8.23	8.27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85,31	92,37	99,91	107,93	117,61	128,40	1.19	1.20	1.21	1.22	1.25	1.27
J	Informasi dan Komunikasi	72,41	80,63	88,77	94,45	102,19	110,04	1.01	1.04	1.08	1.07	1.08	1.09



NO	LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB (MILYAR RUPIAH)						DISTRIBUSI PDRB (PERSEN)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	252,39	333,47	367,45	404,32	457,54	502,23	3.52	4.32	4.46	4.59	4.86	4.97
L	Real Estate	118,96	130,53	143,25	156,67	170,99	186,01	1.66	1.69	1.74	1.78	1.81	1.84
M,N	Jasa Perusahaan	3,06	3,36	3,67	4,04	4,36	4,67	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	213,91	226,47	242,87	259,91	285,13	314,52	2.98	2.93	2.95	2.95	3.03	3.11
P	Jasa Pendidikan	189,37	200,97	205,62	219,00	234,71	254,88	2.64	2.60	2.50	2.48	2.49	2.52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78,84	84,93	91,31	96,58	103,75	110,86	1.10	1.10	1.11	1.10	1.10	1.10
R,S,T,U	Jasa lainnya	66,47	69,97	74,81	78,97	83,58	90,31	0.93	0.91	0.91	0.90	0.89	0.89
	PDRB	7.179,50	7.722,21	8.239,30	8.815,08	9.423,22	10.113,26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kotawaringin Barat (2020)

Tabel 3.5 Lanjutan Nilai dan Distribusi PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha dan Distribusinya Periode 2010-2020 (Atas Dasar Harga Konstan 2010)

NO	LAPANGAN USAHA	NILAI PDRB (MILYAR RUPIAH)					DISTRIBUSI PDRB (PERSEN)				
		2016	2017	2018	2019	2020 ¹	2016	2017	2018	2019	2020 ¹
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.907,56	3.115,48	3.326,28	3.452,52	3.834,24	27.16	27.25	27.33	26.81	27.65
B	Pertambangan dan Penggalian	143,35	140,55	147,46	159,79	149,19	1.34	1.23	1.21	1.24	1.08
C	Industri Pengolahan	2.690,88	2.941,10	3.162,84	3.336,50	3.592,61	25.14	25.73	25.99	25.91	25.91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,95	6,10	6,55	7,25	7,83	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,34	9,66	10,33	11,30	11,77	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08
F	Konstruksi	934,46	997,48	1.047,51	1.131,87	1.201,27	8.73	8.72	8.61	8.79	8.66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.317,85	1.396,60	1.500,49	1.597,22	1.715,48	12.31	12.22	12.33	12.40	12.37
H	Transportasi dan Pergudangan	887,04	930,84	1.006,00	1.076,69	1.130,66	8.29	8.14	8.27	8.36	8.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	139,76	147,57	156,03	166,73	180,46	1.31	1.29	1.28	1.29	1.30
J	Informasi dan Komunikasi	118,00	123,39	127,04	136,48	142,54	1.10	1.08	1.04	1.06	1.03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	536,08	561,14	573,31	605,53	652,33	5.01	4.91	4.71	4.70	4.70
L	Real Estate	198,15	202,58	215,24	229,44	243,35	1.85	1.77	1.77	1.78	1.75
M,N	Jasa Perusahaan	4,86	5,01	5,26	5,61	5,81	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	331,24	354,88	353,17	382,28	397,31	3.09	3.10	2.90	2.97	2.87
P	Jasa Pendidikan	267,86	276,81	294,94	319,91	331,69	2.50	2.42	2.42	2.48	2.39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,72	120,58	127,78	137,60	142,50	1.08	1.05	1.05	1.07	1.03
R,S,T,U	Jasa lainnya	96,60	102,92	110,95	119,09	127,40	0.90	0.90	0.91	0.92	0.92
	PDRB	10.704,70	11.432,69	12.171,18	12.875,81	13.866,44	100.0	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kotawaringin Barat (2020)

Keterangan:

1) Proyeksi PDRB Dalam RKPD 2020

Nilai PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 sudah mencapai Rp.12,8 Triliun. Nilai tersebut meningkat kurang lebih dari Rp.700 Miliar dibandingkan tahun 2017. Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi atau perubahan nilai total PDRB, maka komposisi struktur lapangan usaha penopang PDRB juga mengalami perubahan-perubahan. Tahun 2010 peran lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam struktur PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat masih sebesar 30% (**Tabel 3.2**). Dalam kurun waktu 8 tahun kemudian, peran lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam struktur PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat berkurang lebih dari 2%. Tahun 2019 peran lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam struktur PDRB tinggal 26%.

Sebagai lapangan usaha dengan peran terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat penurunan tersebut pada satu sisi menunjukkan dinamisnya perkembangan lapangan-lapangan usaha diluar lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun disisi lain, meski terjadi penurunan kontribusi dalam struktur PDRB, ke depan perkembangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan harus terus ditingkatkan secara agregat. Perkembangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sekaligus menjadi penopang



dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena perannya sebagai sumber pertumbuhan (*source of growth*) merupakan paling tinggi dibandingkan lapangan-lapangan usaha yang lain. Upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti mendorong investasi di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; meningkatkan produktivitas usaha (produksi); dan menjamin keberlangsungan seluruh daya dukung sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, sejalan dengan mulai membaiknya harga komoditas hasil pertanian, kehutanan dan perikanan, diharapkan kondisi tersebut akan semakin mengairahkan dinamika aktivitas produksi di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Lapangan usaha lainnya yang juga menopang perkembangan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lapangan usaha industri. Selain berkontribusi besar (peringkat 2) dalam struktur PDRB, perkembangan lapangan usaha industri juga sejalan dengan arah kebijakan tahun 2021 dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022, yakni **penguatan kontribusi sektor pertanian terpadu, industri pengolahan, dan kepariwisataan terhadap pendapatan**. Tahun 2010 kontribusi lapangan usaha industri pengolahan dalam struktur PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat baru mencapai 25,39%. Tahun 2019 untuk indikator yang sama meningkat menjadi 25,91%.

Pengembangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha industri pengolahan harus mendapat perhatian khusus di tahun 2021, pertimbangan tersebut tidak saja karena menjadi amanat dalam arah kebijakan dalam RPJMD namun juga mengingat peran ke 2 lapangan usaha tersebut mencakup lebih separoh (>50%) dalam struktur PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada sisi lain, aktivitas di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dapat disinergikan dengan lapangan usaha industri pengolahan, oleh karena dengan kepemilikan bahan baku yang sangat mumpuni (komoditas primer) perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri pengolahan yang mengolah bahan-bahan baku yang bersumber dari komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan.

Lapangan usaha lainnya yang meningkat kontribusinya dalam struktur PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat dalam beberapa tahun terakhir adalah lapangan usaha lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Selain perannya dalam struktur PDRB meningkat (2017-2018), lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga merupakan kontributor terbesar ke 3 (tiga) dalam struktur PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; lapangan usaha industri pengolahan; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mencakup lebih dari 65% dalam struktur PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selain mengoptimalkan ketiga lapangan usaha di atas, optimalisasi peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah pada tahun 2021 juga diupayakan melalui usaha mendorong peran lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Dengan kepemilikan keanekaragaman hayati serta garis pantai yang relatif luas dengan segala potensi kelautannya, pengembangan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan juga dilakukan melalui pengembangan kepariwisataan. Pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi di lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Pengembangan lapangan usaha akomodasi dan makan minum akan berdampak terhadap pengembangan pendapatan daerah (sebagai tujuan akhir arah kebijakan tahun 2021 sebagaimana amanat RPJMD), khususnya melalui pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame sebagai sumber utama pajak daerah.

Perkembangan ekonomi di tahun 2020 memasuki babak baru yang diperkirakan membawa berbagai perubahan dalam struktur dan pertumbuhan ekonomi dalam PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Efektif sejak awal Maret 2020 perekonomian nasional, regional dan lokal dihadapkan pada tantangan mengatasi dampak pandemik covid 19 terhadap perekonomian. Dampak pandemik covid 19 terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 cukup signifikan dengan memperhatikan adanya dampak dari pembatasan aktivitas masyarakat secara sosial (untuk memutus mataranati penyebaran virus covid 19) pada akhirnya akan berdampak terhadap aktivitas produksi maupun konsumsi.

Sektor-sektor utama penopang PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Peringkat 1), kemudian sektor industri pengolahan (peringkat 2), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (peringkat 3), sektor konstruksi (peringkat 4) dan sektor transportasi dan pergudangan (peringkat 5). Peran ke lima sektor tersebut dalam PDRB Kotawaringin Barat tahun 2019 mencapai 82,75% terhadap total PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun perkembangan distribusi (*share*) masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat serta rata-ratanya selama periode 2010-2021 dapat dilihat dari informasi **Tabel 3.6**. Distribusi PDRB lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun beberapa lapangan usaha mengalami kenaikan *share* atau distribusi perannya terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Beberapa lapangan usaha yang mengalami kenaikan kontribusi dalam PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2021 dibandingkan indikator yang sama tahun 2020 adalah sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan mamin, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor real estate.

**Tabel 3.6 Distribusi dan Rata-Rata Distribusi PDRB
Kabupaten Kotawaringin Barat 2010-2021 (ADHK 2010, Dalam Persen)**

NO	LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ¹	Rata-Rata Distribusi PDRB 2010-2021 (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.01	29.04	28.59	27.57	27.57	27.19	27.16	27.25	27.33	26.81	27.65	27.41	27.80
B	Pertambangan dan Penggalian	1.73	1.73	1.71	1.71	1.43	1.34	1.34	1.23	1.21	1.24	1.08	1.03	1.40
C	Industri Pengolahan	25.39	25.13	25.02	25.16	25.4	25.28	25.14	25.73	25.99	25.91	25.91	25.94	25.50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09
F	Konstruksi	8.47	8.37	8.47	8.66	8.65	8.76	8.73	8.72	8.61	8.79	8.66	8.68	8.63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.15	12.04	12.23	12.26	12.03	12.18	12.31	12.22	12.33	12.4	12.37	12.38	12.24
H	Transportasi dan Pergudangan	7.07	7.73	7.85	8.37	8.23	8.27	8.29	8.14	8.27	8.36	8.15	8.27	8.08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.19	1.20	1.21	1.22	1.25	1.27	1.31	1.29	1.28	1.29	1.30	1.31	1.26
J	Informasi dan Komunikasi	1.01	1.04	1.08	1.07	1.08	1.09	1.10	1.08	1.04	1.06	1.03	1.03	1.06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.52	4.32	4.46	4.59	4.86	4.97	5.01	4.91	4.71	4.70	4.70	4.85	4.63
L	Real Estate	1.66	1.69	1.74	1.78	1.81	1.84	1.85	1.77	1.77	1.78	1.75	1.76	1.77
M, N	Jasa Perusahaan	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.98	2.93	2.95	2.95	3.03	3.11	3.09	3.1	2.9	2.97	2.87	2.85	2.98
P	Jasa Pendidikan	2.64	2.6	2.5	2.48	2.49	2.52	2.5	2.42	2.42	2.48	2.39	2.37	2.48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.1	1.1	1.11	1.1	1.1	1.1	1.08	1.05	1.05	1.07	1.03	1.02	1.08
R, S, T, U	Jasa lainnya	0.93	0.91	0.91	0.9	0.89	0.89	0.9	0.9	0.91	0.92	0.92	0.92	0.91
PDRB		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kotawaringin Barat (2020)

Keterangan: 1) Angka Sementara

Untuk kondisi indikator-indikator perekonomian lainnya, baik indikator makro ekonomi maupun indikator kesejahteraan dapat dilihat dari informasi **Tabel 3.7**. Dari **Tabel 3.7** terlihat perkembangan beberapa indikator makro perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat, baik indikator pencapaian eksisting maupun indikator proyeksi yang diambil dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 diproyeksikan mencapai Rp.14,8 Triliun pada akhir tahun 2021, dimana sejalan dengan peningkatan PDRB tersebut diharapkan mampu meningkatkan PDRB per kapita Kabupaten Kotawaringin Barat hingga mencapai Rp.44,8 Juta/Kapita. Peningkatan PDRB maupun PDRB per kapita serta pertumbuhan ekonomi juga diharapkan mampu menurunkan persentase jumlah penduduk miskin dan persentase tingkat pengangguran pada akhir tahun 2021 masing-masing ke *level* 4% dan 2,61%. Perbaikan indikator-indikator kesejahteraan (tingkat kemiskinan dan



tingkat pengangguran) di tahun 2021 diharapkan sejalan dengan kembali meningkatnya pertumbuhan ekonomi setelah tertekan dampak pandemik covid 19 di semester 1 tahun 2020.

Tabel 3.7 Perkembangan Indikator Makro Perekonomian Terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR EKONOMI	SATUAN	REALISASI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PROYEKSI		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	PDRB Harga Konstan	Milyar Rp	11.432,69	12.171,18	738,49	12,87 5,81	13.866,44	14.822,98
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,89	6,46	(0,43)	5,79	7,69	6,90
3	Tingkat Inflasi ²	Persen	3,18	4,52	1,34	2,70	Per 1,66 (April 20)	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,52	4,27	(0,25)	4,30	4,11	4,00
5	Tingkat Pengangguran ¹	Persen	2,17	2,93	0,76	2,82	2,71	2,61
6	PDRB Per Kapita (AHK 2010)	Rp	38,7	40,0		41,1	43,0	44,8

Sumber: BPS Kotawaringin Barat dan RKPD 2020

Keterangan:

- 1) Tingkat Pengangguran berdasarkan target RPJMD 2017-2022
- 2) Tingkat Inflasi Berdasarkan Tingkat Inflasi Tahun Kalender

c. Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat Dilihat Dari Hasil Penelitian Indikator Sektor Unggulan

Pendekatan ke 1 (Satu) untuk melihat indikator sektor unggulan dalam perekonomian adalah menggunakan pendekatan Analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ merupakan analisis untuk mengetahui sektor basis di suatu wilayah. Analisis ini digunakan untuk menganalisis sektor yang berpotensi untuk diekspor ke luar wilayah sedangkan sektor non basis merupakan sektor yang tidak berpotensi untuk diekspor atau hanya dapat mencukupi kebutuhan wilayahnya sendiri. Hasil penghitungan LQ di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari hasil perhitungan LQ diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) sektor basis (unggulan) di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sektor (**BPS Kabupaten Kotawaringin Barat 2019**):

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan (A);
2. Industri pengolahan (C);
3. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang (E);
4. Kontruksi (F);
5. Perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (G);
6. Transportasi dan pergudangan (H);
7. Jasa keuangan dan asuransi (K);
8. Jasa perusahaan (M, N)

Dari perhitungan LQ juga diketahui terdapat beberapa kategori sektor non basis (LQ < 1), yakni terdapat 9 sektor dengan kategori:

1. Pertambangan dan penggalian (B);
2. Pengadaan listrik dan gas (D);
3. Penyediaan akomodasi dan makan minum (I);
4. Informasi dan komunikasi (J);
5. Real estate (L);



6. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (O);
7. Jasa pendidikan (P);
8. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (Q);
9. Jasa lainnya (R,S,T,U)

Data hasil analisa terkait LQ Kabupaten Kota waringin barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Kotawaringin Barat

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribuan Rupiah)		Nilai LQ	Keterangan
		2013	2018		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2430,13	3366,39	1,32	Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	151,11	147,08	0,08	Non Basis
C	Industri Pengolahan	2218,00	3133,05	1,65	Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,24	6,55	0,65	Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,51	10,39	1,09	Basis
F	Konstruksi	763,67	1055,40	1,03	Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1080,90	1499,48	1,04	Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	737,66	999,18	1,28	Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107,93	156,06	0,75	Non Basis
J	Informasi dan Komunikasi	94,45	127,04	0,86	Non Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	404,32	572,96	1,50	Basis
L	Real Estate	156,67	215,24	0,89	Non Basis
M,N	Jasa Perusahaan	4,04	5,26	1,17	Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	259,91	353,17	0,50	Non Basis
P	Jasa Pendidikan	219,00	294,94	0,56	Non Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96,58	127,78	0,60	Non Basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	78,97	110,95	0,94	Non Basis

Sumber: BPS Kotawaringin Barat, 2019 (diolah)

Sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan nilai LQ tertinggi, artinya sektor Industri pengolahan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sektor yang harus diprioritaskan. Hal ini juga menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat pada sektor jasa keuangan dan asuransi, meskipun sektor ini memberikan kontribusi yang kecil terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sektor tertinggi kedua adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tingginya nilai LQ sektor ini sejalan dengan distribusi tiap sektor terhadap PDRB, sehingga dapat disimpulkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki peran yang cukup besar terhadap PDRB dan memberikan *multiplier effect* bagi sektor lainnya. Sektor ini di Kabupaten Kotawaringin Barat bertumpu pada tanaman perkebunan dengan komoditas kelapa sawit. Industri pengolahan dapat menjadi sektor dengan nilai LQ tertinggi (sektor unggulan) di Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan banyaknya pabrik pengolahan kelapa sawit yang didirikan di wilayah ini. Kontribusi komoditas ini terhadap PDRB 2018 mencapai 25,30%.



Sektor perdagangan dan transportasi menjadi sektor unggulan juga di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Bandar Udara dan Pelabuhan yang dapat menjadi akses transportasi antar wilayah. Pelabuhan berfungsi sebagai pintu keluar masuk bagi produk-produk dari dan ke Kabupaten Kotawaringin Barat. Bandar Udara sebagai pintu keluar masuk bagi masyarakat dari dan ke Kotawaringin Barat.

Delapan sektor unggulan (*leading sectors*) yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan komoditas utama wilayah ini, yaitu perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit di wilayah ini telah menjadi komoditas penting dan menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat. Perkembangan global yang patut diwaspadai dari sektor ini adalah adanya *black campaign* Uni Eropa dan dampak pergerakan harga komoditas yang dihasilkan oleh Kabupaten Kotawaringin Barat. Apabila harga kelapa sawit turun atau adanya *black campaign* maka dapat mengganggu perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum.

Pendekatan ke 2 (Dua) dalam menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat yakni dengan menggunakan pendekatan analisis *shift share*. Analisis *shift share* mempunyai 3 (tiga) konsep pertumbuhan, yaitu PP (Pertumbuhan Proporsional), PPW (Pertumbuhan Pangsa Wilayah), dan (PN) Pertumbuhan Nasional. Apabila PP bernilai lebih dari nol maka sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang cepat, sebaliknya jika bernilai kurang dari nol maka sektor tersebut mengalami pertumbuhan lambat.

Sektor yang mengalami pertumbuhan yang cepat mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap sektor tersebut semakin meningkat, sektor-sektor tersebut antara lain: (1) industri pengolahan, (2) pengadaan listrik dan gas, (3) konstruksi, (4) perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil, (5) transportasi dan pergudangan, (6) penyediaan makanan dan minuman, (7) informasi dan komunikasi, (8) real estate, (9) jasa pendidikan (10) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, (11) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (12) jasa lainnya. Sebaliknya, sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan yang lambat ini dikarenakan pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih lambat dibandingkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Sektor Pertanian terutama sektor perkebunan sudah menuju kondisi yang mapan sehingga nilai pertumbuhannya lambat. Daerah lain sedang mengalami peningkatan menuju kondisi mapan, sehingga masih mengalami pertumbuhan yang cepat. Untuk lebih jelasnya, hasil analisa nilai komponen pertumbuhan dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Nilai Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP)

Kategori	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Proporsional (PP)	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-115.110,36	Lambat
B	Pertambangan dan Penggalian	-31.412,20	Lambat
C	Industri Pengolahan	242.993,25	Cepat
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.944,62	Cepat
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-993,16	Lambat
F	Konstruksi	33.239,31	Cepat
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	167.389,73	Cepat
H	Transportasi dan Pergudangan	79.098,58	Cepat
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.920,97	Cepat
J	Informasi dan Komunikasi	7.613,81	Cepat
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-27.478,93	Lambat
L	Real Estate	141,75	Cepat
M,N	Jasa Perusahaan	-3,91	Lambat
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.371,15	Cepat
P	Jasa Pendidikan	11.526,98	Cepat
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.021,43	Cepat
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.853,79	Cepat

Sumber: BPS Kotawaringin Barat, 2019 (diolah)

Analisis pertumbuhan selanjutnya adalah pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). Pertumbuhan pangsa wilayah menjelaskan daya saing sektor. Informasi hasil perhitungan PPW i. Apabila nilai PPWij lebih dari nol maka sektor tersebut mempunyai daya saing yang baik, sebaliknya nilai PPWij kurang dari nol maka sektor tersebut kurang berdaya saing. Sektor yang kurang memiliki daya saing perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan daya saingnya sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi secara umum.

Menjelaskan terdapat 5 (lima) sektor yang berdaya saing baik, yaitu: (1) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, (2) pengadaan air, pengolahan sampah, dan limbah dan daur ulang, (3) penyediaan akomodasi dan makan minum, (4) jasa keuangan dan asuransi, (5) real estate. Sedangkan sektor-sektor lainnya diluar ke 5 sektor tersebut di atas kurang berdaya saing, sehingga untuk sektor-sektor ini perlu ditingkatkan daya saingnya.

Tabel 3.10
Nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)

Kategori	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	169.622,21	Daya Saing Baik
B	Pertambangan dan Penggalian	-27.452,84	Kurang Bersaing
C	Industri Pengolahan	-132.714,55	Kurang Bersaing
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2.176,02	Kurang Bersaing
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.150,15	Daya Saing Baik
F	Konstruksi	-18.593,41	Kurang Bersaing
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-141.009,93	Kurang Bersaing
H	Transportasi dan Pergudangan	-85.222,20	Kurang Bersaing
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	2.039,26	Daya Saing Baik
J	Informasi dan Komunikasi	-9.286,33	Kurang Bersaing
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	49.423,47	Daya Saing Baik
L	Real Estate	1.579,56	Daya Saing Baik
M,N	Jasa Perusahaan	-241,45	Kurang Bersaing
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-13.415,99	Kurang Bersaing
P	Jasa Pendidikan	-15.057,04	Kurang Bersaing
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-9.861,96	Kurang Bersaing
R,S,T,U	Jasa lainnya	-531,04	Kurang Bersaing

Sumber: BPS Kotawaringin Barat, 2019 (diolah)

Nilai pertumbuhan bersih ditunjukkan dengan penjumlahan Ppij dan PPWij. Apabila nilai $PPij+PPWij > 0$ maka sektor tersebut dikategorikan dalam kelompok maju. Sebaliknya, apabila nilai $Ppij+PPWij < 0$ maka sektor tersebut dikategorikan dalam kelompok lamban. Berdasarkan tabel di atas terdapat 10 sektor yang dikategorikan sebagai sektor maju dan sisanya sektor lambat. Sektor maju tersebut antara lain: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan, (2) industri pengolahan, (3) pengadaan listrik dan gas, (4) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, (5) konstruksi, (6) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (7) penyediaan akomodasi dan makan minum, (8) jasa keuangan dan asuransi, (9) real estate, dan (10) jasa lainnya. Nilai pertumbuhan bersih yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Nilai Pertumbuhan Bersih (PB)

Kategori	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Bersih (PB)	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	54.511,85	Maju
B	Pertambangan dan Penggalian	-58.865,04	Lamban
C	Industri Pengolahan	110.278,70	Maju
D	Pengadaan Listrik dan Gas	768,60	Maju
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	156,99	Maju
F	Konstruksi	14.645,90	Maju
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26.379,80	Maju
H	Transportasi dan Pergudangan	-6.123,61	Lamban
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.960,22	Maju
J	Informasi dan Komunikasi	-1.672,51	Lamban
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	21.944,55	Maju
L	Real Estate	1.721,31	Maju
M,N	Jasa Perusahaan	-245,36	Lamban
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1.044,84	Lamban
P	Jasa Pendidikan	-3530,06	Lamban
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-3.840,53	Lamban
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.322,76	Maju

Sumber: BPS Kotawaringin Barat, 2019 (diolah)

Dengan menggunakan hasil analisis overlay yang dalam hal ini dapat menginformasikan penentuan sektor yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di suatu wilayah. Analisis *overlay* ini merupakan kombinasi *shift share* dan LQ. Terdapat 4 sektor yang dikategorikan tingkat keunggulannya baik sekali, yaitu sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan transportasi dan pergudangan. Sektor yang dikategorikan baik terdapat 3 sektor, yaitu sektor pertanian, pengadaan air, dan jasa keuangan dan asuransi. Sektor jasa perusahaan dikategorikan lebih dari cukup, sektor penyediaan akomodasi dan sektor real estate dikategorikan cukup, sedangkan sisanya dikategorikan hampir cukup. Hasil analisis *overlay* ini tidak menunjukkan adanya sektor yang berkategori istimewa.

Tabel 3.12
Pemetaan Notasi LQ, PP, dan PPW Berdasarkan Tipologi Klassen

Kategori	Lapangan Usaha	Notasi LQ	Notasi PP	Notasi PPW	Tingkat Keunggulan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	+	-	+	Baik
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	Kurang sekali
C	Industri Pengolahan	+	+	-	Baik sekali
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-	+	-	Hampir dari cukup
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	+	-	+	Baik
F	Konstruksi	+	+	-	Baik sekali
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	+	+	-	Baik sekali
H	Transportasi dan Pergudangan	+	+	-	Baik sekali
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	+	+	Cukup
J	Informasi dan Komunikasi	-	+	-	Hampir dari cukup
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	+	-	+	Baik
L	Real Estate	-	+	+	Cukup
M,N	Jasa Perusahaan	+	-	-	Lebih dari cukup
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	+	-	Hampir dari cukup
P	Jasa Pendidikan	-	+	-	Hampir dari cukup
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	+	-	Hampir dari cukup
R,S,T,U	Jasa lainnya	-	+	-	Hampir dari cukup

Sumber: BPS Kotawaringin Barat, 2019 (diolah)

Dengan memperhatikan informasi data dan analisis di atas, maka terlihat bahwa:

- 1) Sektor yang dikategorikan sebagai sektor basis (analisis LQ) terdapat 8 sektor, yaitu:
 - a. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
 - b. Industri pengolahan
 - c. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang
 - d. Konstruksi
 - e. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
 - f. Transportasi dan pergudangan
 - g. Jasa keuangan dan asuransi
 - h. Jasa perusahaan
- 2) Sektor yang dikategorikan memiliki pertumbuhan yang cepat (analisis PB) terdapat 12 sektor, yaitu:
 - a. Industri pengolahan
 - b. Pengadaan listrik dan gas
 - c. Konstruksi



- d. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
 - e. Transportasi dan pergudangan
 - f. Penyediaan akomodasi dan makan minum
 - g. Informasi dan komunikasi
 - h. Real estate
 - i. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
 - j. Jasa pendidikan
 - k. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
 - l. Jasa lainnya
- 3) Sektor yang dikategorikan memiliki daya saing baik berdasarkan analisis PPW terdapat 5 sektor, yaitu:
- a. Pertanian, kehutanan, dan perikanan
 - b. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang
 - c. Penyediaan akomodasi dan makan minum
 - d. Real estate
- 4) Sektor yang dikategorikan dalam kelompok maju berdasarkan analisis PB terdapat 10 sektor, yaitu:
- a. Pertanian, kehutanan, dan perikanan
 - b. Industri pengolahan
 - c. Pengadaan listrik dan gas
 - d. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang
 - e. Konstruksi
 - f. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
 - g. Penyediaan akomodasi dan makan minum
 - h. Jasa keuangan dan asuransi
 - i. Real estate
 - j. Jasa lainnya

**Tabel 3.13 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kotawaringin Barat 2016-2021**

NO	INDIKATOR EKONOMI	SATUAN	REALISASI		BERTAMBA/ (BERKURAN)G	PROYEKSI		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	PDRB Harga Konstan	Milyar Rp	11.432,69	12.171,18	738,49	12.875,81	13.866,44	14.822,98
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,89	6,46	(0,43)	5,79	7,69	6,90
3	Tingkat Inflasi ²	Persen	3,18	4,52	1,34	2,70	1,66 (April 2020)	2,00 (+-0,50) ³
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,52	4,27	(0,25)	4,30	4,11	4,00
5	Tingkat Pengangguran ¹	Persen	2,17	2,93	0,76	2,82	2,71	2,61
6	PDRB Per Kapita (AHK 2010)	Rp	38,7	40,0		41,1	43,0	44,8

Sumber: BPS Kotawaringin Barat dan RKPD 2020

Keterangan:

- 1) Tingkat Pengangguran berdasarkan target RPJMD 2017-2022
- 2) Tingkat Inflasi Berdasarkan Tingkat Inflasi Tahun Kalender



3.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan kecenderungan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Angka inflasi *year on year* (YoY) tahun 2017 sebesar 3,61%, lebih rendah dibandingkan angka tahun sebelumnya sebesar 4,08% di tahun 2016. Sedangkan jika dilihat angka inflasi *year to date* (YtD), angka inflasi pada 2017 justru lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 4,11% di tahun 2017 dibandingkan 3,58% pada 2016. Meskipun demikian, angka inflasi ini masih terbilang terkendali karena angka inflasi masih dibawah dua digit. Berdasarkan inflasi bulanan, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 0,93% dengan komoditi pemicu cabe rawit, kacang panjang, wortel, tarif listrik dan besi beton. Sementara inflasi terendah pada September 2017 dengan komoditi pemicu deflasi berupa jeruk, petai, terong, tomat sayur dan ayam ras. Pada tahun berjalan (2018), angka inflasi *year to date* (YtD) Januari sampai Juni 2018 sebesar 3,5%, dengan angka inflasi tertinggi pada bulan Juni 2018 sebesar 1,24% dan inflasi terendah pada Februari 2018 sebesar 0,06%, dengan komoditi pemicu inflasi yang utama adalah daging ayam ras.

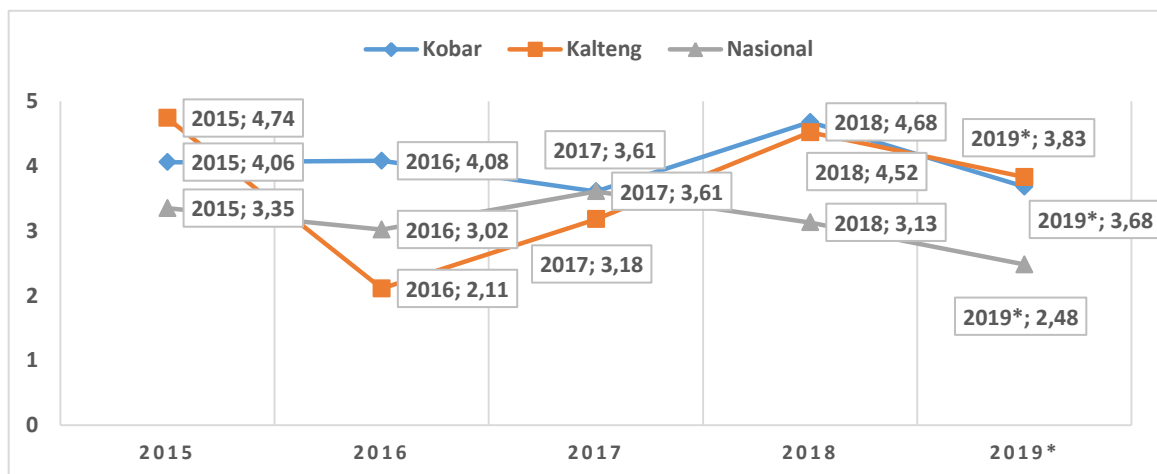
Tabel 3.14 Nilai Inflasi Tahun 2015-2021 Kabupaten Kotawaringin Barat

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ¹	2021 ²
Tingkat Inflasi ³	4,06%	4,08%	3,61%	4,68%	3,83%	1,66% (tingkat inflasi Januari-April 2020)	2,00 (+- 0,5%)

Sumber : BPS, 2015 – 2020

- 1) Tingkat inflasi regional Provinsi Kalteng sampai dengan April 2020 (*year to date*)
- 2) Tingkat inflasi perkiraan Bank Indonesia
- 3) Berdasarkan Tingkat Inflasi Kawasan Provinsi Kalteng (Tingkat Inflasi Kawasan Kalteng dilihat berdasarkan tingkat inflasi 2 Kota, yakni Kota Palangkaraya dan Kota Sampit)

Gambar 3.1 Diagram Perbandingan Perkembangan Inflasi Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan Nasional 2015-2019



Sumber : BPS 2015 - 2020

*) Angka realisasi inflasi *Year on Year* (Yoy) Maret 2018 - Maret 2019



Angka inflasi Kotawaringin Barat pada 2018 sebesar 4,68%. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi *year on year* Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,52% dan angka inflasi Nasional sebesar 3,13%. Komoditi yang paling sering memicu inflasi pada Tahun 2018 di Pangkalan Bun berasal dari Kelompok Bahan makanan yaitu: daging ayam ras, disusul Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan yaitu : angkutan udara, kemudian Kelompok Bahan Makanan dengan komoditi : cabe rawit dan beras. Hal ini menunjukkan komoditi pertanian arti luas secara umum memberikan andil besar sebagai pembentuk inflasi, dimana kemampuan produksi komoditi tersebut belum mampu mencukupi permintaan pasar, sehingga kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dengan mendatangkan komoditi dari luar daerah. Kondisi demikian seyogyanya dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengarahkan kebijakan pembangunan untuk memperbaiki kinerja sektor pertanian arti luas, utamanya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, yang komoditasnya sering muncul sebagai pemicu inflasi.

Terhadap hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah agar harga komoditi tersebut dapat ditekan, seperti harga tiket angkutan udara, Pemerintah Daerah dapat mengajukan tawaran ke beberapa maskapai Nasional agar maskapai yang masuk ke Pangkalan Bun bisa lebih beragam sehingga dapat menekan harga tiket yang sudah ada. Sementara untuk menekan harga komoditi daging ayam ras, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada calon investor/peternak yang bergerak di bidang peternakan dan melakukan percepatan dalam perizinan usahanya. Sampai dengan bulan Maret 2019, inflasi di Pangkalan Bun masih dipicu oleh komoditi dari Kelompok Bahan Makanan yaitu : daging ayam ras, ikan tongkol dan ketimun, sementara yang memicu deflasi berasal dari komoditi cabe rawit, kacang panjang dari Kelompok Bahan Makanan dan komoditi angkutan udara dari Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Namun mulai tahun 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat tidak diperkenankan lagi merilis angka inflasi secara mandiri, karena Pangkalan Bun tidak termasuk dalam 50 kota pengukur data/angka inflasi di Indonesia.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dilakukan pada tahun 2021 masih ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yakni dengan langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya Peningkatan PAD ditempuh melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih difokuskan pada upaya:
 - Peningkatan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;

- Peningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - Perluasan basis pungutan pajak daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan daerah dan Penetapan kantong-kantong potensial penerimaan retribusi daerah; Penetapan obyek kena pajak baru harus dilaksanakan secara hati-hati dan obyektif untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak.
 - Penyesuaian peraturan daerah dibidang pajak dan retribusi daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Perbaikan mekanisme penerimaan pajak dan retribusi daerah, terutama menyangkut Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - Peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi (TI);
 - Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan lembaga keuangan lainnya;
 - Peningkatan kinerja BUMD melalui pemberian penyertaan modal yang dikaitkan dengan penerimaan deviden yang akan diperoleh.
2. Memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah daerah dalam mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti Pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Strategi operasional yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :
- Review Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - Peningkatan koordinasi antara SKPD dalam upaya meningkatkan PAD.

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, pengalokasian didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan dua tahun terakhir serta dalam rangka mengantisipasi menurunnya beberapa asumsi makro ekonomi pemerintah, seperti nilai tukar rupiah terhadap dollar, harga minyak dunia dan kebijakan subsidi energi. Perbandingan pertumbuhan realisasi APBD tahun 2018-2019 terhadap target APBD tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.15
Realisasi dan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2020* Kabupaten Kotawaringin Barat

Realisasi APBD	Realisasi		Target APBD 2020*	Perubahan	
	2018	2019		2018-2019	2019-2020
PENDAPATAN DAERAH	1.262.292.735.080,92	1.323.555.655.584,85	1.600.931.562.000,00	4,85%	20,96%
Pendapatan Asli Daerah	179.763.169.091,73	170.117.781.735,63	255.058.556.000,00	-5,37%	49,93%
Dana Perimbangan	1.128.023.655.970,28	961.791.162.166,00	1.064.062.319.000,00	-14,74%	10,63%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	12.383.834.885,00	191.646.711.683,22	281.810.687.000,00	1447,56%	47,05%
BELANJA DAERAH	1.148.548.256.133,15	1.380.845.070.142,64	1.690.278.480.000,00	20,23%	22,41%
Belanja Tidak Langsung	807.699.468.993,03	644.395.894.955,00	665.424.619.000,00	-20,22%	3,26%
Belanja Langsung	349.022.941.440,12	716.449.175.187,61	1.024.853.861.000,00	105,27%	43,05%
PEMBIAYAAN DAERAH	124.550.890.000,00	93.826.890.811,61	89.346.918.000,00	-24,67%	-4,77%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	135.768.255.080,19	120.826.890.811,61	96.846.918.000,00	-11,01%	-19,85%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.071.558.000,00	27.000.000.000,00	7.500.000.000,00	143,87%	-72,22%

Sumber: Data diolah, 2020.

Berdasarkan Perpres 54/2020 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No 119/2813/SJ dan No 177/KMK.07/2020 bahwa secara proyeksi Pendapatan asli daerah di perkirakan turun 34% karena adanya pelemahan ekonomi dan pembatasan aktifitas dikarenakan wabah virus Covid 19. Dalam Perpres 54/2020 Postur TKDD Dalam APBN TA 2020 mengalami penyesuaian sehingga akan berdampak pada APBD daerah khususnya terkait dengan dana transfer daerah dan penyesuaian postur anggaran tersebut akan berdampak pada tahun anggaran selanjutnya. Sehingga, pasca wabah Covid-19, diproyeksikan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 mengalami penurunan, sebagai berikut:

Pendapatan daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.1.454.117.974.000,- atau turun sebesar 9,17% dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.1.600.931.562.000,-. Adapun komponen Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.270.514.948.000,00 atau naik sebesar 6.06% apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.255.058.556.000,00.

b. Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.958.667.996.000,00 atau turun 9,9% apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.1.064.062.319.000,00.



c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.224.935.030.000,00 atau turun sebesar 20,18% apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 281.810.687.000,00.

Secara rinci perkiraan target pendapatan daerah tahun 2021 adalah sebagaimana tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2021

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun Berjalan 2020 *	Proyeksi TA 2021
1	2	3	4	5	8
	Pendapatan Daerah	1.262.292.735.080,92	1.323.555.655.539,85	1.600.931.562.000,00	1.454.117.974.000,00
1.1	Pendapatan asli daerah	179.763.169.091,73	170.117.781.735,63	255.058.556.000,00	270.514.948.000
1.1.1	Pajak daerah	61.675.813.242,39	51.420.122.949,53	82.400.000.000	82.650.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	11.218.267.270,25	13.447.260.456,00	27.622.497.300	31.355.225.300
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.017.096.032,00	8.941.166.757,00	12.062.856.000	13.568.450.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	97.851.992.547,09	96.309.231.573,10	132.973.202.700	142.941.272.700
1.2	Dana perimbangan	938.379.875.488,00	961.791.162.166,00	1.064.062.319.000,00	958.667.996.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	56.433.629.483,00	96.734.933.706,00	70.413.023.000	71.276.575.000
1.2.2	Dana alokasi umum	652.906.913.000	670.997.942.000	684.692.066.000	642.759.248.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	229.039.333.005	194.058.286.460	308.957.230.000	244.632.173.000
1.3	Lain lain Pendapatan yang sah	144.149.690.501,19	191.646.711.638,22	281.810.687.000	224.935.030.000

Sumber : LKPJ 2018, 2019, APBD 2020, dan hasil analisis (data olah)

** : Angka APBD Murni

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dengan mengupayakan 20% anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10% anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif;
3. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang melalui Program terpadu dan holistik melalui program-program pro rakyat yang menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan serta peningkatan alokasi dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



4. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;
5. Memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

II. Aspek Pelayanan Publik

1. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan belanja modal sekurang-kurangnya 29 % dari belanja Daerah
3. Mengalokasikan Belanja Pegawai maksimal 50 % dari total belanja APBD;
4. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan prospektif dan mendukung percepatan kawasan/cluster industri berbasis pertanian.

III. Aspek Daya Saing

1. Memantapkan infrastruktur transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah/interisolasi, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan seperti jalan darat, pelabuhan laut, pelabuhan ro-ro, dan bandara bertaraf internasional;
2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.
4. Mempercepat reformasi birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang capable dan responsible, SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang memungkinkan *check and balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas dapat menuju *good governance* dengan efektif.
5. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, integrasi kelapa sawit dan ternak sapi serta peningkatan IPM.
6. Menghilangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat dan



lain-lain dan menggantikannya ke dalam skema penyaluran kredit UKM bersyarat ringan melalui pengembangan lembaga penjaminan atau melalui perbankan.

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dana ADD dalam upaya penyediaan kegiatan berskala kecil/desa.
8. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif.
9. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, termasuk investasi bidang pendidikan.
10. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh daerah di Indonesia maka pemerintah pusat telah mengintruksikan kepada daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi dalam penganggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan pencermatan dalam pengalokasian anggaran belanja, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Belanja Pegawai**

- a. Daerah yang memberikan tunjangan tambahan penghasilan ASN/ tunjangan kinerja daerah dan/ atau insentif lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat agar melakukan penyesuaian tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat
- b. Daerah yang memberikan tunjangan tambahan penghasilan ASN/ tunjangan kinerja daerah dan/ atau insentif lebih rendah dari tunjangan kinerja di pusat agar melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai
- c. Mengendalikan mengurangi honorarium kegiatan
- d. Mengendalikan mengurangi honorarium pengelola dana BOS dan/ atau
- e. Mengendalikan mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksana pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

2. **Belanja Barang dan Jasa**, Rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang kurangnya 50%, terutama mengurangi belanja berikut :

- a. perjalanan dinas dalam dan luar daerah
- b. Barang bahan /material) pakai habis untuk keperluan kantor
- c. Cetak dan penggandaan



- d. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari hari tertentu
- e. Pemeliharaan
- f. Perawatan kendaraan bermotor
- g. Sewa rumah gedung gudang parkir
- h. Sewa sarana mobilitas
- i. Sewa alat berat
- j. Jasa kantor dan sewa antara lain langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak dan peralatan
- k. Jasa konsultasi
- l. Tenaga ahli instruktur narasumber
- m. Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat
- n. Makanan dan minuman serta paket rapat di kantor dan di luar kantor
- o. Sosialisasi, workshop, bimtek, pelatihan, FGD, dll yang mengundang banyak orang.
- p. BANSOS, Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial dan hibah kepada Kelompok Masyarakat Ormas Lembaga Sosial Masyarakat untuk dialihkan kepada masyarakat miskin kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID 19. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/ kurang mampu yang dilakukan PEMDA harus memperhatikan bantuan pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih.

3. Belanja Modal, Arahan refocusing dan realokasi belanja modal di dalam SKB adalah sbb disesuaikan:

- a. DAK FISIK, Penerapan Pola Padat Karya Tunai (Cash For Work) dalam pelaksanaan Belanja Modal untuk Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur seperti Jalan dan Irigasi
- b. DAK KESEHATAN, Belanja Bidang Kesehatan dan hal hal lain terkait kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID 19 antara lain berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (tenaga medis sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat dan penanganan pasien COVID 19

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp.1.413.117.974.000,00 atau turun sebesar 16,40% apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2020 yaitu Rp. 1.690.278.480.000 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 659.398.831.000,00 atau turun sebesar 0,91% dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 665.424.619.000. Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:



- a. **Belanja Pegawai**
Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Belanja Pegawai pada 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 481.112.236.000,- atau mengalami penurunan sebesar 0,02% dari plafon belanja yang sama pada APBD Murni Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 481.202.204.000. Belanja ini meliputi komponen Gaji dan Tunjangan pegawai, serta pengangkatan CPNS yang seleksinya telah dilaksanakan pada 2020.
- b. **Belanja Bunga**
Belanja Bunga pada tahun anggaran 2020 dialokasikan Rp.1.800.000.000,00.
- c. **Belanja Subsidi**
Belanja Subsidi pada Tahun 2020 tidak dianggarkan, demikian juga dengan Tahun 2019 sebelumnya.
- d. **Belanja Hibah**
Belanja Hibah merupakan hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Belanja Hibah ini pada Tahun Anggaran 2021 dialokasikan turun menjadi Rp.7.394.320.000,- atau turun sebesar 29,55% dibandingkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 10.495.800.000. Alokasi ini digunakan untuk mengakomodasi Hibah BOP PAUD, BOP Kesetaraan, hibah kepada partai politik dan penganggran kembali hibah 2020 yang ditunda.
- e. **Bantuan Sosial**
Belanja Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, pada tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp.455.000.000.
- f. **Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.**
Jumlah anggaran Belanja Bagi Hasil ini pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp.11.400.523.000,- naik 3,62% jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 11.002.250.000,-. Alokasi ini diasumsikan sebesar 10% dari Target Pajak Daerah dan target Retribusi Daerah
- g. **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik**
Belanja Bantuan Keuangan yakni bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, partai politik dan damang kepala adat. Belanja Bantuan Keuangan ini pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 153.236.752.000,- atau turun 3,79% dari alokasi tahun sebelumnya Rp. 159.274.365.000.
- h. **Belanja Tidak Terduga**
Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan



bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Untuk tahun 2021, Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 4.000.000.000,- atau naik 100% dari tahun sebelumnya.

Belanja Langsung (BL) tahun 2021 diproyeksikan dianggarkan sebesar Rp.753.719.143.000,- atau turun sebesar 26,46%. bila dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.024.853.861.000,-. Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, yakni urusan wajib, urusan pilihan serta unsur penunjang, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, meliputi kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018, pembangunan daerah yang berdasarkan usulan masyarakat dalam forum musrenbang, rencana teknokratik SKPD, Pokok-pokok pikiran DPRD dan pembangunan daerah berdasarkan platform Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Anggaran belanja daerah Tahun 2021 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17. Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2021

NO	JENIS BELANJA	Realisasi APBD Tahun 2018	Realisasi APBD Tahun 2019	Target APBD pada Tahun 2020*)	Proyeksi APBD TA 2021
1	2	3	4	5	
02.01	Belanja Tidak Langsung	807.699.468.993,03	644.395.894.955,00	665.424.619.000	659.398.831.000
02.01.01	Belanja pegawai	441.908.290.150,00	475.678.140.623,00	481.202.204.000	481.112.236.000
02.01.02	Belanja bunga		280.000.007		1.800.000.000
02.01.03	Belanja subsidi				-
02.01.04	Belanja hibah	34.074.604.730,32	7.805.554.341,00	10.495.800.000	7.394.320.000
02.01.05	Belanja bantuan sosial	1.630.250.000,00	161.500.000,00	1.450.000.000	455.000.000
02.01.06	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	8.174.154.300,00	6.423.330.300,00	11.002.250.000	11.400.523.000
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten /kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	138.890.854.825,00	153.647.369.684,00	159.274.365.000	153.236.752.000
02.01.08	Belanja tidak terduga				4.000.000.000
02.02	Belanja Langsung	340.848.787.140,12	716.449.175.187,61	1.024.853.861.000	753.719.143.000
02.02.01	Belanja Pegawai	0	118.367.358.283,22	172.307.298.385	
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	0	252.590.576.104,50	335.386.290.141	
02.02.03	Belanja Modal	340.848.787.140,12	345.501.240.799,89	517.160.272.474	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.148.548.256.133,15	1.360.845.070.142,61	1.690.278.480.000	1.413.117.974.000

Sumber : LKPJ 2018, 2019, APBD 2020, hasil proyeksi (data olah), 2020

* : Angka APBD Murni



3.2.3 Kerangka Kebijakan Pendanaan Daerah

Dengan memperhatikan pengalokasian anggaran bagi pemerintah daerah, dalam hal ini kerangka pendanaan perlu memperhatikan beberapa point pengalokasian anggaran khususnya terkait dengan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Kerangka pendanaan pada urusan pendidikan dialokasikan minimal 20% dari total alokasi pendanaan secara keseluruhan. Untuk urusan Pendidikan dialokasikan minimal 10 % dari total alokasi pendanaan secara keseluruhan dan untuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, alokasi anggaran sebesar 1% bagi pemerintah daerah dengan APBD dibawah 1 Triliun, 0,75% bagi pemerintah daerah dengan nilai APBD sebesar 1 – 2 Triliun, dan diatas 10 Milyar.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak lagi menetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan bersumber dari prediksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan berdasarkan potensi riil yang ada serta penerimaan kembali pemberian pinjaman jangka pendek kepada masyarakat. Kebijakan atas pengeluaran pembiayaan digunakan untuk :

- Penyertaan modal pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
- Pembayaran pokok utang.

Realisasi dan proyeksi pembiayaan tahun 2018 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018 - 2021

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Target Tahun 2020*)	Postur APBD Tahun 2021
		2018	2019		
03.01	Penerimaan pembiayaan Daerah	135.768.255.080	120.826.890.812	96.846.918.000	-
03.01.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	135.768.255.080	120.864.471.012	56.846.918.000	-
03.01.04	Penerimaan pinjaman daerah dan Obligasi Daerah	154.000.000	142.419.800	40.000.000.000	-
03.02	Pengeluaran pembiayaan	11.070.000.000	27.000.000.000	7.500.000.000	41.000.000.000
03.02.02	Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.070.000.000	7.000.000.000	7.500.000.000	5.000.000.000
03.02.03	Pembayaran pokok utang	-	20.000.000.000		36.000.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		12.469.822.508.019	93.826.890.812	89.346.918.000	(41.000.000.000)

Sumber : LKPJ 2018, 2019, APBD 2020, Hasil Proyeksi (data olah), 2020.

** : Angka APBD Murni

Berdasarkan hasil proyeksi pembiayaan daerah, maka di tahun 2021 pembiayaan daerah diproyeksikan turun sebesar 145% dari tahun 2020 dari Rp.89.346.918.000,- menjadi minus Rp.41.000.000.000,- pada 2021. Pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran



Sebelumnya (SILPA) di tetapkan nihil disebabkan dampak dari *covid-19*, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.41.000.000.000 sehingga proyeksi jumlah pembiayaan netto dalam postur APBD TA 2021 yang ditetapkan oleh TAPD defisit sebesar Rp.41.000.000.000,00.

3.2.5. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pembangunan daerah, telah disusun besaran alokasi belanja berdasarkan urusan sebagai berikut:

Tabel 3.19 Kerangka Pendanaan Daerah Berdasarkan Urusan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021

Urusan	Perangkat Daerah	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung		Pagu Total per Urusan	% Terhadap Belanja Langsung	% Terhadap Total Belanja
			Belanja Gaji dan Tunjangan (Rp)	Belanja Hibah, Bansos, Transfer dan Belanja Lainnya (Rp)			
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	103.792.549.900	202.797.859.100	392.000.000	306.982.409.000	13,77%	21,72%
Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.595.000.000	-		2.595.000.000	0,34%	0,18%
Kesehatan	Dinas Kesehatan	124.613.759.400	46.087.007.600		170.700.767.000	16,53%	12,08%
	RSUD Sultan Imanuddin	159.398.467.400	24.613.033.600		184.011.501.000	21,15%	13,02%
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	174.534.951.200	7.749.607.800		182.284.559.000	23,16%	12,90%
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.354.808.000	3.117.131.100		10.471.939.100	0,98%	0,74%
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.790.877.500	8.261.862.500		14.052.740.000	0,77%	0,99%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.275.000.000	3.483.787.000	1.300.320.000	6.059.107.000	0,17%	0,43%
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.524.178.000	3.610.098.000		8.134.276.000	0,60%	0,58%
Sosial	Dinas Sosial	3.439.137.800	4.255.718.200	455.000.000	8.149.856.000	0,46%	0,58%

Urusan	Perangkat Daerah	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung		Pagu Total per Urusan	% Terhadap Belanja Langsung	% Terhadap Total Belanja
			Belanja Gaji dan Tunjangan (Rp)	Belanja Hibah, Bansos, Transfer dan Belanja Lainnya (Rp)			
Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.209.986.080	4.106.259.000		7.316.245.080	0,43%	0,52%
Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	311.954.920	-		311.954.920	0,04%	0,02%
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.116.418.800	4.119.996.000		5.236.414.800	0,15%	0,37%
Pengendalian Penduduk dan KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.362.034.200	-		3.362.034.200	0,45%	0,24%
Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	1.283.800.000	3.713.409.000		4.997.209.000	0,17%	0,35%
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12.949.916.000	4.486.339.000		17.436.255.000	1,72%	1,23%
Adiminstrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Sipil	2.421.839.000	4.819.168.000		7.241.007.000	0,32%	0,51%
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.338.144.000	4.306.161.000		7.644.305.000	0,44%	0,54%
Perhubungan	Dinas Perhubungan	11.688.941.000	4.696.950.000		16.385.891.000	1,55%	1,16%
Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.793.867.600	4.520.176.000		9.314.043.600	0,64%	0,66%



Urusan	Perangkat Daerah	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung		Pagu Total per Urusan	% Terhadap Belanja Langsung	% Terhadap Total Belanja
			Belanja Gaji dan Tunjangan (Rp)	Belanja Hibah, Bansos, Transfer dan Belanja Lainnya (Rp)			
Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	31.887.400	-		31.887.400	0,00%	0,00%
Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	30.000.000	-		30.000.000	0,00%	0,00%
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.108.769.700	6.494.879.000		9.603.648.700	0,41%	0,68%
Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.534.572.000	-		1.534.572.000	0,20%	0,11%
Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.313.658.300	-		4.313.658.300	0,57%	0,31%
Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.338.277.000	4.775.837.000		6.114.114.000	0,18%	0,43%
Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.531.262.000	3.886.672.000	50.000.000	7.467.934.000	0,47%	0,53%
Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.509.860.100	4.040.284.000		5.550.144.100	0,20%	0,39%
Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45.139.900	-		45.139.900	0,01%	0,00%
Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	10.309.321.000	3.500.035.000		13.809.356.000	1,37%	0,98%
Pariwisata	Dinas Pariwisata	3.050.996.800	4.159.578.200		7.210.575.000	0,40%	0,51%



Urusan	Perangkat Daerah	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung		Pagu Total per Urusan	% Terhadap Belanja Langsung	% Terhadap Total Belanja
			Belanja Gaji dan Tunjangan (Rp)	Belanja Hibah, Bansos, Transfer dan Belanja Lainnya (Rp)			
Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	7.339.622.000	15.858.578.000		23.198.200.000	0,97%	1,64%
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.749.823.000	5.250.819.000		11.000.642.000	0,76%	0,78%
Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	142.563.900	-		142.563.900	0,02%	0,01%
Pengawasan	Inspektorat	4.401.222.000	6.204.804.000		10.606.026.000	0,58%	0,75%
Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD	9.391.000.000	16.673.332.000		26.064.332.000	1,25%	1,84%
	Sekretariat Daerah	27.904.799.100	13.445.234.900	5.541.500.000	46.891.534.000	3,70%	3,32%
	Kecamatan Arut Selatan	8.046.200.000	8.428.013.000		16.474.213.000	1,07%	1,17%
	Kecamatan Arut Utara	1.919.214.000	2.877.633.000		4.796.847.000	0,25%	0,34%
	Kecamatan Kumai	4.109.110.000	4.566.563.000		8.675.673.000	0,55%	0,61%
	Kecamatan Kotawaringin Lama	3.900.000.000	3.643.855.000		7.543.855.000	0,52%	0,53%
	Kecamatan Pangkalan Lada	691.392.000	2.068.352.000		2.759.744.000	0,09%	0,20%
	Kecamatan Pangkalan Banteng	745.000.000	2.136.486.000		2.881.486.000	0,10%	0,20%
Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.132.462.500	4.891.915.000		9.024.377.500	0,55%	0,64%



Urusan	Perangkat Daerah	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung		Pagu Total per Urusan	% Terhadap Belanja Langsung	% Terhadap Total Belanja
			Belanja Gaji dan Tunjangan (Rp)	Belanja Hibah, Bansos, Transfer dan Belanja Lainnya (Rp)			
Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	536.516.500	-		536.516.500	0,07%	0,04%
Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.865.555.000	19.882.530.000	170.437.275.000	195.185.360.000	0,65%	13,81%
	Badan Pendapatan Daerah	3.527.853.000	5.336.484.000		8.864.337.000	0,47%	0,63%
Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.384.555.000	4.245.789.000		6.630.344.000	0,32%	0,47%
Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.332.880.000		110.500.000	3.443.380.000	0,44%	0,24%
Jumlah		753.719.143.000	481.112.236.000	178.286.595.000	1.413.117.974.000	100%	100%

Sumber : Data Diolah, 2020





**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**



Bab 4

Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan tahun 2021 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Pada bagian ini dirumuskan:

1. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
 - a. Korelasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang pada tahun 2021 memprioritaskan pada 7 program nasional yaitu:
 - 1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
 - 2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
 - 3) SDM berkualitas dan berdaya saing
 - 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
 - 5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
 - 6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
 - 7) Stabilitas polhukan dan transformasi pelayanan publik.
 - b. Korelasi terhadap Program Prioritas Provinsi (Kalteng Berkah), tahun 2021 mengarah pada tema “Pengembangan Agro Industri Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan”, dengan prioritas:
 - 1) Pemerataan Infrastruktur wilayah
 - 2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan , pesisir dan pantai



- 3) Stabilitas ekonomi daerah
 - 4) Peningkatan pendapatan masyarakat
 - 5) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
 - 6) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
 - 7) Pengelolaan industri pariwisata
 - 8) Pengelolaan SDA Secara bijaksana yang berkelanjutan
 - 9) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
- c. Korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
 - d. Korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
 - e. Korelasi terhadap isu strategis daerah.
2. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi perangkat daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.
 3. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, perangkat daerah (PD) pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.
 4. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.
 5. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.
 6. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

4.1. Visi dan Misi Pembangunan

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan factor strategis dan potensi yang dimiliki, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

**"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"**

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS** yaitu :

I : IPTEK DAN INFRASTRUKTUR

K : KETAKWAAN

H : HARMONIS

L : LANGGENG

A : AMAN

S : SEJAHTERA



Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu :

N : NASIONALIS

U : UNGGUL

R : RELIGIUS

A : AMANAH

N : NYATA

I : INSPIRATIF

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Penjabaran Visi Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
VISI "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS "	
Gerakan Membangun	Terwujudnya partisipasi dan kesadaran tinggi bagi masyarakat dan pemerintah untuk berupaya bersama-sama, bersinergi harmonis membangun kabupaten kotawaringin barat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini sebagai wujud kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat melalui gerakan membangun Kabupaten Kotawaringin Barat
Kejayaan	Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan, menuju masyarakat kabupaten yang nasionalis, religius, aman dan sejahtera, melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan inspiratif, dan dilaksanakan secara nyata dan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten.
Kerja nyata	Terwujudnya etos kerja pemerintah dalam membangun daerah secara nyata, inspiratif, dalam mewujudkan amanah masyarakat, menghasilkan pembangunan yang inspiratif dan berdampak nyata pada kemajuan daerah.
Iptek dan Infrastruktur	Terwujudnya pengembangan IPTEK dan Infrastruktur yang maju melalui peningkatan sistem akses internet, buku, akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, serta peningkatan sistem transportasi umum dan peningkatan sistem infrastruktur antar wilayah guna membuka peluang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lebih maju dan jaya
Ketakwaan	Terciptanya Ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari moral yang baik dengan cara memiliki tindakan untuk menciptakan suasana yang agamis, tenang dan damai
Harmonis	Tercipta keberagaman masyarakat yang Harmonis melalui kesetaraan sosial, tidak menyebar fitnah dan isu SARA, tidak menimbulkan kekacauan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bermasyarakat



POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
VISI "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS "	
Langgeng	Terwujudnya interaksi dan pergaulan yang Langgeng melalui saling menghargai dan menghormati, berempati, dan tidak bersikap egois guna menciptakan ketentraman dan kedamaian demi terwujudnya kejayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
Aman	Terciptanya keberadaan hidup yang Aman dengan membudayakan anti kekerasan, mengenali kerentanan Kabupaten Kotawaringin Barat, dan meningkatkan peran perangkat perlindungan masyarakat
Sejahtera	Terwujudnya kehidupan masyarakat Sejahtera, melalui penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup guna mencukupi pangan, sandang dan papan

Sumber : RPJMD 2017-2022

Adapun misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, sebagai penjabaran dari Visi **"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"** adalah sebagai berikut :

Misi 1 Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Misi 2 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

Misi 3 Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup.

Misi 4 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Misi 5 Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Misi 6 Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

4.2. Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki daya ungkit besar dalam memberikan dampak pada pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) **Tingginya Angka Kemiskinan.**

Kemiskinan menjadi permasalahan utama dalam pembangunan. Isu kemiskinan menjadi perhatian penting untuk segera mungkin ditanggulangi. Hal tersebut dikarenakan karena faktor kemiskinan jika dibiarkan dapat dapat menyebabkan



permasalahan lainnya. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, isu kemiskinan menjadi isu yang sangat serius untuk diselesaikan karena angka kemiskinan di kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup tinggi.

2) Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Secara Elektronik.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan *e-government* masih terbatas serta belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah.

3) Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Tata kelola pemerintahan desa merupakan hal yang harus menjadi konsentrasi pemerintah dikarenakan posisi desa yang sekarang ini menjadi fokus pembangunan nasional. Untuk membantu memajukan pembangunan melalui desa, maka pemerintah wajib untuk memberikan pendampingan dalam hal tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam penggunaan anggaran desa yang bersumber dari ADD dikarenakan jumlahnya yang cukup besar, sehingga ADD dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

4) Minimnya sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan Pendidikan.

Selain akses terhadap pendidikan, kelayakan sarana-prasarana penunjang pelayanan pendidikan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan minat dan kualitas proses belajar mengajar bagi siswa. Sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan di Indonesia seharusnya disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kondisi saat ini, masih terdapat saranaprasarana pendidikan yang masih belum sesuai dengan SNP.

5) Kurangnya Minat Baca Masyarakat.

Membaca merupakan salah satu cara untuk belajar dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Minat baca juga digunakan sebagai salah satu poin penilaian kualitas sumberdaya manusia. Jika dilihat dari tingkat kunjungan perpustakaan, kondisi minat baca masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup rendah.

6) Kurangnya Akses Dan Kualitas Terhadap Layanan Kesehatan.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Secara umum untuk mengukur tingkat kesehatan dapat dilihat dari nilai angka harapan hidup. AHH di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya balita gizi buruk, masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Hal tersebut menunjukkan masih ada sekelompok masyarakat yang memiliki akses rendah terhadap layanan kesehatan yang memadai. Akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat tidak mampu sangatlah penting untuk diupayakan, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan.



7) Belum Optimalnya Pengelolaan Sarana-Prasarana Olahraga.

Salah satu upaya pengembangan bakat pemuda adalah melalui olahraga. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan sarana-prasarana yang layak pakai. Kondisi saat ini, pengelolaan sarana-prasarana olahraga belum optimal.

8) Rendahnya Dukungan Infrastruktur Terhadap Sektor Industri.

Infrastruktur sebagai pengungkit pembangunan di berbagai sektor menjadikan permasalahan dalam bidang ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan. Kondisi dukungan infrastruktur di sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya rencana induk pembangunan industri kabupaten. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan sektor industri khususnya sektor industri kecil/rumah tangga maupun perkembangan di sektor industri hilir.

9) Rendahnya Kondusifitas Aktifitas Perdagangan Barang dan Jasa.

Kondusifitas aktifitas perdagangan barang dan jasa masih rendah, salah satu penyebabnya adalah peran daerah dalam melakukan perlindungan dunia usaha yang masih belum optimal. Hal tersebut berdampak pada tingginya fluktuasi harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu pengelolaan dan penataan pasar tradisional yang masih belum optimal juga semakin menurunkan kondusifitas aktifitas perdagangan khususnya untuk pelaku usaha mikro kecil.

10) Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Sumberdaya Penunjangnya pengembangan Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan masih rendah. Hal tersebut terlihat dari tingkat produktifitas komoditas di berbagai sektor (pertanian, perikanan, dan peternakan) masih tergolong rendah. Selain itu pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan ketiga sektor tersebut juga masih cukup rendah.

11) Belum Optimalnya Sistem Ketahanan Pangan Daerah.

Ketahanan pangan yang masih rendah tercermin dari tingkat konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan, serta rendahnya keragaman pangan masyarakat (Pola Harapan Pangan) yang masih rendah.

12) Rendahnya Minat Kewirausahaan Masyarakat (Koperasi dan UMKM).

Minat masyarakat untuk berwirausaha masih tergolong rendah, hal itu ditunjukkan dengan belum optimalnya produktifitas Koperasi dan UMKM, selain itu kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha juga ikut mempengaruhi perkembangan usaha UMKM.

13) Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan PAD.

Sistem pengelolaan PAD masih belum optimal, sehingga mengakibatkan target PAD selama 4 tahun tidak tercapai. Kurang optimalnya pengelolaan PAD dapat dikarenakan belum adanya tata kelola pembinaan dan pengawasan BUMD serta



pengelolaan yang masih belum berbasis teknologi informasi. Selain itu penggalian PAD yang ada selama ini masih belum didasarkan pada data potensi daerah.

14) Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Transportasi Penunjang Publik maupun Ekonomi.

Meskipun seluruh desa/kelurahan telah terhubung dengan akses jalan darat (kecuali Teluk Pulai dan Sungai Cabang), masih terdapat sejumlah permasalahan infrastruktur baik di persedaan maupun di perkotaan, misalnya drainase yang tidak tertata, sanitasi buruk, terdapat kawasan kumuh di perkotaan, serta belum adanya angkutan penumpang dalam kota. Angkutan kota yang menghubungkan antar ibukota kecamatan juga masih belum terkelola dengan baik.

15) Belum Optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup dapat dinilai belum optimal, dimana masih banyak kawasan yang masuk dalam moratorium lahan gambut,serta diperparah dengan meningkatnya pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam.

16) Masih Rendahnya Profesionalitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan ADD, DD, Dan Intervensi Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir.

Masih rendahnya profesionalitas Aparatur Desa khususnya dalam hal pengelolaan ADD, DD, dan Intervensi Dalam Pengawasan pengelolaan dana Bergulir yang tercermin dari belum terkelolanya dana bergulir serta pengelolaan keuangan lainnya dengan baik. Selain itu pengelolaan pembangunan secara partisipatif juga masih belum optimal.

17) Masih Tingginya Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Barat juga masih menjadi perhatian serius dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kasus KDRT pada anak meningkat hingga (0,3%) dan masih adanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu pemenuhan akan hak-hak bagi perempuan dalam bidang pembangunan terutama di struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal.

18) Lemahnya Branding Wisata Kotawaringin Barat.

Untuk meningkatkan popularitas pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan melalui penguatan branding sebagai salah satu identitas pariwisata. Saat ini positioning brandingpariwisata daerah masih belum optimal.Selain itu promosi wisata sebagai ujung tombak dalam pemasaran pariwisata di Kabupaten Kotawaringin barat juga masih belum optimal. Selain itu hingga saat ini masih belum ada sistem yang terintegrasi dalam promosi pariwisata, perdagangan dan investasi.

19) Belum Optimalnya Pemenuhan Aspek *Attraction, Accessibility, Amenity, dan Ancillary Service* Destinasi Wisata.

Untuk mendukung dan mempercepat pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, seharusnya 4 aspek pembangunan pariwisata dipenuhi. 4 aspek tersebut adalah Aspek *Attraction, Accessibility, Amenity, dan Ancillary Service*



Destinasi Wisata. Namun kondisi saat ini 4 aspek tersebut masih belum tercukupi. Selain itu pengelolaan pariwisata yang ada sekarang masih belum optimal. Dari segi kesadaran masyarakat sekitar obyek pariwisata juga masih rendah. Sedangkan dari segi perkembangan ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai dampak lain dari pembangunan sektor pariwisata juga masih belum signifikan.

4.2.2. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai dari sebuah proses pembangunan. Tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan
4. Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis
5. Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan
6. Peningkatan Pariwisata Daerah

4.2.3. Sasaran

Sasaran merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran ini ditentukan untuk menjawab isu strategis daerah. Sasaran Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 tertuang dalam indikator kinerja yang mengacu pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan.
2. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
4. Meningkatnya pelayanan publik.
5. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga.
8. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Sekunder Unggulan.
9. Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi.
10. Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah.
11. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas daerah terkait infrastruktur dasar.
12. Meningkatnya kesejahteraan PMKS.
13. Menurunnya tingkat pengangguran.
14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
15. Menurunnya resiko bencana.



16. Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama.
17. Meningkatnya Desa Mandiri.
18. Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas kota/kabupaten layak anak.
19. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum.
20. Meningkatkan industri kepariwisataan.
21. Meningkatnya kelestarian seni dan budaya.

4.3 Arah Kebijakan Pembangunan

Dengan memperhatikan kondisi eksisting daerah melalui isu strategis, tujuan yang ingin dicapai serta sasaran yang dilakukan, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 diarahkan untuk :

1. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas dan produktivitas ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat;
Percepatan penyediaan infrastruktur dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan penyediaan infrastruktur diutamakan pada infrastruktur dasar berupa prasarana untuk peningkatan aksesibilitas wilayah, kelistrikan dan lahan pertanian. Selain membuka keterisolasian wilayah, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya percepatan pengentasan desa tertinggal pemerintah daerah akan meningkatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan dana desa.
2. Melaksanakan Program terpadu bidang pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak;
3. Mempersiapkan pengembangan sektor industri pengolahan (pengembangan aspek hilir produk pertanian) dan perdagangan sebagai lokomotif ekonomi baru selain pertanian dalam arti luas;
Untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, pemerintah akan mendorong pengembangan hilirisasi melalui diversifikasi produk. Sementara untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk, dilakukan standardisasi produk dan proses produksi.
4. Mempersiapkan pengembangan kawasan berdasarkan sektor unggulan dan potensi masing-masing;
Dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan maka didorong percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah pengembangan, pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian



melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (core business daerah) yang meliputi : agribisnis (CPO, kerupuk amplang, daging sapi), industri manufaktur dan pariwisata (ekowisata, agrowisata dan wisata budaya).

5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

Investasi di daerah diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang bermuara pada meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memberikan kepastian hukum dan pemberian insentif bagi investor.

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, dilakukan upaya pengendalian komoditas pemicu inflasi, seperti: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ikan air tawar, beras yang sebenarnya telah dapat diproduksi di tingkat lokal meskipun dengan skala yang terbatas. Pengendalian komoditas lokal dan yang berasal dari luar daerah dilakukan meliputi proses produksi, produktifitas dan pendistribusiannya. Selain itu pemerintah daerah juga mendorong pengembangan komoditas lokal, dengan dukungan strategi lainnya, seperti strategi pengembangan kawasan dan demplot komoditas pemicu inflasi, pembinaan UMKM, mempermudah akses permodalan dan jaringan pemasaran. Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan bantuan untuk permodalan bergulir, pengembangan lembaga penjaminan untuk usaha kecil dan menengah, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi mikro di pedesaan, fasilitasi dan pembinaan manajemen Koperasi dan UMKM serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya yang memberikan multiplier effect terhadap pendapatan masyarakat.

6. Peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berupa peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini sebagai upaya menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil untuk dapat mengisi bursa tenaga kerja pada perusahaan ataupun wirausaha yang berujung pada menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Daerah.



4.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

4.4.1 Tema Pembangunan

Dengan memperhatikan tujuan pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, maka tema pembangunan daerah tahun 2021 adalah “Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, dan Kepariwisata terhadap Pendapatan Daerah”.

4.4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tema, pembangunan daerah tahun 2021 adalah “**Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, dan Kepariwisata Terhadap Pendapatan Daerah**”. Strategi pembangunan daerah dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah tersebut terdiri dari kebijakan dan program pembangunan. Dalam Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat beberapa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Prioritas I : Peningkatan Nilai Investasi Terhadap Sektor Unggulan.**
2. **Prioritas II : Membangun Industrial Matching Antar Pelaku Industrial Terhadap Pelaku Ekonomi Sektor Unggulan.**
3. **Prioritas III : Inovasi Intensifikasi Pos-pos Pendapatan Asli Daerah Berbasis Teknologi.**
4. **Prioritas IV : Peningkatan Infrastruktur Industri dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.**
5. **Prioritas V : Peningkatan Pelayanan Publik dan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.**

4.4.3 Program Prioritas

Berdasarkan tema serta prioritas pembangunan daerah, maka program yang menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
1	Peningkatan Nilai Investasi Terhadap Sektor Unggulan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pendidikan Anak Usia Dini2. Program Pendidikan Sekolah Dasar3. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat6. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga7. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak9. Program peningkatan agribisnis peternakan10. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan11. Program pengelolaan perikanan budidaya12. Program pengembangan Perikanan13. Program pengembangan usaha hasil perikanan14. Program Peningkatan Produksi Hortikultura



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
		15. Program Peningkatan Produksi Perkebunan 16. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian 17. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 18. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 19. Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak 20. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 21. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 22. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 23. Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar
2	Membangun Industrial Matching Antar Pelaku Industrial Terhadap Pelaku Ekonomi Sektor Unggulan.	24. Program Pendidikan Non Formal 25. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 26. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 27. Program Pembedayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 28. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 29. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 30. Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal 31. Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna 32. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 33. Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 34. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 35. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 36. Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan 37. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan 38. Program pengembangan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan 39. Program peningkatan dan pengembangan usaha mikro 40. Program penumbuhan wirausaha baru 41. Program Stabilisasi Harga dan Komoditas Perdagangan
3	Inovasi Intensifikasi Pos-pos Pendapatan Asli Daerah Berbasis Teknologi.	42. Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pelayanan Keluhan Masyarakat 43. Program Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 44. Program Ekstensifikasi Pajak Daerah 45. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 46. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
4	Peningkatan Infrastruktur Industri dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah"	48. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 49. Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah 50. Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 51. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 52. Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah 53. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 54. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 55. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan 56. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 57. Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan 58. Program Peningkatan Mutu dan Akses Layanan 59. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
		Sakit 60. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 61. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 62. Program pembangunan jalan dan jembatan 63. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah 64. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 65. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 66. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 67. Program Pengembangan Kab Layak Anak 68. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 69. Program pengembangan pemasaran pariwisata 70. Program Pengembangan Kemitraan 71. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 72. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 73. Program Pengembangan Nilai Budaya 74. Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan 75. Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 76. Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan
5	Peningkatan Pelayanan Publik dan SDM berkualitas dan berdaya saing	77. Program Penataan Administrasi Kependudukan 78. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pada Wilayah I, II, III, IV 79. Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 80. Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Aduan Masyarakat dan Konsultasi 81. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah 82. Program Pembinaan dan pengembangan organisasi 83. Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah 84. Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan 85. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 86. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum 87. Program penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi public 88. Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 89. Program peningkatan infrastruktur, pengendalian energi dan Sumber Daya Alam 90. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan 91. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 92. Penataan Peraturan Perundang-Undangan 93. Program Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan 94. Program Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 95. Program Pengelolaan dan Layanan Arsip 96. Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 97. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 98. Program Pengembangan Perumahan 99. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100. Program Tanggap Darurat 101. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 102. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan 103. Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
		104. Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 105. Program Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika 106. Program Implementasi dan Pengembangan E-Government 107. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 108. Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 109. Pendidikan Politik Masyarakat 110. Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan 111. Program Pembinaan Aparatur 112. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur 113. Program Pengembangan Karier

Sumber : RPJMD 2017-2022

4.4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2021

Pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Sinkronisasi prioritas pembangunan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah Tahun 2021

Nasional	Daerah	Provinsi
Tema : Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Tema : Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, dan Kepariwisata terhadap Pendapatan Daerah	Tema : Pengembangan Agro Industri Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
Prioritas Pembangunan:		
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Industri dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pemerataan Infrastruktur Wilayah Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Inovasi Intensifikasi Pos-pos Pendapatan Asli Daerah Berbasis Teknologi Peningkatan Nilai Investasi Terhadap Sektor Unggulan	Pengelolaan Industri Pariwisata Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Peningkatan Pendapatan Masyarakat Stabilitas Ekonomi Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik dan SDM berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas



Nasional	Daerah	Provinsi
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Membangun Industrial Maching Antar Pelaku Industrial Terhadap Pelaku Ekonomi Sektor Unggulan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai

Sumber : RKP Nasional 2021, Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah, RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022

4.5 Penanganan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Beberapa isu strategis daerah juga menjadi isu strategis di tingkat pusat, sehingga merupakan permasalahan penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memerlukan perhatian dalam penanganannya. Beberapa program yang dijalankan oleh beberapa SKPD sebagai langkah penanganan permasalahan pembangunan diantaranya :

1. Rencana Penanganan Permasalahan Pernikahan dini (atau usia dibawah 18 tahun), Stunting dan Kemiskinan.

Tabel 4.4
Penanganan Permasalahan Pernikahan dini (atau usia dibawah 18 tahun), Stunting dan Kemiskinan

Permasalahan	SKPD	Program	Kegiatan
STUNTING	DINAS KESEHATAN	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
	RSUD	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Kegiatan Pembangunan rumah sakit Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD
		DINAS KETAHANAN PANGAN	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
	DINAS TPHP	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan
	DINAS PERIKANAN	Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	Kegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan
	DINAS PUPR	Program Pembangunan Infrastruktur Pemukiman	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan



Permasalahan	SKPD	Program	Kegiatan
			Pengembangan Distribusi Air Minum
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
	DINAS PERKIM	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Perumahan
		Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan data dan informasi PAUD Publikasi dan Sosialisasi PAUD
	DINAS SOSIAL	Program Jaminan Kesehatan Nasional	Kegiatan JKN
		Program perlindungan dan jaminan Sosial Keluarga Harapan (PKH)	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kegiatan KPM PKH
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kegiatan Pengelolaan Bantuan Kebutuhan Dasar dan Rekomendasi Jaminan Sosial Serta Penataan Lingkungan Bagi Fakir Miskin Kegiatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan Pemutakhiran Data PMKS Lainnya
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Pemberdayaan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Kegiatan Pelatihan Posyandu
			Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kegiatan Pengelolaan Konten Media Publik



Permasalahan	SKPD	Program	Kegiatan
		Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengembangan Layanan Hubungan Komunikasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
KEMISKINAN	DINAS KESEHATAN	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Jaminan Pelayanan Kesehatan (JKN)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Indonesia Pintar (PIP)	Kartu Indonesia Pintar (SD)
			Kartu Indonesia Pintar (SMP)
		Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan pakaian seragam sekolah
			Penyediaan beasiswa berprestasi
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan pakaian seragam sekolah	
		Penyediaan beasiswa berprestasi	
	RSUD	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu
	DINAS PERIKANAN	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan
		Program Perikanan Budidaya	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Kelompok Perikanan
	DINAS SOSIAL	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
		Program Pembinaan Anak terlantar	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		Pendayagunaan Para penyandang cacat dan eks trauma	
Program Keluarga Harapan (PKH)		Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	



Permasalahan	SKPD	Program	Kegiatan
	DINAS PUPR	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
		Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan Sarana dan Prsarana Air Bersih Perdesaan
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
	DINAS TPHP	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Kegiatan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan
			Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan
		Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Kegiatan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura
		Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Kegiatan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan
			Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan
		Program Peningkatan Sarpas dan Penyuluhan Pertanian	Kegiatan Pengembangan lahan dan tataguna air pertanian
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Pemberdayaan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pelatihan Posyandu
			Peningkatan Kapasitas P3MD
			Pendataan Indeks Desa Membangun
		Program pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Pengembangan potensi sumber daya alam di perdesaan
			Pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna
Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal		Permodalan bagi LKM dan UMKM di Perdesaan	
	Kemitraan usaha swasta dan UMKM di perdesaan		
	Tata Kelola Manajemen BUMDes dan BUMDesa Bersama		



Permasalahan	SKPD	Program	Kegiatan	
	DINAS KETAHANAN PANGAN	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Pemantauan ketersediaan dan analisis neraca bahan makanan	
			Pemanatauan kerawanan dan penguatan sistem kewaspadaan pangan	
			Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
				Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial
				Penyelesaian prosedur perlindungan hukum jaminan sosial
				Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

2. Rencana Optimalisasi Penggunaan Sisa Dana Bagi Hasil

Tabel 4.5
Rencana Optimalisasi Penggunaan Sisa Dana Bagi Hasil

Permasalahan	SKPD	Program	Kegiatan
Optimalisasi DBH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program Penanaman Pohon Pada Lahan Di Luar Kawasan	Pembibitan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pada Lahan di Luar Kawasan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Perencanaan Strategis dan Ketatausahaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Penaksiran Kerugian
	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan



Permasalahan	SKPD	Program	Kegiatan
			Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
			Pembentukan/Pembinaan Masyarakat Peduli Api
			Patroli Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
			Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan
			Peningkatan Koordinasi melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja
			Kampanye Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Sekolah
			Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan
			Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Kabupaten
			Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

3. Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif, Ketahanan pangan dan UMKM

Upaya pengembangan ekonomi kreatif, ketahanan pangan dan UMKM merupakan salah satu langkah pemulihan dampak pandemi Covid-19, yang dampaknya tidak hanya memukul bidang kesehatan, namun juga memukul sektor ekonomi riil serta tatanan sosial masyarakat. Upaya-upaya dalam mengembangkan ekonomi kreatif, meningkatkan ketahanan pangan dan pembinaan UMKM akan dilaksanakan melalui nomenklatur program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.6

Inovasi Program Permasalahan Optimalisasi Ekonomi Kreatif, Ketahanan pangan dan UMKM

Permasalahan	SKPD	Program	Kegiatan
Optimalisasi Ekonomi kreatif, Ketahanan pangan dan UMKM	DINAS PARIWISATA	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pembinaan Event Kreativitas
			Pembinaan Ekonomi Kreatif
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif



Permasalahan	SKPD	Program	Kegiatan
	DINAS KETAHANAN PANGAN	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pengembangan cadangan pangan daerah
			Pengembangan Lumbung Pangan
			Penguatan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan
		Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Analisis dan Penyusunan Pola konsumsi
			Diversifikasi Pangan dan pengembangan pangan pokok lokal
			Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
			Promosi Potensi Pangan Daerah
		Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Pemantauan Harga Pangan dan Pasokan Pangan
			Penyediaan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan Daerah
		Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Pemantauan Ketersediaan dan Analisis Neraca Bahan Pangan
			Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
	Pemantauan Kerawanan dan Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi		
	DINAS PERINDAGKOP UKM	Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
			Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro
Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri		Peningkatan Kualitas, Kompetensi manajerial SDM Usaha Mikro	
		Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Kelompok Usaha Mikro	
		Pengembangan Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro	
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah		Pemetaan dan Pemutakhiran data IKM	
		Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Kotawaringin Barat	
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah		Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM	
		Pengembangan Teknologi Produksi IKM	
	Pengembangan promosi produk IKM		



Permasalahan	SKPD	Program	Kegiatan
		Program perlindungan HKI dan standardisasi Industri	Standardisasi industri Diseminasi Perluasan Penerapan Standardisasi Industri

4. Penanganan Infrastruktur Dasar Permukiman (Pembangunan Perumahan Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi)

Sejalan dengan upaya pengembangan ekonomi kreatif, ketahanan pangan dan UMKM sebagai langkah pemulihan dampak pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi, dilakukan juga upaya perbaikan derajat kesehatan masyarakat dengan langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar lingkungan untuk mendukung hidup bersih dan sehat, seperti sarana prasarana air bersih dan sanitasi.

Upaya-upaya tersebut akan dilaksanakan melalui nomenklatur program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Penanganan Infrastruktur Dasar Permukiman (Pembangunan Perumahan Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi)

Permasalahan	SKPD	Program	Kegiatan
Pembangunan Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah	DINAS KESEHATAN	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
			Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
			Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
			Pembinaan UKBM
			Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh Kesehatan
			Pengembangan Lingkungan Sehat
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
			Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
			Peningkatan dan Pembinaan Penanganan B3 dan Limbah B3
	DINAS PUPR	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Pengembangan distribusi air minum



Permasalahan	SKPD	Program	Kegiatan
		dan Air Limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
	DINAS PERKIM	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman
			Pengendalian dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman
			Perencanaan Pendataan Kawasan Permukiman

4.6 Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, setiap tahunnya berupaya melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas hasil pembangunan. Berbagai inovasi telah dimulai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2020. Beberapa inovasi yang masih dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Kotawaringin Barat telah diinventarisir di Aplikasi Sistem Indeks Inovasi Daerah (SIID) sebagai dasar pengukuran Indeks Inovasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sejak tahun 2019, melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat, telah ditampilkan beberapa inovasi OPD. Menyesuaikan tema baru Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dalam menyikapi bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka inovasi yang ditampilkan dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah inovasi yang menunjang pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Sampai dengan tahun 2020, inovasi yang telah dihimpun dan diharapkan dapat memulihkan perekonomian dan reformasi sosial masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Batik (Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi Batako)
2. Gerakan Sumaga (Susu Mama Dijaga)
3. Krupuk Amplang Syarifah Salmah, Dijual Secara Online dan Melalui Ritel Modern
4. Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG): 30 PK (Paard Kracht), Mesin Penghancur Limbah Sabut Kelapa Menjadi Cocopeat
5. Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG): Asir (Pirolisator Alat Liquid Smoke)
6. Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG): Kiambak
7. Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG): Peningkatan Produktivitas Usaha Budidaya Jamur Tiram
8. Pelayanan Usaha Peternakan Kolektif Berjamaah (Salekah)
9. Pengembangan Kopi Liberika “KBA”, dan
10. Si Lobih (Sistem Layanan Online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB).



Dari daftar inovasi di atas, akan diuraikan 2 (dua) inovasi, yaitu:

1. “Pelayanan Usaha Peternakan Kolektif Berjamaah (Salekah)” oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinas PKH) Kabupaten Kotawaringin Barat dan
2. “Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG): 30 PK (Paard Kracht), Mesin Penghancur Limbah Sabut Kelapa Menjadi ” oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

I. PELAYANAN USAHA PETERNAKAN KOLEKTIF BERJAMAAH (SALEKAH)

A. Latar Belakang

Pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan aspek penting dalam kerangka kerja Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelayanan tersebut merupakan representasi dan manivestasi Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang secara operasional telah digariskan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan.

B. Ideation (Gagasan Utama)

Pendekatan pengembangan peternakan berbasis kawasan, penguatan kelembagaan dalam bentuk usaha kolektif berjamaah yang kemudian dimaknai sebagai wujud korporasi peternak berikut pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola komponen utama sumber daya peternakan (peternak, ternak, dan sumber daya alam) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan peternakan di daerah maupun nasional. Pentingnya pendekatan konsepsi ini kian terasa dalam mengembangkan kerangka kerja pelayanan publik di tengah bencana non alam Covid-19 yang memerlukan cara baru dan pendekatan baru dalam menjalankan berbagai aspek pelayanan publik.

Pengembangan komponen utama tersebut difokuskan dalam kawasan tertentu melalui pembangunan infrastruktur bagi semua pelaku usaha dan pembangunan fasilitas bersama bagi usaha kolektif berjamaah disertai pembentukan jejaring Sekolah Peternakan Rakyat (SPR). SPR telah dirintis sejak tahun 2017 dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan, diatur tata hubungan dan kemitraan antara pelaku usaha/bisnis dan industri peternakan termasuk untuk komoditas sapi potong sebagai sebuah bisnis peternakan.

C. Strategi Pengembangan

Uji coba inovasi daerah dalam mewujudkan usaha kolektif berjamaah di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan wilayah kecamatan yang menjadi lokasi laboratorium uji coba, yaitu di Kecamatan Pangkalan Lada. Uji coba tersebut sejalan dengan kajian akademis yang merekomendasikan pengembangan SPR yang cocok dengan kondisi usaha



peternakan di Kalimantan Tengah, yang sangat berbeda dengan kondisi usaha peternakan rakyat di wilayah padat ternak di Pulau Jawa. Kajian akademis tentang pendekatan kelembagaan pengembangan usaha kolektif berjamaah tersebut guna terjamin implementasinya dalam rangka praktek pemerintah daerah dalam pengembangan peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Secara umum pentahapannya sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan konsep, aturan, dan kelembagaan jejaring.
 - a. Mengenali data dan fakta tentang berbagai aspek peternakan yang dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Lada. Tahap penjarangan ini dilakukan melalui proses rembug tingkat desa yang selanjutnya mengerucut kepada pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan dan
 - b. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk kajian konsep pengembangan kawasan dan penyusunan naskah akademis Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan guna mengakselerasi prosesnya dan menyediakan kerangka konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
 - c. Mengidentifikasi Kawasan Peternakan potensial dengan pendekatan SPR dan Kawasan Perdesaan,
 - d. Menetapkan Kawasan Peternakan paling potensial di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan
 - e. Menyusun Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan yang paling potensial secara partisipatif.
2. Tahap pengukuhan kelembagaan dan perangkat regulasi.
 - a. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 17 Tahun 2019, tanggal: 25 Oktober 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan, dan
 - b. Penetapan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 800.9/1126/PKH.4 Tahun 2019, tanggal: 22 Agustus 2019 tentang Penetapan Kawasan Sentra Bisnis Kolektif Peternakan Rakyat Di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tahapan ini merupakan momentum deklarasi akan manifestasi kelembagaan manajemen kawasan berikut perangkat suprastrukturnya. Hal ini guna memastikan agar usaha kolektif berjamaah berjalan baik sebagai mitra kerja Dinas PKH.
3. Tahap Implementasi sebagai tahap yang berjalan dinamis dengan tahap tahap sebelumnya.

Implementasi inovasi daerah usaha kolektif berjamaah dapat ditemukannya dari beberapa aspek:

 - a. Perencanaan, anggaran, dan indikator kinerjanya,
 - b. Praktek penyelenggaraan pelayanan publik, dan
 - c. Penyelenggaraan event (dalam hal untuk menunjukan dan menandai aspek tertentu dari inovasi) melalui Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat maupun mitra kerja (perguruan tinggi dan pihak lainnya).



Konsep dan Desain Penyelenggaraan Peternakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rancangan Inovasi Daerah yang tertuang menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan yang memuat tentang pengelolaan sumber daya peternakan yang terdiri dari ternak, peternak, dan sumber daya alam (SDA) yang dikelola di kawasan melalui penyediaan infrastruktur untuk semua pelaku usaha dan penyediaan fasilitas bersama oleh pemerintah untuk usaha kolektif berjamaah di kawasan yang telah direncanakan.
- b. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) peternak dan kelembagaan peternak menjadi sebuah jejaring usaha kolektif berjamaah untuk semua komoditas peternakan. Hal ini merupakan salah satu upaya mengelola SDM peternak dan kelembagaannya dengan mengacu kepada Hasil Studi Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Kegiatan Studi Pendahuluan Penyusunan Master Plan Kawasan Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kajian oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PSP3 LPPM) IPB merupakan kajian dengan pendekatan perspektif kawasan. Pendekatan pembangunan dan pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan landasan pemikiran (theoretical framework) yang dikonstruksikan melalui sinergitas pendekatan “Sentra Usaha Kolektif Peternakan Rakyat (SUKPR)” dan “Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)”. SUKPR dengan SPR-nya berfokus pada “transformasi sosial dan teknologi”, sedangkan pembangunan kawasan perdesaan berfokus “pengembangan wilayah dan kelembagaan ekonomi dan bisnis” pada suatu kawasan peternakan (aras mikro) dan outcome-nya meningkatkan taraf hidup peternak dan masyarakat perdesaan serta pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di bidang Peternakan.

2. Sasaran

- a. Peningkatan pelayanan publik dengan mengelola aspek utama (peternak, ternak, dan sumber daya alam) melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas bersama di kawasan pengembangan peternakan,
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan, penganggaran, dan pelaksanaan Sekolah Lapang Peternakan Rakyat (SLPR),
- c. Peningkatan daya saing daerah melalui penyelenggaraan peternakan,



- d. Teridentifikasinya kawasan peternakan potensial dengan pendekatan SUKPR dan kawasan perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat,
- e. Ditetapkannya kawasan peternakan paling potensial di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan
- f. Tersusunnya Rencana Pembangunan Kawasan Peternakan pada kawasan paling potensial di Kabupaten Kotawaringin Barat.

E. Manfaat/Dampak Inovasi

- 1. Peternak selaku pemilik usaha kolektif berjamaah:
 - a. Kemudahan mendapat pelayanan sesuai bidang teknis,
 - b. Kemudahan akses informasi dan pemenuhan sarana produksi dan pemasaran produk,
 - c. Keuntungan finansial dari usaha kolektif yang dijalankan, dan
 - d. Posisi tawar peternak sebagai individu pemilik usaha kolektif terhadap pihak lainnya.
- 2. Perusahaan Perorangan:
 - a. Kejelasan posisi, fungsi, tugas, dan kewajiban serta peran dalam menjalankan usaha peternakan di kabupaten Kotawaringin barat (kepastian usaha) dan
 - b. Memiliki mitra kerja yang sepadan dalam berusaha/interaksi usaha.
- 3. Pemerintah Daerah:
 - a. Efektivitas perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan terhadap OPD,
 - b. Operasional pelayanan sesuai bidang teknis,
 - c. Kualitas pelayanan publik, dan
 - d. Menghemat belanja daerah.

F. Implementasi (Uji Coba Rancangan)

- 1. Implementasi tahun 2018 dan tahun 2019.
 - a. Pelaksanaan konsep Penyelenggaraan Peternakan dengan pendekatan usaha kolektif berjamaah, meliputi hal-hal berikut:
 - 1) Penyusunan perangkat aturan pelaksanaan yang menggambarkan arah kebijakan teknis Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat,
 - 2) Dokumen pelaksanaan anggaran yang terkait aktivitas di kawasan SPR pada masing masing bidang yang menggambarkan kinerja pelayanan Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat di kawasan SPR melalui anggaran program dan kegiatan selama tahun 2018 dan tahun 2019, dan
 - 3) Dokumentasi visual (gambar dan film) yang merekam secara visual berbagai aktivitas di kawasan SPR yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka implementasi bisnis kolektif berjamaah.



- b. Fokus dokumentasi diarahkan ke lokasi laboratorium Uji coba konsep, yaitu di Kecamatan Pangkalan Lada.
 - c. SPR Berkat Bersama merupakan model usaha kolektif berjamaah yang berada di wilayah Uji coba yang meliputi 11 (sebelas) desa di Kecamatan Pangkalan Lada dan memiliki kepengurusan dalam bentuk Dewan Perwakilan Pemilik Ternak (DPPT) di masing-masing desa dan sudah dideklarasikan pembentukan oleh Bupati Kotawaringin Barat dan sedang menjalankan bisnis kolektif berjamaah di kawasan wilayah Kecamatan Pangkalan Lada.
2. Implementasi tahun 2020 dan rencana ke depan dalam rangka pengembangan inovasi.
- a. Merupakan rencana implementasi konsep Penyelenggaraan Peternakan dengan pendekatan Usaha kolektif berjamaah selama tahun 2020 dan jangka waktu ke depan yang meliputi:
 - 1) Penyusunan perangkat aturan pelaksanaan yang akan digariskan sebagai arah kebijakan teknis Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat dan
 - 2) Dokumen pelaksanaan anggaran yang terkait aktivitas di kawasan SPR pada masing masing bidang yang menggambarkan kinerja pelayanan Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat di kawasan SPR melalui anggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 dan ke depan sesuai pemetaan program dan kegiatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 90 Tahun 2019.
 - b. Fokus implementasi selama tahun 2020 diarahkan ke lokasi laboratorium Uji coba konsep, yaitu di Kecamatan Pangkalan Lada sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

G. Proses Pelaksanaan Inovasi

Bencana non alam Pandemi Covid-19 berdampak pada multi aspek dan sektor, termasuk pada sektor pertanian dalam arti luas. Kondisi ini berdampak pula pada usaha dan pelayanan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Beberapa poin pengaturan inovasi ke arah dimaksud dapat direpresentasikan antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan rantai pasok, khususnya pada bisnis ternak diarahkan antara lain dengan memangkas rantai tata niaga guna memberikan margin tata niaga kepada usaha kolektif berjamaah yang sebelumnya merupakan domain tengkulak. Era tatanan normal baru akan membatasi gerak bakul ternak di lapangan karena faktor resiko penularan. Di sisi lain, pengawasan yang makin ketat dalam rangka lalu lintas ternak menyebabkan hambatan tersendiri untuk memasukan ternak dari luar daerah. Bisnis ternak dalam konsep usaha kolektif berjamaah prinsipnya adalah menghindari pasar fisik dan bisnis berjalan melalui jejaring SPR dengan kolaborasi peternak, manajer



SPR, dan Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan tersebut tercermin dari kegiatan Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari raya keagamaan di saat pandemi Covid-19 (Idul Fitri dan Idul Adha) yang bisa dijalankan dengan protokol kesehatan dengan memberdayakan SPR dan memberi manfaat kepada peternak,

2. Deklarasi SPR pada tahun 2020 yang sebelumnya dirancang dengan kerumunan peternak dan stakeholder lainnya sekitar 100 (seratus) orang melalui teknologi akan dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan terbukti masih akan dilaksanakan setelah refocusing terakhir,
3. Pelayanan teknis OPD melalui berbagai bidang tetap bisa dijalankan dengan efektif dan efisien dengan melibatkan kelembagaan SPR di kawasan di tengah keterbatasan anggaran Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat, dan
4. Rancangan aplikasi register peternak ke depan akan membenangmerahi aktivitas Dinas PKH Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelenggarakan pelayanan dan regulasinya.

II. INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG): MESIN CHOPPER 30 PK (PAARD KRACHT), MESIN PENGHANCUR LIMBAH SABUT KELAPA MENJADI COCOPEAT

A. Latar Belakang

Desa Pangkalan Durin berada di Kecamatan Pangkalan Lada. Jarak antara Desa Pangkalan Durin dengan Ibukota Kecamatan (Desa Pandu Senjaya) adalah 15,2 km dan jarak antara Desa Pangkalan Durin dengan Ibukota Kabupaten (Pangkalan Bun) adalah 26,1 km. Desa Pangkalan Durin merupakan salah satu desa penghasil buah kelapa. Sebagian besar masyarakatnya mempunyai usaha tani kelapa. Hal ini dipertegas dengan adanya proses pengolahan buah kelapa yang konvensional dan masih dilakukan hingga saat ini.

Pengolahan buah kelapa yang konvensional menyisakan sabut kelapa yang menumpuk. Sabut kelapa adalah bahan berserat yang ditemukan di antara kulit bagian dalam yang keras dan lapisan luar kelapa. Terkadang sabut kelapa digunakan sebagai pengganti kayu bakar, yaitu sebagai media pengasapan. Namun, sabut dari kelapa muda akan dibuang dan menjadi ongkongan sampah hingga membusuk atau kering. Jika ongkongan sabut kelapa ini bertambah banyak, maka dapat menjadi limbah. Limbah sabut kelapa yang tidak dikelola secara benar, dapat menyebabkan terjadinya pencemaran bagi lingkungan.

B. Ideation (Gagasan Utama)

Limbah sabut kelapa dapat diolah menjadi barang atau benda yang dapat dijual sehingga akan memberikan nilai ekonomis atau peluang usaha sampingan. Seiring perkembangan teknologi dan gaya hidup, pemanfaatan sabut kelapa semakin bervariasi. Limbah sabut kelapa dapat diolah menjadi sapu ijuk, keset serabut kelapa, tali, Cocomes



(Jaring sabut kelapa), Coco Coir (media tanam yang berasal dari sabut kelapa), dan Cocopeat.

Cocopeat memiliki bentuk dan tekstur halus, menyerupai serbuk kayu, dan digunakan sebagai media tanam karena bersifat dapat menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk, serta dapat menetralkan keasaman tanah. Cocopeat berguna untuk budidaya tanaman lewat pembuatan pupuk organik. Sifat fisika-kimia pada Cocopeat dapat menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk, serta dapat menetralkan keasaman tanah menjadikan hasil samping. Cocopeat digunakan sebagai media pertumbuhan tanaman hortikultur, tanaman rumah kaca, atau dijadikan pot untuk tanaman hias.

Langkah yang diambil oleh masyarakat Desa Pangkalan Durin dalam pengurangan limbah sabut kelapa, yaitu melakukan daur ulang sabut kelapa menjadi Cocopeat sehingga dapat digunakan sebagai pupuk media tanam bagi masyarakat lokal untuk tanaman palawija, kelapa sawit, dan cabai. Melihat potensi tersebut, Inovator Desa Pangkalan Durin merasa perlu adanya penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk memudahkan, mempercepat, dan memperbanyak produksi Cocopeat sehingga tercipta industri rumah tangga yang berbasis teknologi dan ramah terhadap lingkungan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Strategi Pengembangan

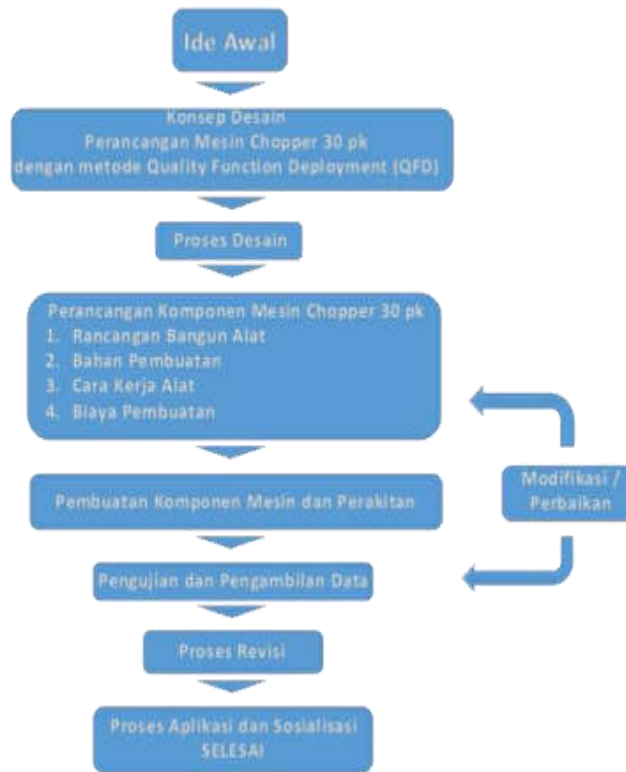
Pada tanggal 09 April 2017, Inovator Desa Pangkalan Durin bersama pemuda Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) di Desa Pangkalan Durin, didukung Pemerintah Desa Pangkalan Durin, dan didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat mengembangkan suatu mesin yang disebut Chopper 30 PK melalui penerapan TTG. Berikut strategi pengembangan Mesin Chopper 30 PK :

1. Rancang Bangun Mesin Chopper 30 PK

Mesin Chopper 30 PK dirangkai sedemikian rupa dan sesederhana mungkin sehingga masyarakat mudah membuat, menggunakan, dan merawatnya, serta mempunyai ciri khas tentu sangat berbeda dengan mesin pabrikan yang lainnya. Mesin ini dibuat untuk memisahkan sabut dari kelapanya dengan cara memutar as roll yang sudah terhubung dengan pulley yang digerakan oleh motor listrik dan transfer oleh V-belt. Pada gambar 1, dijelaskan proses Rancang Bangun Mesin Chopper 30 PK.



Gambar 4.1
Rancang Bangun Mesin Chopper 30 PK



2. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan Mesin Chopper 30 PK

Biaya pembuatan mesin dapat ditekan sekecil mungkin karena banyak menggunakan barang bekas layak pakai yang ada di sekitar Desa Pangkalan Durin. Dari hasil di bawah ini (Tabel 1), diketahui biaya yang dihabiskan adalah Rp. 11.735.000,-. Biaya termahal adalah pembelian Mesin Dompeng 30 PK karena harus membeli mesin baru.

Tabel 4.8
Biaya Pembuatan Mesin Chopper 30 PK

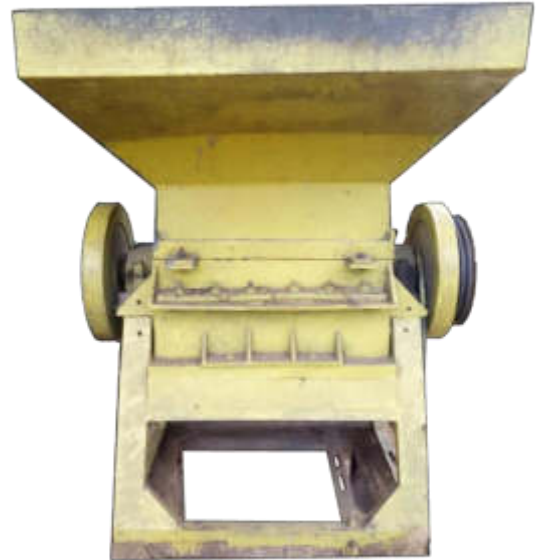
No.	Spesifikasi	Satuan	Biaya Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Besi Plat 10 mm	2 lembar	300.000,-	600.000,-
2	Besi Kanal U 10 X 5	1 Lembar	200.000,-	200.000,-
3	Besi Kanal U 7 X 5	2 batang	150.000,-	300.000,-
4	Besi Kanal L 7 X 5	1 buah	110.000,-	110.000,-
5	Besi As 7 cm	1 batang	150.000,-	150.000,-
6	Bearing Duduk	1 buah	200.000,-	200.000,-
7	Pisau dari Per Mobil	3 buah	170.000,-	510.000,-
8	Roda Gila	2 buah	150.000,-	300.000,-
9	Pulley 30 cm	2 buah	110.000,-	220.000,-
10	Tali Panbel	1 buah	50.000,-	50.000,-
11	Cat Warna	1 Kg	60.000,-	60.000,-
12	Minyak Cat	1 Liter	35.000,-	35.000,-
13	Mesin Dompeng 30 PK	1 Unit	5.000.000,-	5.000.000,-
14	Pengelasan dan Perakitan	1 Unit	4.000.000,-	4.000.000,-
			Total (Rp.)	11.735.000,-



Gambar 4.2
Mesin Chopper 30 PK (Tampak Muka)



Gambar 4.3
Mesin Chopper 30 PK (Tampak Belakang)



Gambar 4.4
Mesin Chopper 30 PK (Tampak Samping)



3. Spesifikasi Mesin Chopper 30 PK

Tabel 4.9
Spesifikasi Mesin Chopper 30 PK

No.	Spesifikasi	Keterangan
1	Type	Horizontal Chopper
2	Kapasitas	200 – 300 Kg/Jam (Continous)
3	Rangka	Besi
4	Body	Plat Mill Stel
5	Jumlah Pisau	8 (Delapan) Pieces
6	Transmisi	Pulley, V-Belt
7	Penggerak	Mesin Dompok 30 PK (Power Kuda)
8	Dimensi	130 cm x 90 cm x 85 cm



4. Biaya Produksi Pengolahan Cocopeat Melalui Mesin Chopper 30 PK

Tabel 4.10
Biaya Produksi Mesin Chopper 30 PK di dalam pengolahan Cocopeat

Item	Unit	Rp. / unit	Biaya (Rp.)
Fiber Buah Kelapa	210 Kg	100	21.000,-
Solar	1 Liter	10.000	10.000,-
Karung Plastik	1 Lembar/50 Kg	500	500,-
Upah Kerja	Orang	1 Jam	50.000,-
Total (Rp.)			81.500,-

Dengan demikian, diketahui bahwa biaya produksi untuk sabut kelapa sebanyak 210 kg adalah sebesar Rp. 81.500,-. Estimasi Cocopeat jika dijual adalah dengan harga sebesar Rp. 50.000,- per 20 kg. Estimasi harga Cocopeat ini didasarkan pada bahan baku siap pakai oleh home industry atau skala industri.

Gambar 4.5
Mesin Chopper 30 PK (Tampak Atas)



D. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembuatan mesin Chopper 30 PK ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pencacahan serbuk, tidak hanya dari bahan sabut kelapa tetapi dapat berupa benda berbahan plastik.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Cocopeat dan mesin Chopper 30 PK.

3. Dari aspek teknologi, konstruksi mesin Chopper 30 PK menggunakan pendekatan ergonomi partisipatori, sehingga pengolahan serat sabut kelapa relatif sederhana yang dapat dilaksanakan oleh usaha-usaha kecil.

Sasaran pembuatan mesin Chopper 30 PK adalah masyarakat Desa Pangkalan Durin dapat mengolah sabut kelapa menjadi nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat diolah oleh pengusaha kecil (lokal).

E. Manfaat/Dampak Inovasi

Pembuatan media tanam dengan menggunakan mesin memiliki keunggulan diantaranya adalah lebih ramah lingkungan dan proses pengerjaan lebih cepat. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan mesin Chopper 30 PK dapat meningkatkan produktivitas sabut kelapa sebesar 50% dari proses produksi dengan cara tradisional. Selain itu, dapat meminimalisir waktu pengerjaan, dari 2 (dua) hari menjadi 1 (satu) hari. Putaran as roll yang maksimal adalah yang menggunakan putaran 400 rpm, maka akan menghasilkan serat kelapa 82% dan Cocopeat 28% serta panjang serat 34 cm.

Cocopeat yang berasal dari sabut kelapa berkontribusi sebesar 42% dalam pengurangan limbah sabut kelapa. Fungsi dari Cocopeat ini tidak hanya bagus untuk media tanamnya saja, tetapi juga bagus untuk perkembangan tanaman. Berikut manfaat Cocopeat bagi tanaman:

1. Aman bagi lingkungan karena terbuat dari bahan alami.
2. Memiliki tekstur yang memudahkan pertukaran oksigen di dalam tanah sehingga dapat menyuburkan tanaman.
3. Dapat digunakan berkali-kali karena sifatnya yang awet dan dapat digunakan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun lamanya.
4. Berfungsi sebagai anti bakteri dan anti jamur karena mengandung sejenis jamur fungi yang sangat menguntungkan bagi tanaman.
5. Dalam batas tertentu bisa digunakan untuk makanan ternak dan itik.

Mesin Chopper 30 PK merupakan produk multifungsi yang dihasilkan dari pengolahan bahan sederhana yang ada di sekitarnya sehingga lebih aman digunakan dengan pengolahan yang lebih sederhana dengan biaya yang lebih murah di bandingkan produk industri.

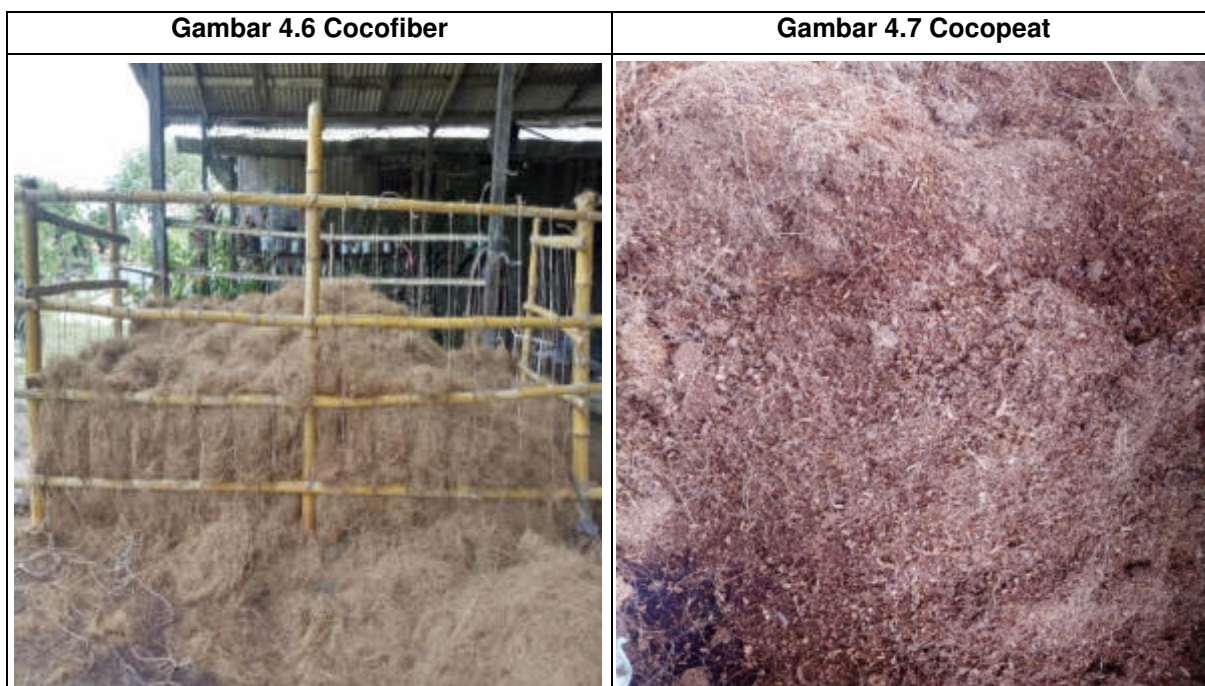
F. Implementasi (Uji Coba Rancangan)

Target utama penjualan olahan Cocopeat melalui mesin Chopper 30 PK adalah perusahaan dalam dan luar Kalimantan Tengah, agar bisa mengganti pupuk dari berbahan kimia menjadi Cocopeat, terutama perusahaan kelapa sawit dan bubuk kertas dari akasia. Melalui beberapa kali renovasi, diharapkan hasil dan ketahanan mesin menjadi lebih maksimal.



G. Proses Pelaksanaan Inovasi

Proses pengolahan serat sabut kelapa menjadi produk samping atau turunan berupa Cocopeat tidaklah terlalu sulit, yakni memproses sabut kelapa menjadi serbuk halus dengan cara digiling menggunakan mesin. Kemudian sabut yang sudah halus (sudah menjadi serbuk) dicuci terlebih dahulu sebelum dijemur di bawah terik matahari hingga menjadi kering atau Cocopeat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar garam dalam sabut.



Untuk pemasaran produk saat ini sudah dipasarkan hingga ke kabupaten tetangga yaitu Lamandau dan Sukamara, dipasarkan oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat, instansi daerah dan masyarakat secara umum. Berikut adalah contoh produk yang dipasarkan.

Gambar 4.8
Contoh produk dari hasil turunan pot bunga





**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**



Bab 5

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Berdasarkan prioritas pembangunan yang dijabarkan pada 38 (tiga puluh delapan) urusan yang terdiri atas:

1. **6 (Enam) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**, meliputi urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
2. **17 (Tujuh belas) urusan wajib non pelayanan dasar**, meliputi urusan Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal Daerah; Kepemudaan dan Olah Raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; dan Perpustakaan.
3. **8 (Delapan) urusan pilihan**, yaitu Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi; dan Kearsipan.
4. **7 (Tujuh) fungsi penunjang urusan**, yaitu Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan; Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan; Pengawasan; Keuangan; dan Administrasi Pemerintahan.

5.1. Analisa Pendanaan Program dan Kegiatan Daerah

Bagian ini memuat rincian rencana kerja beserta rencana pendanaannya, yang merupakan penjabaran dari prioritas dan arah kebijakan pembangunan pada Bab sebelumnya. Rencana kerja beserta pendanaannya diuraikan menurut perangkat daerah sesuai dengan sasaran yang diampu dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022. Berikut adalah rekapitulasi rencana pendanaan pembangunan daerah, sementara rinciannya dituangkan dalam lampiran.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung PD Tahun 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH PAGU (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Pendidikan	12	103.792.549.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	10	124.613.759.400	DINAS KESEHATAN
		7	159.398.467.400	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	174.534.951.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	7.354.808.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	10	5.790.877.500	Satpol PP Damkar
		8	4.524.178.000	BPBD
		10	1.275.000.000	Badan Kesbangpol Kobar
6	Sosial	12	3.439.137.800	Dinas Sosial
7	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	2.421.839.000	DISDUKCAPIL
8	Penanaman Modal	9	1.338.277.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	3.338.144.000	DPMD
10	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	14	1.116.418.800	DP3AP2KB
11	Keluarga Berencana	5	3.362.034.200	DP3AP2KB
12	Kepemudaan dan Olahraga	8	3.531.262.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Kebudayaan	3	2.595.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Komunikasi dan Informatika	11	4.793.867.600	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15	Statistika	1	31.887.400	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
16	Persandian	1	30.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17	Perhubungan	11	11.688.941.000	Dinas Perhubungan
18	Lingkungan Hidup	19	12.949.916.000	Lingkungan Hidup
19	Perpustakaan	8	1.509.860.100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Kearsipan	3	45.139.900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Pertanian	11	5.749.823.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		11	7.339.622.000	Dinas TPHP
22	Perikanan	11	10.309.321.000	Dinas Perikanan
23	Pangan	11	1.283.800.000	Dinas Ketahanan Pangan
24	Pariwisata	10	3.050.996.800	Dinas Pariwisata
25	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	3.108.769.700	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah
26	Perdagangan	8	4.313.658.300	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah
27	Perindustrian	3	1.534.572.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH PAGU (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
28	Tenaga kerja	11	3.209.986.080	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
29	Transmigrasi	3	311.954.920	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30	Keuangan	9	3.527.853.000	BAPENDA
		9	4.865.555.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
31	Perencanaan	9	4.132.462.500	BAPPEDA
32	Penelitian dan Pengembangan	1	536.516.500	BAPPEDA
33	Administrasi Pemerintahan	7	9.391.000.000	Sekretariat DPRD
		15	27.904.799.100	Sekretariat Daerah
		8	8.046.200.000	Kecamatan Arut Selatan
		9	1.919.214.000	Kecamatan Arut Utara
		6	745.000.000	Kecamatan Pangkalan Banteng
		8	3.900.000.000	Kecamatan Kotawaringin Lama
		8	4.109.110.000	Kecamatan Kumai
		6	691.392.000	Kecamatan Pangkalan Lada
34	Pertanahan	1	142.563.900	Dinas Perumahan dan Permukiman
35	Pengawasan	13	4.401.222.000	Inspektorat Kabupaten
36	Kepegawaian	8	2.384.555.000	BKPP
37	Pendidikan dan Pelatihan	1	3.332.880.000	BKPP
JUMLAH		420	753.719.143.000	

Sumber : RPJMD 2017-2022

Berdasarkan data pada tabel tersebut adalah sebesar Rp. **771.816.357.553** yang dialokasikan terhadap 38 SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

5.2. Gambaran Konsistensi Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

Dari 420 program yang dilaksanakan oleh 38 SKPD, program tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, yakni:

- Program yang tidak ada dalam RPJMD namun harus dilaksanakan pada RKPD karena alasan tertentu (disajikan pada Tabel 5.2.) dan
- Program dalam RPJMD yang tidak dilaksanakan pada RKPD (disajikan pada Tabel 5.3.).

Konsistensi Jumlah dan Nomenklatur Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 dan RPJMD Periode 2017-2022 disajikan sebagai berikut:



Tabel 5.2.
Program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021
Yang Bukan Bagian dari RPJMD Tahun 2017-2022 (Program-Program Inkonsisten)

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM IN-KONSISTEN RKPD	NAMA PROGRAM IN-KONSISTEN RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET PROGRM/ SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0				
	Kebudayaan						
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	-			
		RSUD Sultan Imanuddin		A. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)	Cakupan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit	%	BLUD
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0	-	-	-	
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	0	-	-	-	
5	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0				
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0				
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	A. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Prosentase Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan	90%	DBH-DR
6	Sosial	Dinas Sosial	0	-			
7	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0	-			
	Transmigrasi		0	-			
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	0				
9	Pengendalian Penduduk Dan KB						



NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM IN-KONSISTEN RKPD	NAMA PROGRAM IN-KONSISTEN RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET PROGRM/ SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	0	-			
11	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	3	A. Program Penanaman Pohon Diluar Kawasan	Terkendalinya Tutupan Hutan	23.126 Batang	DBH DR
				B. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Persentase Tersedianya Dokumen Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan		DBH-DR
12	Adiminstrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Capil	0	-	-	-	
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	-	-	-	
14	Perhubungan	Dinas Perhubungan	0		-	-	
15	Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	0				
16	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	0	-			
17	Perindustrian			-			
18	Perdagangan			-			
19	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	-			
21	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	0	-			
22	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0	-			
	Kearsipan			-			



NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM IN-KONSISTEN RKPD	NAMA PROGRAM IN-KONSISTEN RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET PROGRM/ SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan	0	-			
24	Pariwisata	Dinas Pariwisata	0	-			
25	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	0	-			
		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		-			
26	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	0	-			
		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		-			
		Sekretariat Daerah		-			
27	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD	0	-			
28	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	0	-			
	ESDM			-			
29	Pengawasan	Inspektorat	2	A. Program Peningkatan Pelayanan Publik Atas Pengaduan Masyarakat	Persentase Terlaksananya Kegiatan Saber Pungli	100%	Pelimpahan dari Kesbangpol
				B. Program Inventarisasi Dan Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Telah Ditindaklanjuti Pada Wilayah I -IV	96%	hasil konsultasi dengan kemenpanRB



NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM IN-KONSISTEN RKPD	NAMA PROGRAM IN-KONSISTEN RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET PROGRM/ SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Arut Selatan	2	A.Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan B.Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	-	-	
31		Kecamatan Arut Utara	2	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	-	-	
32		Kecamatan Kumai	2	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	-	-	
33		Kecamatan Kotawaringin Lama	2	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	-	-	
34		Kecamatan Pangkalan Lada	0		-	-	
35		Kecamatan Pangkalan Banteng	0		-	-	
36	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	-			
	Penelitian Dan Pengembangan			-			
37	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	0				
		Badan Pendapatan Daerah		-			
38	Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	0	-			
	Pendidikan Dan Pelatihan			-			

Sumber : Renja SKPD 2021



Tabel 5.3
Program dalam RPJMD Tahun 2017-2022 yang Tidak Dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM YANG TIDAK DIKERJAKAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	3 orang	
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	-	-	-	
3	Kesehatan	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	Program Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat-obatan dan perbekalan medis di rumah sakit	kunjungan	Program ini dalam pelaksanaannya digabung ke Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)
4	Sosial	Dinas Sosial	-	-	-	
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah pindah/purna tugas PNS	orang	-
6	Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	BKPP	-	-	-	-
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
8	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	DP3AP2KB	-	-	-	-
9	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kesbangpol	-	-	-	
10	Kepemudaan dan olah raga	Dispora	Program fasilitas Pindah/purna tugas PNS	Tingkat Fasilitas pindah / purna tugas PNS	1	



No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM YANG TIDAK DIKERJAKAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
11	Pengawas	Inspektorat	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1	-
13	Urusan Komunikasi , Informatika, statistika & Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-
14	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-
15	Pertanahan, ESDM & Administrasi Pemerintahan	Setda	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS			
			Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman			
16	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-
17	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	0,9	Tidak ada kegiatan penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
18	Pertanahan	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-



No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM YANG TIDAK DIKERJAKAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
19	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase pemenuhan layanan Fasilitas pindah/purna Tugas pns	0,9	Tidak ada kegiatan pemulangan pegawai purna tugas/pensiun luar daerah
20	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	BPBD	Program Fasilitas Pindah Purna Tugas PNS	Tingkat Fasilitas pindah/purna tugas PNS	1	
21	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	0,9	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,9	
22	PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitas pindah/purna tugas PNS	0,975	Tidak ada kegiatan pemulangan pegawai purna tugas/pensiun luar daerah
23	Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	1	
24	Pertanian	DINAS TPHP	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Prosentase Pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	90%	
25	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan				
26	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Tidak Ada	-	-	
27	PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	-	-	-	-



No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM YANG TIDAK DIKERJAKAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
28	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Tidak Ada	-	-	
29	PERDAGANGAN		Tidak Ada	-	-	
30	PERINDUSTRIAN		Tidak Ada	-	-	
31	Tenaga kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/Purna TugasPNS	100%	
32	Transmigrasi					
33	KEUANGAN	BAPENDA	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/Purna TugasPNS	2 Orang	
34	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				
35	Unsur Penunjang Pemerintahan (Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah)	BAPPEDA	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	1	
			Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PN	1	
36	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpaduu Satu Pintu	-	-	-	-



No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM YANG TIDAK DIKERJAKAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
37	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Kecamatan Arut Selatan	-	-	-	-
38		Kecamatan Arut Utara	-	-	-	-
39		Kecamatan Pangkalan Banteng	-	-	-	-
40		Kecamatan Kotawaringin Lama	-	-	-	-
41		Kecamatan Kumai	-	-	-	-
42		Kecamatan Pangkalan Lada	-	-	-	-

Sumber : Renja SKPD 2021



5.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, terdapat sebanyak 295 usulan kegiatan yang diakomodasi dari pokok-pokok pikiran DPRD, dengan total usulan sebesar Rp. **42.522.562.199,-** yang dilaksanakan oleh 15 SKPD. Berikut rekapitulasi usulan dan pagu kegiatan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2021. Usulan kegiatan dari pikir ini termuat dalam daftar usulan program dan kegiatan.



Tabel 5.4
Rincian Usulan dan Pagu Kegiatan Pokir Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
1	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Pancasila _ SLB KEL-Madurejo Jalan Pancasila - SLB Kelurahan Madurejo	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Bhayangkara KEL-Madurejo Jalan Bhayangkara II gang Manggis V, RT. 24 Kelurahan Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan KEL-Sidorejo Jalan cilik riwut I gang Rusa 4 RT. 14 Kelurahan Sidorejo	Kec. Arsel	130.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase KEL-Sidorejo Jalan sudirman SH gang Gagak 1 (Dalam) Kelurahan Sidorejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan / Rabat Beton (Lanjutan) KEL-Madurejo Jalan Garuda RT. 16 Kelurahan Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan / Rabat Beton (Lanjutan) KEL-Madurejo Jalan H. Moestalim Gang Purnma RT. 16 Kelurahan Madurejo	Kec. Arsel	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
7	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan drainase KEC-PANGKALAN BANTENG RT. 15 Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan DESA-Kebun Agung RT.07 RW. 2 Desa Kebun Agung Kecamatan Pangkalan Banteng	Kec. Pangkalan Banteng	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan KEC-ARUT SELATAN Gang Perapat RT. 22 Madurejo	Kec. Arsel	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	Pengendalian Banjir	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Normalisasi Sungai KEC-PANGKALAN LADA RT 15 Sungai Melawen	Kec. Pangkalan Lada	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan KEC-PANGKALAN LADA Wilayah RT 18 / 19 Pangkalan Tiga	Kec. Pangkalan Lada	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan	Peningkatan Jalan KEC-PANGKALAN LADA Wilayah RT 1/2 Pangkalan Tiga	Kec. Pangkalan Lada	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan KEC-PANGKALAN LADA RT 5 RW 2 Desa Sungai Pulau	Kec. Pangkalan Lada	160.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
14	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Gg. Bungur II dan Gg. Bungur III RT. 08 Mendawai	Kec. Arsel	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Jalan Matnor Gg. Amanah RT. 14 Kelurahan Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	Pengendalian Banjir	Pembangunan Jaringan Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi KEC-ARUT SELATAN Gg. Garu Kelurahan Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KEC-ARUT SELATAN Gg. Banitan RT 026 Kel. Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	Pengendalian Banjir	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai KEC-ARUT SELATAN Gg. Ubar Kelurahan Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman KEC-ARUT SELATAN Gg. Lubut 1 RT 022	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Temenggung Cikra Negara Gg. Kelakai II RT 023 Kel. Baru	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
21	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan KEC-ARUT SELATAN Jalan Lubut 1 RT 022 Kel. Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KEC-ARUT SELATAN Gg. Dermawan Kel. Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman KEC-ARUT SELATAN Gg. Along Lani Jalan Ahmad Yani RT 031 Kel. Baru	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan KEC-KUMAI Jalan Rahmat RT 03 Kel. Kumai Hilir	Kec. Kumai	180.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong KEC-KUMAI	Kec. Kumai	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	Pengendalian Banjir	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi KEC-KUMAI DIR Desa Sei Bakau	Kec. Kumai	165.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Cor Beton KEC-PANGKALAN LADA RT 9,10,11 Desa Purbasari	Kec. Pangkalan Lada	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
28	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Siring Batu Belah KEC-PANGKALAN LADA RT 8 Desa Purbasari	Kec. Pangkalan Lada	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Peningkatan Jalan Timbunan Latrit KEC-PANGKALAN LADA RT 19 Desa Purbasari	Kec. Pangkalan Lada	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN RT 4 Kel. Raja Seberang	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Gg. Saih Buluh 1 dan 2 Kelurahan Mendawai Seberang	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
32	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan (Latrit) KEC-PANGKALAN LADA Jalan penghubung Desa Lada Mandala Jaya-Pandu Sanjaya	Kec. Pangkalan Lada	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
33	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Batu Belah KEC-PANGKALAN LADA Jalan poros Kadipi Atas Rt 06	Kec. Pangkalan Lada	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
34	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Pemasangan Batu belah (telport) KEC-PANGKALAN LADA Gang Cempaka 1 RT 10 Desa Pangkalan Durin	Kec. Pangkalan Lada	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
35	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Pemasangan Batu Belah (telport) KEC-PANGKALAN LADA RT 09 Desa Sumber Agung	Kec. Pangkalan Lada	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pengerasan Jalan Laterit KEC-PANGKALAN BANTENG Jalan Konsolidasi SMK-Jogja RT 11 & RT 12 Desa Amin Jaya	Kec. Pangkalan Banteng	180.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pengerasan Jalan Laterit KEC-PANGKALAN BANTENG Jalan Usaha Tan RT 15 RW 04 Desa Amin Jaya	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
38	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pengerasan Jalan Laterit & Timbunan KEC-PANGKALAN BANTENG Jalan Usaha Tani RT 01-RT 03 Desa Amin Jaya	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pengerasan Jalan Laterit KEC-PANGKALAN BANTENG Jalan Warga RT 01 RW 01 Desa Sungai Pulau	Kec. Pangkalan Banteng	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Cor beton / Rabat Beton KEC-PANGKALAN BANTENG Jalan Kasturi RT 13 RW 04 Desa Amin Jaya	Kec. Pangkalan Banteng	140.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
41	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pengerasan Jalan Laterit KEC-PANGKALAN BANTENG Lingkungan Warga RT 05 Desa Amin Jaya	Kec. Pangkalan Banteng	140.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pengerasan Jalan / Leterit Dan Pembukaan Jalan RT 9 Desa Sungai Pakit KEC-PANGKALAN BANTENG RT 9 Desa Sungai Pakit	Kec. Pangkalan Banteng	185.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
43	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Laterit Jalan Usaha Tani Gapoktan RT 08 - RT 10 Desa Amin Jaya KEC-P.BANTENG Jalan Usaha Tani Gapoktan RT 08 - RT 10 Desa Amin Jaya	Kec. Pangkalan Banteng	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan KEC-KUMAI Gg. Syamsul / Gg/ Lupak RT 16 Gg. Siman RT 17 Kumai Hulu	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
45	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Gang Durian Desa Batu Belaman KEC-KUMAI Gang Durian Desa Batu Belaman	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
46	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan KEC-KUMAI RT 03 Desa Sei Tendang	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
47	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Cor Beton KEC-KUMAI Jalan Pemuda Selatan RT 16 Kumai Hilir	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
48	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase KEC-KUMAI RT 04 Desa Batu Belaman	Kec. Kumai	120.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
49	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase KEC-KUMAI RT 17 Kumai Hulu	Kec. Kumai	130.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
50	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Cor Beton KEC-ARUT SELATAN Jalan Lombok RT 03 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	180.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Cor Beton KEC-ARUT SELATAN Jalan Manggis RT 2 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	180.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Jalan Cempedak Tunggal 2 RT 21 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Cor Beton KEC-ARUT SELATAN RT 14/15 Gg. Mupakat II Gg. Bayam RT/ 15 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	180.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
54	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Cor Beton KEC-ARUT SELATAN Gg. Sengkaling RT 19 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	180.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
55	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Cor Beton KEC-ARUT SELATAN RT 15/16 Depan SLB Kel. Madurejo	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
56	Pengendalian Banjir	Pembangunan Jaringan Irigasi	Galian Primer Kelompok Tani Terbitan Baru Desa Kubu RT 07 KEC-KUMAI Kelompok Tani Terbitan Baru Desa Kubu RT 07	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57	Pengendalian Banjir	Pembangunan Jaringan Irigasi	Galian Primer KEC-KUMAI Kelompok Tani Bina Bersama RT 01 Desa Kubu	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
58	Pengendalian Banjir	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Normalisasi Sungai KEC-KUMAI RT 11 Desa Sungai Sintuk	Kec. Kumai	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59	Pengendalian Banjir	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Normalisasi Saluran Pengendali Banjir KEC-ARUT SELATAN Belakang SMPN 2 RT 12 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60	Pengendalian Banjir	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Normalisasi Saluran Pengendali Banjir KEC-ARUT SELATAN Pondok Pesantren Haddadil Qulup RT 15 Ke. Sidorejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
61	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	SPAL KEC-ARUT SELATAN RT. 20 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
62	Pengendalian Banjir	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Saluran Pengendali Banjir KEC-ARUT SELATAN RT 21 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN BTN Cinta Damai Desa Pasir Panjang	Kec. Arsel	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
64	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan (Cor Beton) KEC-ARUT SELATAN Gg. Banteng 4 tembus Gg. Kenongo Kel. Sidorejo	Kec. Arsel	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
65	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Jalan Alpukat II RT 11 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
66	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Gg. Mupakat RT 14 Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
67	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-KOTAWARINGIN LAMA Jalan Pelita Sari Desa Rungun	Kec. Kotawaringin Lama	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
68	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Timbunan Jalan KEC-ARUT SELATAN Kelompok Tani Arut 1 Kel. Mendawai Seberang	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
69	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Pembuatan Jalan Usaha Tani KEC-KOTAWARINGIN LAMA KM 32 Kotawaringin Lama	Kec. Kotawaringin Lama	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
70	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Gg. Tupai RT 14 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
71	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Dan Drainase Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Gg. Mupakat II RT 5 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
72	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Gg. Kelapa I Jalur 2 RT 05 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
73	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Gg. Ikhlas RT 9 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
74	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Pembangunan Saluran Air Pengendali Banjir Lingkungan KEC-ARUT SELATAN RT 09 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
75	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase KEC-ARUT SELATAN gg. Ludin RT 9 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
76	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Cor Beton KEC-ARUT SELATAN Gg. Padi RT 22 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
77	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Cor Beton KEC-KUMAI Jalan Marundau Gg. Sarang S	Kec. Kumai	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
78	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase KEC-KUMAI Gg, Terong Desa Bumi Harjo	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
79	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Usaha Tani Sawah KEC-PANGKALAN BANTENG Desa Natai Kerbau	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
80	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Wisata KEC-PANGKALAN LADA Embung Desa Lada Mandala Jaya	Kec. Pangkalan Lada	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
81	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-PANGKALAN BANTENG RT 03 EW 01 Desa sungai Pulau	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
82	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Gg. Mandiri RT 10 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
83	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Box Culvert KEC-ARUT SELATAN Gg. Prima RT 23 Kel. Sidorejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
84	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Lanjutan Drainase KEC-KOTAWARINGIN LAMA Jalan Riam Durian Sukajaya	Kec. Kotawaringin Lama	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
85	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-KUMAI Jalan Tinggiran / T. Jaelani Desa Sungai Tendang RT 4	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
86	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan Telport KEC-ARUT SELATAN Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
87	Pengendalian Banjir	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (OP) KEC-ARUT SELATAN RT 24 Mendawai	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
88	Pengendalian Banjir	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Pembuatan Embung KEC-PANGKALAN BANTENG Desa Sungai Pakit	Kec. Pangkalan Banteng	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
89	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN RT 20 Desa Pasir Panjang	Kec. Arsel	450.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
90	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan KEC-ARUT SELATAN RT 08 Desa Pasir Panjang	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
91	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Gg. Binjai RT 12 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
92	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase KEC-ARUT SELATAN Jalan H. Moestalim RT 16 RW 04 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
93	Pengendalian Banjir	Pembangunan Jaringan Irigasi	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DIR KEC-ARUT SELATAN Mendawai (tatakan Pialun) + Madurejo RT 19	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
94	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Jalan Ahmad Wongso Gg. Mandroe RT 19 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
95	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Jalan Unsu 1 dan 2 RT 19 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
96	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan Telpor KEC-ARUT SELATAN Jalan Merkisa RT 19 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	120.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
97	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan Telpor KEC-ARUT SELATAN Jalan Kecipir RT 04 Desa Pasir Panjang	Kec. Arsel	140.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
98	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Usaha Tani Box Culvert (Cor beton) KEC-ARUT SELATAN Gg. Karya RT 15 Kel. Sidorejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
99	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan (Cor Beton) KEC-ARUT SELATAN Gg. Sei Arut 1 dan 2 Kel. Mendawai Seberang	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
100	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan (Cor Beton) KEC-ARUT SELATAN Gg. Sei Keranji 1 & Gg. Kernaji 2 Mendawai Seberang	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan (Cor Beton) KEC-ARUT SELATAN Gg. Berasau RT 4 Kel. Mendawai Seberang	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
102	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan (Cor Beton) KEC-ARUT SELATAN Gg. Sabah 1 & Gg. Sabah 2 RT 5 Mendawai Seberang	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
103	Pengendalian Banjir	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Normalisasi Sungai KEC-ARUT SELATAN Pibun-Kolam Kel. Raja Seberang-Mendawai Seberang	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
104	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan KEC-ARUT SELATAN Jalan Usaha Tani Kelompok Tanui Mupakat Mandiri 2	Kec. Arsel	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
105	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan (Cor Beton) KEC-ARUT SELATAN RT 15 Jalan M. Arsyad RT 5 Kel. Mendawai Seberang	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
106	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Timbunan Proteksi KEC-KUMAI Jalan Kaswari RT 04 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
107	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan KEC-KUMAI Gg. Bina Karya RT 05 Desa Sei. Kapitan	Kec. Kumai	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
108	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong KEC-KUMAI Jalan Berdikari RT 06 Desa Sei Tendang	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
109	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-KUMAI Jalan Pelita RT 01 Kel. Candi	Kec. Kumai	180.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
110	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Jalan Campur Sari 2 RT 22 Kel. Madurejo	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
111	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan KEC-KUMAI Gg. Satep RT. 10 Desa Sei Kapitan	Kec. Kumai	140.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
112	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan	Lanjutan Jalan KEC-ARUT SELATAN gg, Berakas 2 RT 05 Kel. Baru	Kec. Arsel	170.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
113	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Titian KEC-ARUT SELATAN Gg. Solammania RT 16 Kel. Baru	Kec. Arsel	130.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
114	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Titian KEC-ARUT SELATAN Gg. Tembaga Indah Kel. Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
115	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan KEC-ARUT SELATAN Gg. Keluarga RT 26 Tatas Kelurahan Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
116	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan KEC-ARUT SELATAN gg. Ikan Mas RT 06 Kel. Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
117	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Cor Beton KEC-KUMAI Gg. H. Ijay RT.15 Kel. Kumai Hilir,	Kec. Kumai	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
118	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Usaha Tani (Latrit) KEC-PANGKALAN BANTENG RT 8 Dusun II Desa Simpang Berambai	Kec. Pangkalan Banteng	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
119	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase KEC-KUMAI RT.16 Kelurahan Kumai Hilir	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
120	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Jalan Diponegoro Desa Mulya Jadi KEC-PANGKALAN BANTENG RT.08 Desa Mulya Jadi	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
121	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pengerasan Agregat SP.2 Desa Bumi Harjo KEC-KUMAI Gg. Karet RT. 02	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
122	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase Lingkungan KEC-ARUT SELATAN GG Teratai RT 24 Sidorejo	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
123	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sangkalang Kel. Sidorejo	Kec. Arsel	130.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
124	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembuatan Saluran Drainase Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Belakang Masjid Agung Riyaludh Salihin Kel. Sidorejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
125	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Permukiman RT 04 dan 05 Kel. Mendawai	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
126	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pengendali Banjir Drainase Utama KEC-ARUT SELATAN Jalan Abdul Ancir - Seroja Mendawai	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
127	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembuatan Saluran Drainase Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Belakang Gg. Sengkalang Sidorejo	Kec. Arsel	120.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
128	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Permukiman KEC-ARUT SELATAN Gg. Kenanga 1 Kel. Mendawai	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
129	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Kawitan Gg. Keong RT.17 Kel. Sidorejo. KEC-ARUT SELATAN Gg. Keong RT.17 Kel. Sidorejo	Kec. Arsel	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
130	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl. Ahmad Wongso Gg. Matoa' KEC-ARUT SELATAN Jl. Ahmad Wongso Gg. Matoa	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
131	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Telpot KEC-PANGKALAN BANTENG Pasar Baru Desa Karang Mulya	Kec. Pangkalan Banteng	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
132	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Rajawali Gg. Elang KEC-ARUT SELATAN RT. 13 Kelurahan Sidorejo	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
133	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Arwana 3 KEC-ARUT SELATAN RT. 13 Kelurahan Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
134	Pengendalian Banjir	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Normalisasi Sungai KEC-PANGKALAN BANTENG Persawahan Dusun 4 Desa Simpang berambai	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
135	Pengendalian Banjir	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Normalisasi Sungai KEC-PANGKALAN BANTENG Desa Karang Sari (Lanjutan)	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
136	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pakunegara Gg. Haruan KEC-ARUT SELATAN Kelurahan Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
137	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan PR. Tumenggung Cakra Negara 1 KEC-ARUT SELATAN RT. 23 Kel. Baru	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
138	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase KEC-ARUT SELATAN RT.06 Kel. Mendawai	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
139	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Gg. Rusli RT.21 Kel. Mendawai	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
140	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase KEC-KUMAI Jalan Berdikari RT 5 Desa Sei Tendang	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
141	Pengendalian Banjir	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Pembersihan Pinggiran Sungai/OP KEC-KUMAI Andel Perkebunan Pertanian RT 8 Kel. Candi	Kec. Kumai	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
142	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Timbunan Jalan Latrit Andel KEC-KUMAI RT 8 Kel. Candi	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
143	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Limbah Rumah tangga Dan Rawan Banjir KEC-KUMAI RT 1 Kel. Candi	Kec. Kumai	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
144	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Galian Parit & Pembuatan Jalan KEC-KUMAI Dari Jalan DPRD Sei Tendang Menuju Jalan Padat Karya RT 10 Kel. Candi	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
145	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan (cor Beton Titian Ulin) KEC-ARUT SELATAN Gg. Melur 1 dan 2 Kel. Mendawai	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
146	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan KEC-ARUT SELATAN Gg. Melur 3 RT 3 Kel. Mendawai	Kec. Arsel	130.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
147	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan KEC-PANGKALAN LADA Jalan Masuk SMA 1, SMP 1 Pangkalan Lada	Kec. Pangkalan Lada	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
148	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Box Culvert KEC-ARUT SELATAN Jalan Poros Natai Baru (dekat kantor Desa) Desa Natai Baru	Kec. Arsel	170.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
149	Pengendalian Banjir	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Normalisasi Saluran Induk Pengendali Banjir KEC-ARUT SELATAN Kawasan Bungur Kelurahan Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
150	Pengendalian Banjir	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Normalisasi Sungai KEC-PANGKALAN BANTENG Desa Karang Mulya (Lanjutan)	Kec. Pangkalan Banteng	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
151	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan (cor & Sunset) KEC-ARUT SELATAN Batas RT 15 & RT 16 Kel. Mendawai	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
152	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan Latrit KEC-ARUT SELATAN Jalan Desa Natai Baru RT 8 & 4	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
153	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase Cor Beton KEC-ARUT SELATAN Jalan Poros Kumpai Batu Atas Menuju Kumpai Batu Bawah	Kec. Arsel	180.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
154	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan	Timbunan Jalan (Latrit) KEC-KUMAI Sungai Kakap Kel. Kumai Hulu- Desa Pangkalan Satu Kec. Kumai	Kec. Kumai	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
155	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan	Timbunan Jalan (Latrit) KEC-ARUT SELATAN Jl. Mupakat Dusun Karang Anyar - TPU. Desa Kumpai Batu Atas	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
156	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Box Culvert KEC-ARUT SELATAN Jalan Cilik Riwut I RT 14 Kel. Sidorejo	Kec. Arsel	190.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
157	Pengendalian Banjir	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Normalisasi Saluran Pengendali Banjir KEC-ARUT SELATAN Kawasan Bamban Kel. Sidorejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
158	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase dan Box Culvert KEC-ARUT SELATAN Gg. Kanji I RT 32 Kel. Baru	Kec. Arsel	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
159	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan (cor Beton Titian Ulin) KEC-ARUT SELATAN Desa Tanjung Putri	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
160	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Timbunan Jalan KEC-ARUT SELATAN Sungai Aher Menuju Sungai Bamban Kel. Madurejo	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
161	Pengendalian Banjir	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Pemavingan Tanggul Embung Eko Wisata KEC-PANGKALAN LADA Desa Mandala Jaya	Kec. Pangkalan Lada	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
162	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan (cor Beton Titian Ulin) KEC-ARUT SELATAN RT. 4 Kel. Raja Seberang	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
163	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan KEC-PANGKALAN BANTENG RT17/18 Desa Karang Mulya	Kec. Pangkalan Banteng	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
164	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Perluasan Kesempatan Kerja	Pengadaan Alat Cetak Batako Press Desa Sumber Agung KEC-PANGKALAN BANTENG Desa Sumber Agung	Kec. Pangkalan Banteng	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
165	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Pengadaan Alat Tukang KEC-ARUT SELATAN Karang Taruna Difah Tabel Kel. Mendawai Seberang	Kec. Arsel	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
166	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Bantuan Alat Meubelair KEC-KUMAI Kapitan Meubelair Desa Kapitan	Kec. Kumai	45.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
167	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Perluasan Kesempatan Kerja	Peralatan Cetak Batako Kelompok Tani Karya Usaha KEC-PANGKALAN LADA Kelompok Tani Karya Usaha RT 18 RW 4 Desa Lada Mandala Jaya	Kec. Pangkalan Lada	70.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
168	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Perluasan Kesempatan Kerja	Pengadaan Mesin Batako dan Perlengkapan Pertukangan KEC-ARUT SELATAN Kelompok Bamban II dan Kelompok Sirih Gading II Kel. Mendawai	Kec. Arsel	160.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
169	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	alat kesenian kuda lumping DESA-Amin Jaya Kelompok Adi Mustika Wijaya Desa Amin Jaya	Kec. Pangkalan Banteng	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
170	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Pagar Lanjutan KEC-PANGKALAN BANTENG SMPN 2 Sungai Bengkuang Kecamatan Pangkalan Banteng	Kec. Pangkalan Banteng	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
171	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Peningkatan sarana Sekolah dasar Paving KEC-PANGKALAN BANTENG Halaman SDN 1 Sidomulyo Kecamatan Pangkalan Banteng	Kec. Pangkalan Banteng	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
172	Program Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Timbunan Tanah SD - SMP Satu Atap Negeri 4 Kumai KEC-KUMAI SD/SMPN 4 Satu Atap Kumai, Desa Sekonyer	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
173	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Pemagaran Sekolah KEC-PANGKALAN LADA SDN Kedipi Atas	Kec. Pangkalan Lada	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
174	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Pagar KEC-PANGKALAN LADA SDN 1 Makarti	Kec. Pangkalan Lada	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
175	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Pengadaan Mebeluer KEC-PANGKALAN LADA SMP 1,2,3,4,5 Pangkalan Lada	Kec. Pangkalan Lada	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
176	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Peralatan Marching Band KEC-PANGKALAN LADA SDN 1 Pangkalan Dewa	Kec. Pangkalan Lada	70.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
177	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Pagar KEC-ARUT UTARA SDN 2 Pangkut	Kec. Aruta	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
178	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru KEC-KUMAI Madrasah Dinyah Raudatul Ulum Desa Bogam	Kec. Kumai	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
179	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Gedung Sekolah	Lanjutan Pembangunan Pagar Tembok dan Pagar Depan Sekolah KEC-KUMAI RA. Afwahul Jannah RT 07 Kumai hilir	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
180	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Rehab Atap dan Rangka Kayu MTs Ar Rahman KEC-PANGKALAN LADA Desa Sumber Agung	Kec. Pangkalan Lada	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
181	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 1 Rangsa KEC-ARUT SELATAN Desa Rangda	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
182	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 1 Umpang KEC-ARUT SELATAN Desa Umpang	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
183	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 1 Sulung KEC-ARUT SELATAN SDN 1 Sulung Desa Sulung	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
184	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 1 Kenambui KEC-ARUT SELATAN SDN 1 Kenambui	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
185	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Gedung Sekolah	Pemagaran TK Tunas Bangsa KEC-PANGKALAN LADA TK Tunas Bangsa Desa Lada Mandala Jaya	Kec. Pangkalan Lada	125.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
186	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Pemavingan Halaman KEC-PANGKALAN BANTENG SDN 1 Desa Amin Jaya	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
187	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Pagar Sekolah SDN Sebuai Barat KEC-KUMAI SDN Sebuai Barat	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
188	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Bantuan Pengadaan Meubelair KEC-ARUT SELATAN Madrasah Darul Hikam RT 14 Sidorejo	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
189	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Lanjutan Tambahan Ruang Kelas KEC-KUMAI SDN 01 Kumai Hulu	Kec. Kumai	160.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
190	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Pembangunan Pintu Gerbang dan Papan Nama KEC-KUMAI SDN 02 Kumai Hului	Kec. Kumai	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
191	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Penambahan Ruang Kelas KEC-KUMAI TK IT Membaul Husna Desa Sei Tendang	Kec. Kumai	160.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
192	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Ruang Guru KEC-PANGKALAN BANTENG SDN 1 Simpang Berambai	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
193	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan RKB KEC-PANGKALAN BANTENG SDN 1 Marga Mulya	Kec. Pangkalan Banteng	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
194	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Lanjutan Pembangunan Kantor KEC-KOTAWARINGIN LAMA SDN 1 Riam Durian	Kec. Kotawaringin Lama	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
195	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan RKB KEC-KOTAWARINGIN LAMA SDN 2 Riam Durian	Kec. Kotawaringin Lama	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
196	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Penyelesaian Pagar KEC-KOTAWARINGIN LAMA SDN 1 Palih Baru	Kec. Kotawaringin Lama	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
197	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Meubeler KEC-KOTAWARINGIN LAMA SDN 1 dan SDN 2 Sumber Mukti	Kec. Kotawaringin Lama	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
198	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Paving Halaman KEC-KOTAWARINGIN LAMA SMPN 2 Kolam	Kec. Kotawaringin Lama	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
199	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Pengadaan Laboratorium Komputer KEC-ARUT SELATAN SMP DAR AL Raudhlah Kel. Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
200	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer KEC-KOTAWARINGIN LAMA SMP AL Huda Kotawaringin Lama	Kec. Kotawaringin Lama	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
201	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Pengadaan Alat Sanggar KEC-ARUT SELATAN Sanggar Tunas Anum Kel. Raja	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
202	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Pagar KEC-PANGKALAN LADA Sekolah SDN 2 Purbasari	Kec. Pangkalan Lada	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
203	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Pagar KEC-PANGKALAN LADA Sekolah SDN 1 Desa Karang Sari	Kec. Pangkalan Lada	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
204	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Pagar KEC-ARUT SELATAN SDN 5 Sidorejo	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
205	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Pengecatan dan Pemavingan Kesultanan Istana Kuning KEC-ARUT SELATAN Kesultanan Istana Kuning Kelurahan Raja	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
206	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Timbunan Tanah KEC-KUMAI SMPN 4 Desa Kubu	Kec. Kumai	135.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
207	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Guru Sekolah	Pembangunan Ruang Guru KEC-PANGKALAN BANTENG SDN 1 Mulya Jadi Desa Mulyajadi	Kec. Pangkalan Banteng	145.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
208	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Pembangunan Pagar KEC-ARUT SELATAN SMPN 5 Arsel Desa Sulung	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
209	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya	Pengadaan Alat Kesenian KEC-PANGKALAN LADA Jaranan Marunting Cipto Budoyo, Desa Sungai Melawen	Kec. Pangkalan Lada	65.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
210	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya	Pengadaan Alat Kesenian KEC-PANGKALAN LADA Jaranan Baruno Sekti, Desa Sumber Agung	Kec. Pangkalan Lada	65.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
211	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya	Pengadaan Alat Kesenian KEC-PANGKALAN LADA Jaranan Marunting Wahyu Sejati, Desa Pangkalan Durin	Kec. Pangkalan Lada	65.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
212	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Pemasangan Paving dan Pembangunan Pintu Gerbang KEC-KUMAI SDN 1 Sei Tendang	Kec. Kumai	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
213	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Paving Halaman KEC-ARUT SELATAN SMPN 7 Arsel	Kec. Arsel	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
214	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Pagar KEC-ARUT SELATAN Sekolah SDN 1 Natai Baru	Kec. Arsel	185.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
215	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Pembuatan WC dan Sanitasi KEC-ARUT SELATAN SDN 5 Mendawai	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
216	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Pembuatan WC dan Sanitasi KEC-ARUT SELATAN SDN 7 Mendawai	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
217	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya	Bantuan Alat Kesenian (Gamelan) KEC-PANGKALAN LADA Kelompok Kesenian Cipto Budoyo Desa Purbasari	Kec. Pangkalan Lada	160.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
218	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Bantuan Pakaian Adat Daerah Sanggar Kesenian KEC-PANGKALAN BANTENG Kelompok Manunggal Budoyo Desa Sungai Pakit	Kec. Pangkalan Banteng	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
219	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya	Bantuan Alat Kesenian dan Pakaian Tradisonal KEC-ARUT UTARA Sanggar Penyang Laman Desa Panahan	Kec. Aruta	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
220	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Alat Tangkap Ikan KEL-Kumai Hilir Kelompok Nelayan Sarana Utama Kelurahan Kumai Hilir	Kec. Kumai	60.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
221	Program Pengembangan Perikanan	Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan	Pengadaan Bibit Ikan dan Pakan KEC-PANGKALAN LADA Pokdakan Pemuda Mandiri Arut Utara	Kec. Pangkalan Lada	100.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
222	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Mesin 23 PK KEC-KUMAI Kelompok Nelayan Terbit Fajar Desa Teluk Bogam	Kec. Kumai	180.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
223	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Kelotok 1 GT KEC-KUMAI Kelompok Nelayan Mina Melayu Kel. Kumai Hilir RT 11	Kec. Kumai	120.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
224	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Kelotok Mesin Tempel 1 GT KEC-KOTAWARINGIN LAMA Kelompok Perikanan Maju Bersama Kel. Kotawaringin Hulu	Kec. Kotawaringin Lama	175.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
225	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Alat Tangkap Ikan KEC-KOTAWARINGIN LAMA Kelompok Perikanan Danau Selasih Ke. Kotawaringin Hilir	Kec. Kotawaringin Lama	100.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
226	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan, Pembinaan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Perikanan	Pengadaan Jaring / Pukat Ikan KEC-PANGKALAN BANTENG Desa Pangkalan Banteng	Kec. Pangkalan Banteng	50.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
227	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Rambat Pengilar KEC-ARUT SELATAN Pengadaan Rambat Pengilar Kelompok Nelayan Rangda Melauk Desa Rangda	Kec. Arsel	75.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
228	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Perahu Tancap 1 GT KEC-KUMAI Kelompok Bintang Sembilan Desa Sungai Kapitan	Kec. Kumai	100.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
229	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Mesin Perahu (Super Fighter GX 490SL 23,5 HP) KEC-KUMAI Kelompok Usaha Bersama Panglima Batur Desa Sei Kapitan	Kec. Kumai	100.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
230	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Kelotok 5 GT dan Alat Tangkap KEC-KUMAI Kelompok Nelayan Sahabat Kita Kumai Hilir	Kec. Kumai	180.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
231	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Kapal 3 GT KEC-KUMAI KUB Harpaan Bersama Desa Sei. Bakau	Kec. Kumai	120.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
232	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Kelotok 2 GT KEC-ARUT SELATAN Kelompok Sirih Gading 1 & Kelompok Sinar Arut Kel.Mendawai	Kec. Arsel	175.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
233	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Mesin 23 PK KEC-KUMAI KUB Mina Nelayan & KUB Mina Sepakat Desa Sei Bakau dan Desa Kubu	Kec. Kumai	150.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
234	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Pukat Kepiting Rajungan Ukuran 3,5 KEC-KUMAI KUB Bogam Raya & KUB Keraya Mandiri Desa Bogam dan Keraya	Kec. Kumai	50.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
235	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Perahu Tancap 1 GT KEC-KUMAI KUB Candi Berkarya Kel. Candi	Kec. Kumai	100.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
236	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Bibit Ikan Lele KEC-KUMAI Kel. Candi Postan Subur Makmur	Kec. Kumai	20.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
237	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Kelotok 1 GT & Pengadaan Benang Trol KEC-ARUT SELATAN Kelompok Nelayan Kel. Mendawai	Kec. Arsel	180.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
238	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Kelotok 1 GT KEC-ARUT SELATAN Nelayan Sungai Arut RT 11 Kel. Mendawai	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
239	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Mesin Dongfeng 23 PK KEC-ARUT SELATAN Kelompok Usaha Bersama Tanjung Bersatu Desa Tanjung Putri	Kec. Arsel	130.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
240	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Kelotok 1 GT KEC-ARUT SELATAN Pengadaan Kapal 1 GT untuk KUB "Mandiri" dan KUB "Tepian Arut" RT 10 Kel. Mendawai	Kec. Arsel	137.999.972	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
241	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Kelotok 1 GT KEC-ARUT SELATAN Pengadaan Kapal 1 GT untuk KUB "Sirih Gading 1" dan KUB "Sinar Arut" RT. 6 Kel. Mendawai	Kec. Arsel	137.999.972	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
242	Program Pengembangan Perikanan	Pengembangan Kelembaga Usaha Kelompok Perikanan	Pengadaan Rambat Pengilar KEC-ARUT SELATAN Pengadaan Kain Pengilar untuk KN "Berasau" RT. 10 Kel. Mendawai	Kec. Arsel	76.562.255	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
243	Peningkatan Produksi Pertanian	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	Benih Padi KEC-PANGKALAN BANTENG Desa Marga Mulya	Kec. Pangkalan Banteng	50.000.000	DINAS TPHP
244	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Lahan dan Tataguna Air Pertanian	Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Terong KEC-ARUT SELATAN Kelompok Tani Terong	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS TPHP
245	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Lahan dan Tataguna Air Pertanian	Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Karya Tani KEC-KOTAWARINGIN LAMA Kelompok Tani Karya Tani	Kec. Kotawaringin Lama	170.000.000	DINAS TPHP
246	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Lahan dan Tataguna Air Pertanian	Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Karya Bakti KEC-KOTAWARINGIN LAMA Kelompok Tani Karya Bakti	Kec. Kotawaringin Lama	170.000.000	DINAS TPHP
247	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Lahan dan Tataguna Air Pertanian	Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Ngudi Karya KEC-KOTAWARINGIN LAMA Kelompok Tani Ngudi Karya	Kec. Kotawaringin Lama	170.000.000	DINAS TPHP
248	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Lahan dan Tataguna Air Pertanian	Jalan Usaha Tani (Laterit) Kelompok Tani Ngudi Mukti Riam Durian KEC-KOTAWARINGIN LAMA Kelompok Tani Ngudi Mukti Riam Durian	Kec. Kotawaringin Lama	190.000.000	DINAS TPHP



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
249	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Lanjutan Pembangunan Pagar Makam KEC-PANGKALAN BANTENG Desa Marga Mulya	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
250	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Dan Pembangunan Pagar tempat Pemakaman Umum KEC-PANGKALAN BANTENG RT 13 RW 04 Desa Amin Jaya	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
251	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Pendopo dan Pagar Makam KEC-PANGKALAN BANTENG RT 6 Desa Sungai Pakit	Kec. Pangkalan Banteng	200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
252	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Pagar Makam RT 27 Bungur Kelurahan Baru KEC-ARUT SELATAN RT.27 Pangkalan Bungur Kel. Baru	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
253	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Pembangunan Pagar Kuburan KEC-KUMAI RT 10 Kel. Candi	Kec. Kumai	100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
254	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Pagar Makam Desa Sulung KEC-ARUT SELATAN Desa Sulung	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
255	Pembangunan Sarana Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan APILL	Pembuatan Marka Jalan KEC-ARUT SELATAN Jalan Pasanah	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
256	Pembangunan Sarana Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan APILL	Pembuatan Marka Jalan KEC-ARUT SELATAN Jalan Ahmad Wongso	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
257	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pengadaan kelotok untuk pariwisata KEC-ARUT SELATAN RT 09 Mendawai	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PARIWISATA
258	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pembangunan Paving KEC-KUMAI Daerah Pariwisata Pantai Kubu	Kec. Kumai	200.000.000	DINAS PARIWISATA
259	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	Bantuan Cabang Olahraga Basket (Perbasi) Kobar KEC-ARUT SELATAN Kecamatan Arut Selatan	Kec. Arsel	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
260	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	Tournament Sepak Bola Usia Dini KEC-ARUT SELATAN Kecamatan Arut Selatan	Kec. Arsel	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
261	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	Tournament Catur KEC-ARUT SELATAN Kecamatan Arut Selatan	Kec. Arsel	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
262	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	Bantuan Untuk Pengurus Cabang Olahraga FASI Kab. Kobar KEC-ARUT SELATAN Kotawaringin Barat	Kec. Arsel	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
263	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	Bantuan Untuk Cabang Olahraga Balap Motor (IMI Kobar) KEC-ARUT SELATAN Kotawaringin Barat	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
264	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	Rehabilitasi Tribun Lapangan Bola Kriya Jaya Kecamatan Kotawaringin Lama KEC-KOTAWARINGIN LAMA Kecamatan Kotawaringin Lama	Kec. Kotawaringin Lama	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
265	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan jaringannya	Rehab Puskesmas Teluk Bogam KEC-KUMAI Teluk Bogam	Kec. Kumai	200.000.000	DINAS KESEHATAN
266	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Pengadaan Ambulan/Pusling	Pengadaan Mobil Jenazah KEC-KUMAI Puskesmas Kumai	Kec. Kumai	200.000.000	DINAS KESEHATAN
267	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Papan Nama dan Peningkatan Pagar KEC-PANGKALAN BANTENG Puskesmas Semanggung	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS KESEHATAN
268	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Pembangunan Puskesmas	Pekerjaan Penataan Halaman dan Drainase KEC-ARUT SELATAN Puskesmas Mendawai	Kec. Arsel	140.000.000	DINAS KESEHATAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
269	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Ruang Aula KEC-ARUT SELATAN Puskesmas Desa Runtu	Kec. Arsel	200.000.000	DINAS KESEHATAN
270	Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah sakit	Pembangunan Rumah Sakit	Rehab Koridor Induk RSUD Sultan Imanudin KEC-ARUT SELATAN RSUD Sultan Imanudin	RSUD Sultan Imanuddin	100.000.000	RSUD SULTAN IMANUDDIN
271	Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah sakit	Pembangunan Rumah Sakit	Lanjutan Pembangunan Pagar Keliling RSUD KEC-ARUT SELATAN RSUD Sultan Imanudin	RSUD Sultan Imanuddin	150.000.000	RSUD SULTAN IMANUDDIN
272	Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah sakit	Pembangunan Rumah Sakit	Pembuatan Gapura Keluar RSUD KEC-ARUT SELATAN RSUD Sultan Imanudin	RSUD Sultan Imanuddin	100.000.000	RSUD SULTAN IMANUDDIN
273	Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah sakit	Pembangunan Rumah Sakit	Ruang Bangsal Sakit Jiwa RSUD KEC-ARUT SELATAN RSUD Sultan Imanudin	RSUD Sultan Imanuddin	200.000.000	RSUD SULTAN IMANUDDIN
274	Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah sakit	Pembangunan Rumah Sakit	Penataan Halaman Belakang RSUD KEC-ARUT SELATAN RSUD Sultan Imanudin	RSUD Sultan Imanuddin	150.000.000	RSUD SULTAN IMANUDDIN
275	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	Pengadaan Sapi Ternak DESA-Sungai Bedaun Poktan Duta Lestari Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai	Kec. Kumai	130.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
276	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	PANGADAAN BIBIT KAMBING KEC-PANGKALAN BANTENG Desa Marga Mulya	Kec. Pangkalan Banteng	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
277	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	Pengadaan Bibit Sapi KEC-KOTAWARINGIN LAMA Poktan Tunas Harapan Jaya Desa Ipuh Bangun Jaya	Kec. Kotawaringin Lama	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
278	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	Pengadaan bibit sapi bali KEC-KOTAWARINGIN LAMA Poktan Barokah Desa Ipuh Bangun Jaya	Kec. Kotawaringin Lama	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
279	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	bantuan kambing KEC-ARUT SELATAN Kelompok Bungur Sejahtera Kelurahan Baru RT 27	Kec. Arsel	75.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
280	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	Bantuan Kambing KEC-KOTAWARINGIN LAMA Poktan Ngudi Mulyo Desa Palih Baru	Kec. Kotawaringin Lama	75.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
281	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	Pengadaan Bibit Sapi Perah KEC-KOTAWARINGIN LAMA Kelompok Peternakan Karya Jaya Desa Suka Jaya	Kec. Kotawaringin Lama	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
282	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia	Pengembangan Ayam Buras KEC-KOTAWARINGIN LAMA Kelompok Peternakan Talok PANjung Kelurahan Kotawaringin Hilir	Kec. Kotawaringin Lama	175.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
283	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	Pengolahan Pupuk Kandang Organik Untuk Unggas dan Sapi KEC-KOTAWARINGIN LAMA Kelompok Peternakan Talok Panjang Kel. Kotawaringin Hilir	Kec. Kotawaringin Lama	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
284	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	Pengembangan Kambing PE KEC-PANGKALAN BANTENG Kelompok Tani Makmur Jaya Desa Amin Jaya	Kec. Pangkalan Banteng	175.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
285	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	Pengadaan Bibit Sapi KEC-ARUT SELATAN Kelompok Tani Pangkalan Paring Mendawai Seberang	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
286	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia	Pengembangan Ternak Itik KEC-KUMAI Kelompok Peternak Jambu RT 08 Desa Sungai Kapitan	Kec. Kumai	50.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
287	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	pengadaan sapi KEC-ARUT SELATAN Kelompok Tani Umpang Sejahtera Desa Umpang	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
288	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia	Bantuan Kelompok Tani Bersatu KEC-KUMAI RT.05 Desa Sungai Kapitan	Kec. Kumai	30.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
289	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	Pengadaan Ternak Sapi dan Kandang KEC-ARUT SELATAN RT 09 Mendawai	Kec. Arsel	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
290	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	Pengadaan Bibit Sapi KEC-PANGKALAN BANTENG Kelompok Tani Karya Bakti Desa Arga Mulya	Kec. Pangkalan Banteng	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
291	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia	Tournament Lomba Burung KEC-ARUT SELATAN Arut Selatan	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
292	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Prasarana Persampahan Roda Tiga KEC-PANGKALAN LADA Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan Transportasi (Roda Tiga)	Kec. Pangkalan Lada	175.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
293	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Pemavingan TPS 3R Kelurahan Kotawaringin Hulu KEC-KOTAWARINGIN LAMA TPS 3R Kelurahan Kotawaringin Hulu	Kec. Kotawaringin Lama	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



No.	Program	Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi	Pagu	SKPD
294	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab WC dan Ruangan Kantor KEC-ARUT SELATAN Kantor DP3AP2KB	Kec. Arsel	100.000.000	DINAS P3AP2KB
295	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Revitalisasi Paving dan Pagar Kantor Kelurahan Sidorejo KEC-ARUT SELATAN Kantor Kelurahan Sidorejo	Kel. Sidorejo	170.000.000	KECAMATAN ARUT SELATAN

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total pagu usulan program atas dasar pokok pikiran DPRD Kabupaten Kotawaringin barat adalah sebesar **Rp. 42.522.562.199,-**

dengan jumlah usulan sebanyak 295 usulan. Secara rincian SKPD penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.5
Rekapitulasi Usulan dan Pagu Kegiatan Pokir Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2021

No	SKPD	Pekerjaan	Pagu
1	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	6	500.000.000
2	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	5	375.000.000
3	Rsud Sultan Imanuddin	5	700.000.000
4	Dinas Kesehatan	5	890.000.000
5	Dinas Lingkungan Hidup	2	325.000 .000
6	Dinas P3AP2KB	1	100.000.000
7	Dinas Pariwisata	2	350.000.000
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	163	25.625.000.000
9	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	51	6.810.000.000
10	Dinas Perhubungan	2	300.000.000
11	Dinas Perikanan	23	2.617.562.199
12	Kec. Arsel	1	170.000.000
13	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6	900.000.000
14	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	17	1.960.000.000
15	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	6	900.000.000
Total		295	42.522.562.199

Sumber : Usulan pokok pikiran DPRD 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, usulan dari pokok pikiran DPRD Kabupaten Kotawaringin barat adalah sebanyak 295 usulan, dengan jumlah usulan terbanyak berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebanyak 163 usulan, dan pagu terbesar berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 25.625.000.000,00.





**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**



Bab 6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada sub bab ini dipaparkan target capaian indikator kinerja utama Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2021. Realisasi IKU pada tahun 2017-2019 telah melampaui target RPJMD yaitu untuk IPM dan Indek Kualitas Lingkungan Hidup ,sehingga target tahun 2021 lebih rendah pada RPJMD dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi Angka Kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2017 dan 2018 tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan target capaian IKU 2020-2021 pada RPJMD.

Tetapi untuk IKU Pertumbuhan Ekonomi, Realisasi dari tahun 2017-2019 masih di bawah target capaian IKU pada RPJMD walaupun realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 masih lebih tinggi di bandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Untuk target capaian IKU pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 7,63 masih lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 6,72. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan strategi ekonomi daerah seperti meningkatkan daya saing di sektor pertambangan, konstruksi, perdagangan besar, pengadaan listrik dan gas, komunikasi dan informasi, sektor jasa dan industri pengolahan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditahun 2020 dan 2021 sehingga target capaian IKU 2021 dalam RPJMD dapat terealisasi. Target capaian IKU untuk tahun 2017 – 2022 dan Realisasi Target IKU 2017-2021 Kabupaten Kotawaringin Barat selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Target Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022

	Indikator	Satuan	Target tahun ke					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Good Governance	Skala	NA	6,04	6,14	6,2	6,24	6,28
2	Indeks Pembangunan Manusia	%	71,58	72,03	72,48	72,93	73,38	73,83
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	NA	7,48	7,53	7,58	7,63	7,68
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	skala	NA	57,33	60,00	62,67	65,33	68,00
5	Indeks Pembangunan Masyarakat	skala	NA	6,12	6,2	6,4	6,8	7,1
6	Angka Kemiskinan	%	NA	4,50	4,30	4,10	3,90	3,50
7	Tourism Intensity Index	NA	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat

Sumber : RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022

Tabel 6.2.
Realisasi dan Target
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Realisasi Tahun			Target Tahun	
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	-	-		6,2*	6,24*
2	Indeks Pembangunan Manusia	%	72,11	72,46	72,85	72,93*	73,38*
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,89	6,45	6,72	7,58*	7,63*
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	55,21	64,10	66,7	62,67*	65,33*
5	Indeks Pembangunan Masyarakat	Skala	-	-	-	6,4*	6,8*
6	Angka Kemiskinan	%	5,27	5,96	4,11	4,10*	3,9*
7	Tourism Intensity Index	Skala	-	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat

Sumber : LKPJ 2019, BPS Kotawaringin Barat 2020 dan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022

6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Pada sub bab ini dipaparkan target capaian indikator kinerja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2021. Beberapa target IKD dalam RPJMD disesuaikan dalam RKPD tahun 2021 seperti Target IKD dalam Misi 6, dimana target IKD ditetapkan berdasarkan nilai estimasi dengan melihat realisasi tahun sebelumnya. Penetapan target



tersebut didasarkan pada destinasi jenis produk kepariwisataan hasil lokal, kunjungan wisatawan, persentase kelembagaan industri pariwisata dan SDM pariwisata. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi capaian target tahun 2019. Target capaian IKD untuk tahun 2021 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3.
Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021 dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019	Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021	
			Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022	Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 30 Tahun 2020
1	2	3	4	5
1	MISI 1			
1.1	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	WTP
1.2	Nilai SAKIP Kabupaten	B	A	A
1.3	Indeks Profesionalitas Aparatur		Meningkat	
1.4	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
1.5	Indeks E-Gov (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik / SPBE)	2,47	80%	
1.6	Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan public	82,36	96%	96%
1.7	% Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang benar dan tepat waktu	80%	90%	
2	MISI 2			
2.1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,69	13,38	13,38
2.2	Rata-Rata Lama Sekolah	8,35	9,01	9,01
2.3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	77.229		
2.4	Angka Harapan Hidup	72	71,17	71,17
2.5	Persentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi		80%	
2.6	Jumlah Cabang Olahraga Yang Memperoleh Prestasi ditingkat Pusat Regional Provinsi	8 cabor 1 Cabor		35 cabor
3	MISI 3			
3.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	6,81	7,10%	7,10%
3.2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7,37	8,30%	8,30%

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019	Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021	
			Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022	Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 30 Tahun 2020
1	2	3	4	5
3.3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	25,75	15%	15%
3.4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	97,04	93,8%	
3.5	Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN		20%	2,19%
3.6	Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	15,7%	11,96	11,96
3.7	Tingkat Konektivitas Jalan			
3.8	Indeks Kualitas Air	45%	62%	62%
3.9	Indeks Kualitas Udara	89,42%	69%	69%
3.10	Indeks Tutupan Hutan	65,91	65%	65%
3.11	Indeks Resiko Bencana	71,8%	87%	87%
4	MISI 4			
4.1	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)		0,74%	0,74%
4.2	Persentase Desa Mandiri	4%	6%	6%
4.3	Indeks Pemberdayaan Gender	59,72	97,98	97,98
4.4	Kategori Kabupaten Layak Anak	570	Madya	Madya
5	MISI 5			
5.1	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	15,08%	12,50%	
5.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01	2,61%	2,61%
5.3	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan			50%
6	MISI 6			
6.1	Rata-rata Lama Tinggal	2,3 Hari		4 Hari
6.2	Jumlah wisatawan manca negara	14.552	-----	
6.3	Jumlah wisatawan nusantara	10.937	-----	
6.4	Spending of money	98 Miliar		92 Miliar
6.5	Persentase cagar budaya yang lestari	33%		76%

Sumber : RPJMD Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dan LKPJ 2019







**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**



Bab 7

Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Substansi RKPD disusun dengan melalui berbagai proses atau tahapan, yang merupakan perwujudan sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan *stakeholder*, baik ditingkat Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi dan Nasional dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi secara faktual.

Dalam RKPD ini dituangkan target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan. Untuk mencapai target kinerja dimaksud, diperlukan komitmen dari seluruh perangkat daerah, dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar:

1. Melaksanakan seluruh program prioritas, meliputi: program untuk mencapai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, program untuk mendukung target Standar Pelayanan Minimum, program arahan kepala daerah, program tematik terpadu antar sektor dan program yang merupakan tupoksi SKPD.
2. Melaksanakan kegiatan secara disiplin sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK) untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan secara tertib.
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh.
5. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait, baik vertikal maupun horisontal, agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 ini diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni: “Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, dan Kepariwisata terhadap Pendapatan Daerah”.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, terjadi ketidaksesuaian terhadap perkembangan keadaan atau tidak sesuai



dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan RPKD dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Hj. NURHIDAYAH, SH.,MH